BALAIRUNG

EDISI NO.23/TH.X/1995

MAJALAH MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA

PEMILU 97
Merayakan Pesta Untuk Status Quo ?

Wimar Witoelar :
Ekonomi Indonesia Dikendalikan Kekuasaan

Rp. 2.500,00

ISSN : 0215 – 076X

Supersin®

Lapisan anti refleksi dari RODENSTOCK

1. Pantulannya **4 X** lebih sedikit dari Multicoating biasa, sehingga keindahan mata anda terlihat lebih alami.

2. **Supersin® Menghilangkan** bayangan hantu/semu disaat mengemudi kendaraan dimalam hari.

3. Bahan material dasar **RODENSTOCK** menahan sinar U.V. lebih baik dari lensa biasa, sehingga mata tidak cepat Katarak (mengeruh pada usia lanjut).

4. **Supersin®**
bergaransi
1 tahun
terhadap
kerusakan
coating.

Supersin® adalah merek dagang dari **RODENSTOCK**, terdaftar pada Dinas Patent Departemen Kehakiman No : 131574. Merek lain dilarang menggunakan istilah Supersin.

■ Mintalah Kartu Garansi Rodenstock Supersin bila anda membeli Lensa orisinil Supersin dengan logo R yang terdapat pada lensa.

R
RODENSTOCK

MASS ASRIMITRA AD.

Ada pernyataan yang menggelitik dari Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika Drs. Subrata, bahwa tidak perlu buru-buru menilai negatif pada pers kampus yang memuat berita-berita politik. Penegasan Subrata itu dikemukakan seusai membuka Pelatihan Jurnalistik Tingkat Dasar. Diklat diadakan oleh Bulletin Kertha Aksara, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 26 Juli 1995 lalu. Bahkan menurut Subrata kita harus mengembangkan *positive thinking*, harus memiliki pola sikap yang positif. Karena pada dasarnya kegiatan jurnalistik meliputi seluruh aspek kehidupan yang menyangkut ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Seorang jurnalis, adalah seorang spesialis sekaligus seorang generalis, mengingat wawasannya mencakup seluruh gatra kehidupan tadi.

ACHMAD KRISNA

Pengurus BALAIRUNG usai musyawarah tahunan, mereka tidak sedang bicara politik

Bagi kami sulit memberikan penafsiran ungkapan Subrata tersebut, karena hal itu akan selalu terkait dengan kondisi politik saat itu juga. Dan kami tidak tahu apakah BALAIRUNG juga sudah memuat berita politik? Maka kami lebih memaknai ungkapan kedua. Benarlah anggapan Anda bahwa BALAIRUNG adalah Majalah Mahasiswa UGM. Maka dari itu selama sepuluh tahun ini kami telah mencoba bagaimana mengakomodasikan aspirasi mahasiswa UGM yang 30 ribuan jumlahnya itu, ditambah dengan latar belakang keilmuwan yang sangat beragam. Sumber daya manusia memang kendala utama kami untuk menjawab tantangan di atas. Majalah BALAIRUNG bersama SKM Bulaksumur beberapa waktu lalu juga telah berupaya melakukan rekruitmen pengurus baru. Dan harapan kami adalah adanya pengurus yang dapat mewakili keberagaman akademik (fakultas, jurusan, program studi) yang ada di UGM.

Menindaklanjuti itu semua Musyawarah Pengurus Majalah BALAIRUNG VIII pun telah dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 1996 yang lalu. Struktur kepengurusan pun berganti, yang tua dan akan lulus diganti yang baru yang masih segar.

Pembaca, Pemilu di Indonesia tampaknya jadi kian marak. Barangkali karena Indonesia akan melewati tahun genting 1998! . . . Suksesi?, ah, biarkan waktu yang akan menjawabnya. Lagi-lagi bukannya kami latah ikut-ikutan bicara Pemilu lewat Laporan Utama, dan memanaskan suasana. Bukan, bukan itu maksudnya, tetapi kami bermaksud menawarkan alternatif pemikiran dan dialog ilmiah, untuk menggapai negara yang demokratis dan berkeadilan, begitulah kira-kira.

Pembaca, Pulau Nias, Bali kedua barangkali sementara orang menyebut. Tarik-menarik antara dinamisme dan agama baru pun kian kuat. Sementara ombak Samudera Indonesia yang tinggi telah mempesonakan para wisatawan dan investor untuk mengeksploitasi keperawanan Pulau kecil ini. Tetapi benarkah? Ikuti perjalanan repoter BALAIRUNG Dirmawan Hatta yang tak sempat Lebaran dikampung halamannya sendiri Magelang, tetapi justru di pulau seberang Sumatera ini.

Ada sedikit perubahan rubrikasi BALAIRUNG sejak edisi 22 yang lalu. Rubrik kemahasiswaan kini berganti menjadi rubrik Kampus. Ada satu hal yang hendak kami capai, BALAIRUNG ingin bahwa selain dunia mahasiswa ada dunia yang lebih luas dan melingkupinya yaitu kampus. BALAIRUNG pun ingin menjadi bagiannya, sekaligus menjadi pagar darinya. Tetapi bukan berarti BALAIRUNG akan lepas dari komunitasnya sendiri, tidak!, BALAIRUNG tetap majalah mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Dan inilah karya mahasiswa UGM buat bangsa ini.

Penjaga dapur

BALAIRUNG
MAJALAH MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA

Diterbitkan oleh Badan Penerbit Pers Mahasiswa Universitas Gadjah Mada(BPPM UGM) **Ijin Terbit** SK MENPEN RI No. 1039/DIRJEN PPG/STT/1986, SK REKTOR No. UGM/UM/01/37 International Standard Serial Number (ISSN):0215-076X **Pelindung** : Prof. Dr. Sukanto Reksohadiprodjo, M.Com. (Rektor UGM) **Penasehat**: Ir. Bambang Kartika (Purek III UGM), Prof. Dr. Koesnadi Hardjosumantri, S.H., Ir. Abdul Hamid Dipopramono **Pemimpin Umum**: Sunarto Cipto Harjono **Sekretaris Umum**: Lais Abid **Pemimpin Redaksi:** Frans Surdiasis **Sekretaris Redaksi**: Amalinda Savirani **Ka.Litbang**: Eriyanto **Staf Litbang**: Anthoni Dio Martin, Indriaswati DS **Pemimpin Perusahaan**: Timbul Sunoto **Distribusi**:Agus Riyanto, Moh. Marjuki, Oscar (non aktif) **Iklan dan Promosi:** Mohammad Sri Sadono, Risdianto, Kun Anggoro EY, Among Kurnia Ebo, F.Ika Yuniarti **Administrasi:** Erna Setyaningrum **Keuangan:** Sholihati, Daryanti **Penanggungjawab Rubrik**: Hary Prabowo, Kusbiantoro E, Aship Agus Hasani, F. Indirasari, Dirmawan Hatta, Rudy Isbowo, Khoirul Rosyadi, Agung Widiatmoko **Reporter:** Aris Purnomo, Moh. Mustajab, Nining Sunartiningsih, Nenden NF, Herwanto, Wuwun W, Mashudi, Sigit RA, Sutrisno, Widarso, Akhid Masduki, M Arifin, Hendrik FS, Freddy WK, Yarmanis, Setiati, M Hermawan, M. Naufal **Redaktur Artistik**: Agung Arif Budiman **Staf Artistik**: Pedy Arsanti, M. Gandhi A., Eka Kurniawan, Lely Fakhrina **Redaktur Foto:** Tri wasono Sunu **Fotografer:** Achmad Krisna **Alamat Redaksi:** Bulaksumur B-21 Yogyakarta 55281, Telp (0274) 901703, Fax. (0274) 566171 **Rekening:** Tabungan MITRA BAPINDO Cabang UGM No. Rek. 22.1.5027.66.1 **Percetakan**: Liberty Offset, JL. Jayengprawiran 21 Yogyakarta, Telp. (0274) 512908. Isi diluar tanggung jawab percetakan

Redaksi menerima tulisan dan foto terutama tentang dunia mahasiswa. Redaksi berhak mengubah tulisan sepanjang tidak mengubah isi dan maknanya. Tulisan diketik rangkap 2-6 halaman kuarto. Atau dalam bentuk file disket dengan program pengolah kata(word star/microsoft word) 6-36 Kilobyte. Yang tidak dimuat akan dikembalikan jika disertai perangko balasan secukupnya

11 Laporan Utama

Sekian kali Orde Baru menggelar Pemilu, konon dipercaya tidak membawa perubahan apa-apa. Pemerintah disinyalir telah melakukan kecurangan-kecurangan secara sistematik terhadap Pemilu. Benarkah Pemilu di Indonesia hanya dijadikan alat legitimasi untuk kekuasaan?

68 Insan Wawasan

REPRO KOMPAS

Wimar Witoelar tokoh tambun yang mencuat lewat "Perspektif" ini bicara tentang ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia, katanya, dijalankan dengan kaidah-kaidah kekuasaan. Sementara logika ekonomi tidak berlaku. Bagaimana pula pendapatnya tentang peranan kelas menengah di Indonesia?

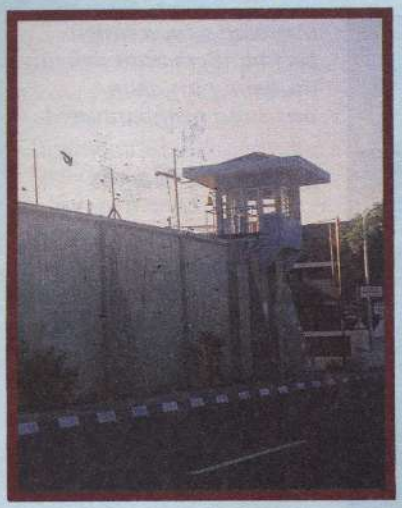

Humaniora 38

Stigma dan tuduhan yang ditujukan pada narapidana wanita, begitu memojokkan mereka dalam kubangan hitam tiada batas. Kenapa mereka masuk penjara? Bagaimana penilaian lingkungan terhadapnya?

03 DAPUR
06 KONTAK
09 PANGGUNG
10 ISU
26 TEMU WICARA
30 ARTIKEL TEMA
37 OPINI
41 JEPRET
45 LINGKUNGAN
48 LINTAS
49 KESEHATAN
51 IPTEK
58 TIMBANGAN PUSTAKA
62 LAPORAN DAERAH
66 ARTKEL LEPAS
74 KOLOM
80 JERAT
82 ANEKDOT

Kampus 53

Banyak penelitian ilmiah diragukan obyektivitasnya. Penelitian ilmiah ternyata tidak hanya pengabdian, ia "ditumpangi" oleh motif-motif bisnis. Bagaimana kualitas penelitian di UGM?

Budaya 76

Gamelan memasuki babak baru. Gamelan go internasional. Ia kawin dengan unsur-unsur musik dunia. Bagaimana wujud "anak baru" yang akan lahir dari proses perkawinan ini?

Kulit muka: Agung Arif Budiman

ACHMAD KRISNA

Dubbing! Plesetan gaya Yogya, atau...
bukan, bukan kegagalan pendidikan Bahasa Inggris di sekolah formal

Tentang Informasi Demokratisasi di Kalangan Mahasiswa

Salam hormat,

Senang rasanya bisa berkomunikasi lewat surat dengan Anda (para pengasuh majalah UGM). Sebelumnya saya mengucapkan: Selamat tahun baru 1995. Saya adalah mahasiswa Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Saya sering membaca buku, majalah ataupun surat kabar di perpustakaan kampus Untan. Dan pada waktu itu setelah saya perhatikan/simak, majalah UGM, memiliki info-info yang menarik, apalagi masalah seputar demokratisasi di kalangan mahasiswa tersusun dengan rapi dan tidak terlalu berlebihan. Juga dilengkapi iklan-iklan.

Sebenarnya, kami juga memiliki majalah kampus, namun melihat Mimbar Untan yang terbit 1x2 bulan tersebut, kami masih berkeinginan banyak mengikuti majalah UGM yang dikenal baik mutunya tersebut. Tetapi ada penyesalan bagi seluruh staf Mimbar Untan (majalah kampus kami), setelah diterbitkan; dan dibaca sedikit; lalu mahasiswa menjadikan Mimbar Untan jadi alas duduk ataupun dibuang begitu saja. Oleh karena itu kami mengharapkan juga sedikit saran tentang pengelolaan majalah kampus yang baik. Anda dapat berkontak surat dengan Mimbar Untan khususnya dengan para krunya pada alamat di bawah ini: Rektorat Lama, Jalan Daya Nasional, Univ. Tanjung Pura, Pontianak, Kalimantan Barat. Saya sendiri bukan staf redaksi namun sebagai seorang pembaca Mimbar Untan ingin turut serta memajukan majalah kampus Univ. Tanjung Pura sejajar dengan universitas negeri lainnya di Pulau Jawa. Sebelum dan sesudahnya, saya mengucapkan terima kasih.

Isaac Rudie,
Fakultas Teknik
Univ. Tanjung Pura
PO Box 1049
Pontianak Kalbar

Redaksi mengucapkan banyak terima kasih atas surat dan perhatian Anda yang begitu besar terhadap BALAIRUNG. Hanya perlu diketahui bahwa surat Anda baru sampai di redaksi satu tahun terhitung dari tanggal pengiriman, kami tidak tahu surat tersebut singgah dimana. Kemudian mengenai pembinaan pers mahasiswa yang ada di UNTAN, kami yakin Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia dengan kejelian mata hatinya akan selalu menatap semua tanpa kecuali. Berkaitan dengan itu kami pun akan berusaha membantu-red

Simpati Saya

Bersama surat ini saya menyampaikan rasa simpati kepada majalah BALAIRUNG yang diterbitkan oleh rekan-rekan mahasiswa di Yogyakarta.

Saat pertama kali membaca majalah BALAIRUNG edisi terbaru (kira-kira tahun 1995), saya merasakan ada daya tarik tersendiri dalam penyampaian berita maupun artikel di media BALAIRUNG.

Di Menado saya merasa kesulitan untuk mendapatkan majalah BALAIRUNG. Untuk lebih memperdalam wawasan saya tetang perkembangan rekan-rekan mahasiswa di Yogyakarta, khususnya perkembangan demokrasi, saya mohon redaksi untuk mengirimkan edisi terbarunya, atau bagaimana caranya berlangganan? Demikian terima kasih.

Jhonny Sitorus
FISIP Univ. Sam RatuLangi
Jl. Kampus Unsrat - Bahu
Manado 95115

Surat senada kami terima dari: Moh. Thohir Munir HM (Majalah Qalam Pon. Pes Al Amien Prenduan Sumenep Madura 69465), Rino Indartono(Jl Dworowati I/3 Purwodadi Grobogan Jawa Tengah), Bambang Surarjono (P & O Holiday PTY Ltd 160 Susex Street Sidney NSW 2000 Australia) -red

Selamat

Atas nama pimpinan UGM kami mengucapkan

Ruang ini disediakan bagi pembaca yang ingin mengungkapkan permasalahannya, terutama tentang dunia kemahasiswaan, kampus, terutama kampus UGM. Silahkan kirim surat Anda ke redaksi: Bulaksumur B-21 Yogyakarta Telp (0274)901703

selamat dan ikut bangga berkenaan dengan terpilihnya Majalah BALAIRUNG UGM sebagai Juara Pertama penerbitan majalah Kampus oleh Direktorat Kemahasiswaan Ditjen Dikti Depdikbud.

Harapan kami semoga predikat juara tersebut dapat lebih memacu dalam mengelola majalah mahasiswa kampus UGM untuk dapat meningkatkan prestasi yang telah ada setidaknya untuk mempertahankan.

Sekali lagi kami ucapkan selamat, semoga Allah SWT. senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Rektor,
Sukanto Reksohadiprodjo

Saya belum terima BALAIRUNG

Dengan hormat,

Dengan ini saya melayangkan surat kepada redaksi BALAIRUNG untuk menanyakan perihal kehidupan majalah ini. Saya pertama kali menerima BALAIRUNG edisi 22/TH.IX/1995 pada akhir Desember 1995 yang lalu. Kemudian saya mengirimkan uang sejumlah Rp 10.000,00 kepada redaksi untuk berlangganan 4 nomer berikutnya (tiap edisi Rp 2.500,00 bukan?) dengan melalui pos wesel bernomer resi 01/0004373 tertanggal 9 Januari 1996. Namun hingga hari ini (8 Maret 1996) saya belum menerima BALAIRUNG edisi berikutnya, ataukah memang belum diterbitkan? Saya sendiri juga merasa belum jelas, apakah BALAIRUNG ini terbit tiap bulan, dwi bulanan, tri wulanan atau catur wulanan?

Terima kasih atas perhatian redaksi. Semoga pers mahasiswa tetap jaya dengan hunusan penanya dalam berfikir kritis dan berfikir Merdeka!

Hidup Pers Mahasiswa

D. Santoso P.
Surabaya

Surat senada kami terima dari: Kaboel Hadiwasito, S.E. (Jl. Apel 6 - C 49 Kompleks Arco Sawangan 16511), Ichwan Prasetyo (Asrama Mahasiswa UNS Jl Kartika III, Ngoresan, Jebres Solo 57126).

Politik Praktis

Saya salut dengan penampilan BALAIRUNG edisi 21 dan 22 yang telah berani mengangkat hal-hal yang berbau politik praktis. Saya mengharap adanya persahabatan yang erat antara BALAIRUNG dengan MM Pijar Pendidikan FKIP UNEJ.

Fauzan
PU Pijar Pendidikan
FKIP UNEJ
Jl Kalimantan I/3
Jember 68121

BADAN PENERBIT PERS MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA (BPPM UGM) Ketua Umum: Timbul Sunoto Sekretaris Umum: Rommy Fibri H Bendahara Umum: Andy Marhaendra setiawan Ketua Departemen Pemberdayaan Penerbitan Fakultas: Margiyono Ketua Departemen Penerbitan Surat Kabar: Wahyuana Ketua Departemen Penerbitan Majalah: Sunarto Cipto Harjono

daya gagas dunia

COMPUTER GRAPHIC DESIGN & PRESENTATION

GRAPHIC DESIGN
CORPORATE IDENTITY
COMPANY PROFILE
ANNUAL REPORT
BROCHURE-LEAFLET
PACKAGING DESIGN
ADVERTISING & PROMOTION
MULTIMEDIA
COMPUTER ANNIMATION
INTERNET SERVICE
ARCHITECTURE PRESENTATION
AUTOCAD & 3D STUDIO

JETIS PASIRAMAN NO.5 YOGYAKARTA
PHONE
584375 / 0811293973

Lomba Karya Tulis

PT SEMEN CIBINONG

Tema:
25 Tahun Peran Serta PT Semen Cibinong Dalam Pembangunan Nasional

Peserta:
Umum; dapat mengirimkan lebih dari satu tulisan.

Ketentuan Tulisan:
Tulisan yang pernah dimuat di media ber-SIUPP akan bernilai dibanding dengan naskah yang belum dipublikasikan. Judul dan isinya bebas tapi menyangkut **peran PT Semen Cibinong dalam pembangunan nasional**. Tulisan berisi data dan analisa. Penyajiannya populer. Panjangnya kurang lebih 7.000 karakter atau lima halaman ketik komputer dua spasi. Bahan-bahan yang diperlukan dapat diperoleh di Humas PT Semen Cibinong Telp.(021) 8231260 Pes.6102/3 Faks.(021) 8231254 - 8230011.

Waktu:
Naskah dikirimkan disertai fotokopi KTP/SIM ke Humas PT Semen Cibinong, Ds. Narogong Cileungsi, PO Box 25 Bogor 16820 sampai pada 25 Juli 1996. Pada sampul kiri atas harap dicantumkan:
"Lomba Karya Tulis Semen Cibinong"

Hadiah:
- Satu pemenang I : Rp 3.000.000,00 + Piagan Penghargaan
- Satu pemenang II : Rp 2.500.000,00+ Piagam Penghargaan
- Satu pemenang III : Rp 2.000.000,00 +Piagam Penghargaan
- Pemenang harapan : Rp Rp 1.000.000,00 + Piagam Penghargaan

Pemenang I s/d III diundang ke Jakarta menjadi tamu PT Semen Cibinong saat penerimaan hadiah.

Catatan:
Informasi lebih lengkap bisa diperoleh pada Humas PT Semen Cibinong.

WISUDA

selamat atas diwisudanya:

Teguh Kresno Utomo, S.IP
mantan Pemimpin Redaksi Majalah BALAIRUNG

Misrin Anar Achmad, S.Si.
mantan reporter Majalah BALAIRUNG

Anthony Dio Martin, S.Psi
mantan Ka.Litbang Majalah BALAIRUNG

beserta
wisudawan-wisudawati UGM

KELUARGA BESAR BADAN PENERBIT PERS MAHASISWA
UNIVERSITAS GADJAH MADA

Manjah

Afnan Malay,S.H.
Mantan staf redaksi Majalah BALAIRUNG
dengan Fadjarini Sulistyawati, S.IP.

Arief Santosa
mantan reporter Majalah BALAIRUNG
dengan
Dewi Ratna Nengati, S.Pd.

Didik Supriyanto, S.IP.
mantan Ketua Umum BPPM UGM/PU Bulaksumur
dengan
Solekha

KELUARGA BESAR BPPM UGM

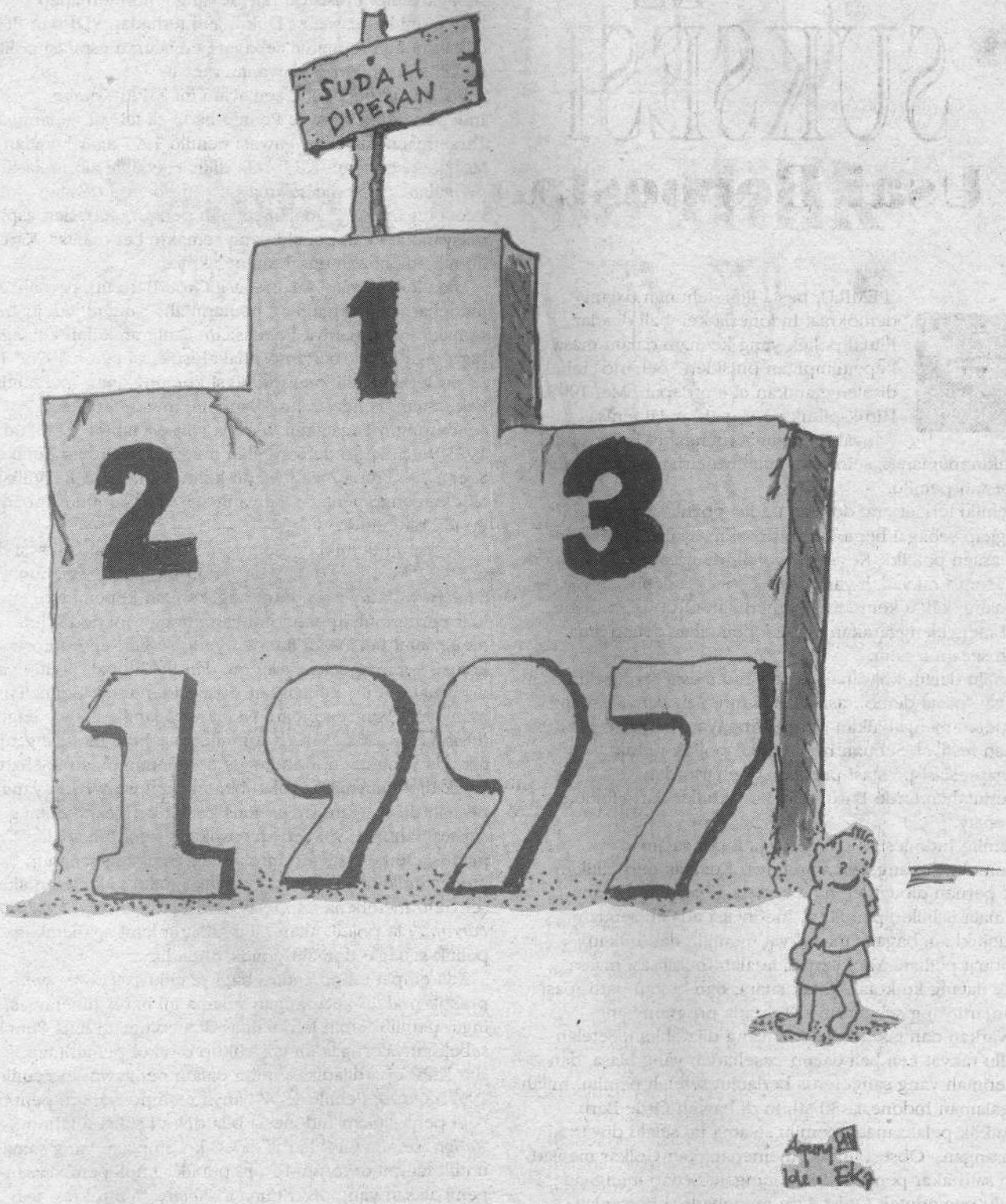
SUDAH DIPESAN
1
2
3
1997

Menunggu SUKSESI Usai Berpesta

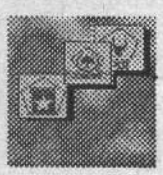

PEMILU, pesta lima tahunan dalam demokrasi Indonesia kembali digelar. Ritual politik yang keenam dalam masa kepemimpinan presiden Soeharto ini akan diselenggarakan tahun depan, Mei 1997. Hiruk-pikuk persiapan mulai terasa. Banyak pengamat mengakui hawa politik semakin memanas, seiring dimulainya tarian politik ketiga kontestan pemilu.

Pemilu terkait erat dengan tradisi politik demokrasi. Ia dianggap sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam kekuasaan politik. Konsepsi politik demokrasi dibangun di atas asumsi rakyatlah yang mempunyai kedaulatan. Bisa dipahami, kalau kemudian pemerintah Orde Baru begitu getol menyelenggarakan prosesi pemilihan setiap lima tahun secara teratur.

Pemilu dalam khasanah politik Indonesia sering dimaknai sebagai "pesta demokrasi". Lantaran itulah banyak orang kemudian mengabaikan arti pentingnya. Hanya sebatas sebuah festival. Sebuah momentum politik untuk mengapresiasi prestasi presiden Soeharto dan pemerintahan Orde Baru, tulis Jim Schiller dari Flinders University.

Pemilu Indonesia belum menjadi pengalaman berdemokrasi yang sesungguhnya. Kualitas perpolitikan tidak pernah dibuat lebih baik melalui pemilu. Dalam kacamata Schiller, pemilu di Indonesia adalah sebuah pertunjukkan, bagaimana rakyat memilih dan bukan membuat pilihan. Yang terjadi adalah mobilisasi massa untuk datang ke kotak-kotak suara, dan bukan partisipasi dalam arti yang sebenarnya. Tak ada program yang ditawarkan dan tak ada pilihan yang dijatuhkan. Setelah pemilu rakyat kembali dalam keseharian yang biasa, dan pemerintah yang sama terus berlanjut setelah pemilu. Inilah pengalaman Indonesia 30 tahun di bawah Orde Baru.

Praktik pelaksanaan pemilu selama ini selalu diwarnai kecurangan. Obsesi untuk memenangkan Golkar menjadi salah satu akar penyebab kecurangan. Setiap menghadapi pemilu pemerintah Orde Baru menghadapi persoalan bagaimana menjamin partai pemerintah, Golkar, keluar sebagai pemenang. Pemilu di Indonesia selalu diwarnai represi kekuasaan. Pemerintah menjadi pusat yang mengendalikan seluruh mekanisme politik ysng ada. Pengorganisasian aspirasi politik dari infrastruktur politik dianggap di luar sistem, dan lebih tragis dicap subversif.

Munculnya perlawanan pun tak dapat dielakkan. Kasus "kampanye prematur" yang terjadi di Yogyakarta dipahami sebagai simbol resistesi rakyat yang jenuh terhadap hegemoni kekuasaan. Dukungan terhadap PDI dan PPP dilihat bukan terutama sebagai penyaluran aspirasi politik, melainkan simbol perlawanan rakyat.

Dalam *setting* politik semacam ini KIPP: Komite Independen Pengawas Pemilu hadir di tengah gelanggang. Targetnya adalah mengawasi pemilu 1997 agar berjalan tanpa kecurangan. KIPP bisa dilihat sebagai akumulasi pengalaman pemilu selama ini yang penuh dengan kecurangan. KIPP adalah sebuah pengorganisasian aspirasi masyarakat akan pemilu yang semakin berkualitas. Karena itu tak ada alasan untuk menolaknya.

Lima kali pemilu dalam masa Orde Baru tak pernah menghasilkan pergantian pemerintah. Yang terjadi justru semakin menguatnya kekuasaan. Lantaran itulah kita agak ragu-ragu untuk bertanya adakah suksesi tahun 1998? Para pakar terlihat sulit memprediksi kemungkinan pergantian kekuasaan. Pengalaman selama ini membuat kita cenderung mengatakan tak ada suksesi tahun 1998. Tahun 1978 Benedict Anderson telah menulis "Hari-hari Terakhir Soeharto". Empat belas tahun kemudian, 1992, R. William Liddle mengomentari hal yang senada. Namun semuanya itu terbukti keliru.

Meskipun demikian, optimisme bagi sebuah suksesi di tahun 1998 harus dibangun. *Pertama,* masa 30 tahun adalah waktu yang cukup bagi sebuah kepemimpinan. Di luar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, periode ini mengalami persoalan internal yang serius seperti korupsi, kolusi, ketimpangan ekonomi, dan kehidupan politik yang diwarnai represi kekuasaan. Suksesi tentu tak otomatis menyelesaikan semua itu. Namun itu langkah awal bagi reformasi politik. *Kedua,* argumentasi yang menganggap tak ada yang mampu mengganti kepemimpinan Soeharto layak dipertanyakan. Inilah bentuk kultus individu yang pernah ditakutkan Amien Rais ketika berbicara tentang suksesi tahun 1993. Seolah sosok presiden ini adalah manusia terbaik negeri ini dan tak ada yang sanggup menggantikannya. *Ketiga,* lamanya suatu kekuasaan akan semakin membenarkan tesis Lord Acton, *Power tends to corrupt.* Elit politik akan memandang lembaga-lembaga politik sebagai domain politik pribadinya.

Ada empat rekomendasi bagi pemilu 1997. *Pertama,* praktik-praktik kecurangan selama ini harus diberantas, jika ingin pemilu lebih berkualitas dibandingkan lima Pemilu sebelumnya. Tugas ini tak cukup dipikul pemerintah. Di sini KIPP bisa dijadikan mitra dalam pengawasan Pemilu 1997. *Kedua,* Pemilu 1997 hanya mempunyai arti penting bagi perpolitikan Indonesia bila diikuti suksesi tahun 1998. *Ketiga,* semua OPP harus diberi kesempatan yang sama untuk tampil di forum-forum publik, tanpa pembatasan-pembatasan yang diskriminatif. *Keempat,* birokrasi dan ABRI tidak menjadi perpanjangan tangan salah satu OPP.***

F. Surdiasis

PEMILU

Sebuah Pesta Milik 'TUAN'

Pesta merupakan konsep kenduri para tuan. Ada pesta cocktail. Pesta dinner. Pesta orgy. Dan Pesta demokrasi. Suatu pesta pada lazimnya memang ramai. Tak semua orang boleh ikut. Itulah sebabnya, kenapa rakyat bukan berarti tuan. Karena mereka tak pernah punya konsep tentang pesta. Makanya, apalah arti sebuah pesta buat mereka.

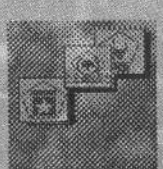

GENDERANG sebuah pesta bernama Pemilu sudah jauh hari dikumandangkan. Indonesia di tahun 1996, merupakan tahun intro menyambut hari penyoblosan nasionalnya yang ke-enam di tahun 1997, pada bulan Mei mendatang. Berbagai ketegangan dan keriuhan politik sudah terasa mewarnai konstelasi politik secara makro. Kegaduhan ini menjadi mirip penyambutan sebuah pesta perkawinan pada galibnya. Pihak Tuan yang punya gawe jauh hari sudah memasang "janur kuning" di mana-mana. Sanak famili baik yang jauh maupun dekat mulai dirangkul. strategi mulai dirancang. Dan masyarakat diundang hadir pada hari H-nya untuk sekedar turut meramaikan sebagai persaksian - legitimasi formal- dari sebuah pesta kemenangan yang sudah terbaca sebelumnya.

Melihat proses penggelindingan demokrasi melalui momen pemilu di Indonesia, selalu memunculkan satu fenomena yang unik. Setiap kali menjelang pemilu, pihak kekuasaan sebagai pemilik hajatan besar ini tiba-

Kelik S.

Kampanye salah satu OPP

Benarkah pesta ini milik mereka?

tiba saja dilanda sejenis psiko-politik "kurang percaya diri" yang menciptakan ketegangan-ketegangan. Upaya konsolidasi kekuasaaan menjelang pemilu menjadi nampak berlebihan. Hal ini sangat terlihat pada fenomena Golkar sebagai partai personifikasi kekuasaan. Lihat! Bagaimana lincah dan tak kenal lelahnya bung Harmoko mengadakan "temu kader" yang diback up langsung oleh media. Penolakan inisiatif PPP untuk merevisi undang-undang Pemilu oleh Golkar. Pengawetan konflik internal di tubuh PDI Jatim. Statemen R. Hartono yang menyatakan bahwa ABRI adalah kader Golkar. Juga betapa reaksioner dan *childish*-nya pemerintah dalam menghadapi kemunculan KIPP.

William Liddle, melihat gejala adanya ketegangan ini sebagai turunan dari sikap inkonsistensi kekuasaan sendiri terhadap apa yang dikatakan dan apa yang dilakukannya; antara tekad untuk membangun Demokrasi Pancasila dan persepsi umum tentang berbagai kecurangan yang dirancang sendiri untuk menjamin kemenangan status quo dan kekalahan di pihak oposisi. Sehingga pemilu di Indonesia selalu dipercaya tidak akan membawa perubahan-perubahan substansial pada tataran demokrasi nasional.

Dari hasil reportase BALAIRUNG dengan banyak narasumber, sikap pesimistik terhadap pemilu seolah-olah menjadi warna dasar pandangan-pandangan mereka. Makna pemilu sebagai pesta demokrasi rakyat, dalam pandangan mereka, perlu penafsiran ulang. Marsilam Simanjuntak, salah satu nara sumber yang ditemui BALAIRUNG bahkan menamakan pemilu Indonesia sebagai "pemilu seolah-olah". Hal ini menandakan bahwa sosok demokrasi di Indonesia tetap menjadi sosok yang masih samar dan selalu menggoda.

Lebih lanjut Marsilam Simanjutak memaparkan, bahwa pemilu saat ini tidak mungkin mencerminkan kedaulatan rakyat seutuhnya. Pun demikian juga tidak membawa perubahan-perubahan yang dikehendaki oleh rakyat. "Hal ini jelas terlihat bagaimana telah terjadi pengebirian dalam undang-undang pemilu, paket undang-undang yang membatasi kepartaian, anggota DPR-MPR yang diangkat, mekanisme litsus yang diberlakukan terhadap wakil rakyat. Makanya, pemilu an sich tidak membawa perubahan apa-apa. Sebab pemilu saat ini menyelenggarakan suatu sistem politik yang tidak memungkinkan adanya perubahan. Pemilu hanya menjalankan kemungkinan yang sudah disediakan oleh sistem yang sudah dimapankan. Inilah "pemilu seolah-olah," ungkap salah seorang pencetus Golput di Indonesia yang sekarang bergabung bersama KIPP ini.

Berangkat dari ketidakpercayaan pada sistem politik itulah, Marsilam memilih sikap politik yang tegas, yakni Golput. "Kalau saya tidak percaya pada sesuatu, saya tidak akan terlibat di dalamnya. Ini merupakan pilihan dan pertanggungjawaban intelektual. Saya tahu, percuma kalau ikut sistem. Saya tidak mau mengotori catatan hidup saya dengan terlibat terlalu banyak pada kepercumaan yang sudah bisa diramalkan sebelumnya."

Lalu dalam konteks perbincangan yang lebih konstruktif, untuk perbaikan Pemilu yang tidak beres ini, menurut Marsilam, sistemlah yang harus didandani. "Anda harus lihat, pemilu itu merupakan sistem. Pemilu itu hasil dari sistem. Setiap sistem membentuk cara Pemilu tersebut. Bukan Pemilu yang menghasilkan sistem baru, " tegasnya. "Pemilu itu diadakan sebagai operasionalisasi dari sistem politik, untuk menghidupkan sistem tersebut. Jadi, sistemlah yang harus diperbaiki pertama kali."

Memperbincangkan sistem Pemilu,

setidaknya mempermasalahkan dua pengertian. Pertama, sistem Pemilu yang digunakan apakah itu sistem distrik atau proporsional. Indonesia yang selama ini menggunakan sistem proporsional, seringkali memancing perdebatan menarik tentang idealisasi sistem. LIPI yang ditugaskan secara khusus oleh presiden untuk meneliti sistem mana yang paling cocok diterapkan di Indonesia, ketika dikejar BALAIRUNG mengaku belum berani membeberkan penelitian penting itu.

Pengertian kedua, sistem perundang-undangan yang menjadi salah satu faktor keutuhan kedaulatan rakyat mengalami keterkepingan (demokrasi). Yakni, lima paket undang-undang politik yang kerap dituding sebagai biang keladi pembusukkan proses demokratisasi di Indonesia. Ingat! Isi undang-undang tersebut di antaranya mengatur tentang pembonsaian partai-partai politik di Indonesia dan secara khusus juga mengatur pelaksanaan Pemilu.

Sedikit berbeda dengan Marsilam Simanjutak, Ismail Hasan Metareum, yang ditemui BALAIRUNG di kantor DPP PPP , memaknai Pemilu dalam pengertian konstitusional. Ia mengatakan, "Pemilu adalah salah satu cara melaksanakan UUD 45 dalam soal demokrasi. Kita tahu bahwa salah satu pasal UUD 45 menyatakan bahwa kedaulatan negara di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Jadi, karena ada kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh MPR, maka Pemilu diadakan. Jadi Pemilu itu berarti menyaring pendapat rakyat untuk dibawa ke MPR oleh para wakil rakyat. Kalau demikian, Pemilu itu untuk menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat,"

Menjawab pertanyaan mendasar (teoritik) tentang apakah pelaksanaan Pemilu sekarang ini dilangsungkan di atas prinsip yang dikatakan Buya Ismail, ia menarik pertanyaan "bermasalah" ini pada tataran teknis. "Prinsip-prinsip pelaksanaan sudah ditetapkan. Namun, dalam pelaksanaannya banyak yang salah dan keliru. Saya selalu menyebutkan bahwa kita ingin tujuan Pemilu betul-betul tercapai, yakni benar-benar menampung hati nurani rakyat. Berarti tidak boleh ada penyimpangan dalam pelaksanaannya," katanya," Misalnya

Pemilu seolah-olah adalah Pemilu yang hanya menjalankan kemungkinan yang sudah disediakan oleh sistem yang telah dimapankan

Repro Swadesi

Drs. Surjadi

penyelewengan suara, kita tidak tahu persis bagaimana kenyataan sebenarnya di masyarakat. Suara-suara yang disalurkn itu suara bikinan atau suara orang lain. Karena itulah, yang sangat penting dipersoalkan adalah soal kejujuran dan keadilan (Jurdil)."

Menyoal masalah Jurdil, Buya Ismail membantah bila Jurdil yang dijadikan kampanye moral PPP ini sudah dimasukkan dalam Luber. Karena tujuan Luber itu agar Pemilu tidak dipengaruhi dan dipaksa-paksa, ia harus bebas. Jadi, pelaksanaannya secara langsung, rahasia, tidak boleh diketahui orang lain. Itu asas untuk pemilih yang harus dihormati semua pihak, yaitu Luber. "Kemudian setelah pemilihan itu bagaimana, inilah yang jadi masalah. Pejabat-pejabat itu mengatakan bahwa Jurdil sudah masuk dalam Luber, seolah-olah kita tidak perlu lagi memikirkan masalah itu," tandasnya.

Banyaknya kecurangan yang terjadi dalam Pemilu 1992 bukannya tidak didiamkan oleh PPP. Buya Ismail sendiri menjelaskan bahwa PPP protes, mempersoalkan kepada semua pihak, baik ke Depdagri, Panwaslakpus, Pangab. Namun, Buya mensinyalir laporan itu tidak pernah ditanggapi. Bahkan protes PPP yang lebih keras, dengan cara menolak penandatanganan Berita Acara Pemilu (BAP) 1978 pun tidak ada artinya.

Sementara Aberson Marle Sihaloho, anggota partai kepala Banteng dari kelompok garis keras ini, definisi Pemilu bahkan dipertanyakan ulang. Baginya ada semacam ketimpangtindihan yang telah membenangkusut tentang pengertian penjelmaan kedaulatan rakyat.

Arti Pemilu bagi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yang berdasarkan UUD 45 sampai sekarang, menurutnya, belum pernah dijelaskan atau disosialisasikan. Mengapa Pemilu harus diselenggarakan lima tahun sekali? Sedangkan dalam UUD 45, tidak ada kata-kata Pemilu. Kenapa Pemilu dilaksanakan? Sedangkan negara kita ini adalah negara hukum (rechtstaat) dengan sistem konstitusi UUD 45 sebagai hukum tertinggi. Di dalam sistem tertinggi tersebut secara eksplisit tidak ada kata-kata Pemilu ini karena konsekwensi amanat pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa kedulatan di tangan rakyat yang dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Dalam penjelasannya MPR adalah penyelenggara negara yang tertinggi sebagai penjelmaan rakyat yang memegang kedaulatan negara. Dan maksud MPR sebagai penjelmaan rakyat adalah bahwa MPR harus dibentuk oleh rakyat. Sedang cara penjelmaan rakyat menjadi MPR melalui mekanisme Pemilu.

Dalam praktiknya selama ini, kenyataannya yang dimaksud wakil rakyat adalah representasi orsospol yang dipilih rakyat secara gelap. Artinya, rakyat memilih wakilnya seperti memilih kucing dalam karung yang tidak jelas siapa mereka. Sedangkan pasal 2 ayat 3 mengamanatkan segala keputusan MPR diputuskan suara terbanyak. "Lalu manakah yang disebut Demokrasi

Pancasila itu? Apakah musyawarah untuk mufakat yang pada praktiknya mufakat dulu baru musyawarah.," tanyanya, "Padahal, pasal 3 ayat 2 secara eksplisit mengamanatkan putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak. Jadi, bagi saya, yang dimaksud founding fathers kita sangat jelas bahwa yang dimaksudkan MPR adalah wakil rakyat secara perorangan, bukan sebagai wakil organisasi politik."

Berkaitan dengan pemilihan presiden selama Orde Baru ini, Aberson M. Sihaloho mengatakan. bahwa presiden yang selama ini menjabat sebenarnya tidak pernah menjadi presiden seluruh rakyat Indonesia. "Tetapi, ia pimpinan dari Golkar, PPP, PDI, dan ABRI. Realitas politik ini sudah menjadi satu konsekwensi sebagai turunan dari mekanisme pemilihan presiden melalui fraksi, dan bukan melalui individu para wakil rakyat," katanya..

Sebuah Agenda Pengawetan Status quo Bernama Pemilu

Mempertanyakan Pemilu dalam konteks diskursus perpolitikan Indonesia, agaknya memang cukup penting. Sistem politik Indonesia dalam wacana ini menemukan pengertiannya sebagai skenario besar yang mensponsori motif-motif elit kekuasaan untuk mengelola kehidupan bernegara. Tak pelak lagi proses kelahiran kebijakan-kebijakan kekuasaan pada tataran operasional, tak lain merupakan derivasi kepentingan yang tersubsistem oleh politik makro. Motif politis ini bisa jadi demi kepentingan untuk mengawetkan status quo.

Bila membongkar tata-peraturan penyelenggaraan pemilu, kita akan menemukan variabel kuat yang membuktikan tesis di atas. Coba kita tengok UU Pemilu No. 15/1969 hingga UU Pemilu No. 1/1985. Undang-undang tersebut menjadi derivasi dari dominasi kekuasaan yang mencoba menyelamatkan kepentingan politiknya, yang dirancang secara sistematis-piramidal dari presiden sampai lurah.

Sebagai turunan dari dominasi aparat birokrasi pemerintah ini, berakibat proses pemilu berkali-kali lepas dari kontrol rakyat maupun

> Pemilu di masa Orde Baru memang dirancang untuk kelangsungan Orde Baru. Kelangsungan Orde Baru dalam konteks ini, bermakna kelangsungan Pancasila dan UUD 1945. Dalam tataran pragmatis

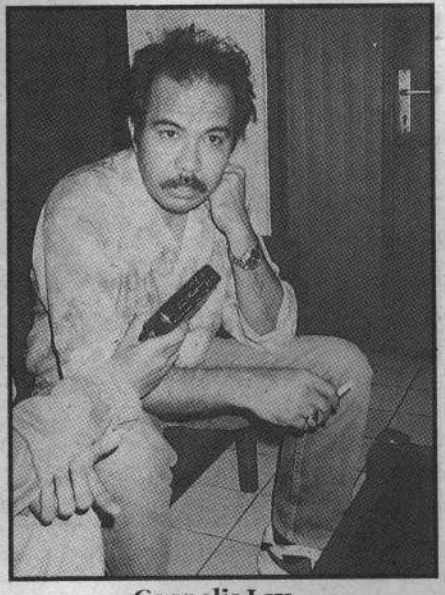

Cornelis Lay

parpol. PPP dan PDI kemudian menuduh banyak manipulasi yang dilakukan oleh aparat birokrasi yang notabene adalah simpatisan Golkar. Karena itu, muncul berbagai desakan untuk melakukan kontrol dalam proses pemilu. Maka pemerintah melalui UU Pemilu No. 1/1985 membentuk lembaga PANWASLAK (Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu), yang pada kenyataannya PANWASLAK ini pun didominasi oleh aparat pemerintahan. Sama saja.

Di sini, nampak bagaimana posisi rakyat dan OPP berada pada wilayah pinggiran. Belum lagi dengan masih diberlakukannya mekanisme Litsus bagi para bakal calon legislatif, yang pada dasarnya tidak diatur dalam UU Pemilu. Dalam konteks ini ditunjukkan bahwa posisi OPP tidaklah mandiri sepenuhnya. Mereka hanya punya hak mengajukan calon, tetapi akhirnya yang menentukan tetap pemerintah dan LPU.

Sebuah pertanyaan substansial barangkali bisa dirumuskan sebagai berikut; apakah pelaksanaan pemilu selama Orde Baru ini benar-benar sebagai sarana rakyat untuk mengaspirasikan politiknya?

Cornelis LAY, pengamat politik Universitas Gadjah Mada, memberi jawaban, "Pemilu di masa Orde Baru memang dirancang untuk kelangsungan Orde Baru. Kelangsungan Orde Baru dalam konteks ini bermakna kelangsungan Pancasila dan UUD 1945. Dalam tataran ideologis adalah negara, yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tapi bisa juga dalam tataran pragmatis, yaitu untuk kelangsungan pembangunan nasional yang diidentikkan Orde Baru. Di sisi lain, ini bisa direduksi: demi kelangsungan rezim. Kita tidak tahu mana yang sedang terjadi.. Sebab, variabel-variabel tersebut tumpang tindih bila dikaitkan dengan konteks Pemilu."

Lebih lanjut Cornelis Lay memaparkan bahwa kalau pada tataran ideologis, Pemilu harus dibaca sebagai sarana legitimasi status quo, yakni rezim, maka yang menjadi tujuan utama Pemilu adalah legitimasi itu, yang kadang-kadang mengalahkan substansi pemilu sendiri, yakni demokrasi. Di situ, Pemilu menjadi bukan sarana demokrasi untuk rotasi kepemimpinan. Tapi secara spesifik memang didesain untuk kelangsungan sistem, baik secara ideologis maupun praktis.

"Jadi, saya kira hambatan besarnya di situ. Karena semua proses dan praktik Pemilu dimaksudkan untuk suatu kepentingan, sebagai konsekuensi logis dari desain besar sistem. Maka Pemilu bukan sekedar ada yang ingin menang, sekalipun dengan cara curang. Tetapi, memang sengaja didesain dan diproyeksikan untuk dan sebagai sistem legitimasi, " tandas dosen Fisipol UGM ini.

Mengikuti pandangan Cornelis Lay, agak sulit kita membayangkan akan adanya rotasi kekuasaan secara mulus dan perubahan-perubahan substansial

Sebab, kita seolah-olah melihat dua kutub yang sangat bersebrangan, yang memisahkan antara kemandekan (status quo) dan perubahan. Satu konsekuensi yang bisa ditebak, kontinuitas dalam perubahan menjadi mustahil karena semua proses yang mengarah pada perubahan bakal dipangkas Dan ini memang karakter paling khas dari suatu kekuasaan di kolong jagat mana pun.

Mengagendakan Perubahan

Di tengah realitas politik yang mampat ini, upaya pensiasatan perubahan yang lebih mendekatkan pada orde politik yang demokratis, agaknya menjadi satu terobosan yang diperlukan. Dalam konteks ini, pihak pengharap perubahan tidak bisa bersikap menunggu bola. Melainkan menjemput bola.

Menanggapi upaya pensiasatan politis untuk perubahan seperti ini pun, Cornelis Lay, tetap pesimistik. "Secara struktural desain besar itu tidak ada dalam ruang masyarakat. Bagaimana pensiasatan dilakukan bila pintu masuk ke dalam ruang itu nggak ada. Ya, kalau sudah cukup banyak orang peduli, masyarakat terdidik seperti dengan membikin KIPP, misalnya. Kemudian kalau pengaruhnya masih terbatas, ya kita tidak bisa mengharap terlalu banyak. Kita masih membutuhkan waktu panjang. Sampai kalau sudah menjadi kelembagaan alternatif mungkin suatu waktu bisa akan disambut baik. Tapi tentu tak semudah itu, kecuali ada kapasitas masyarakat yang besar yang bisa memaksakan kekuasaan membubarkan undang-undang Pemilu misalnya.," paparnya.

Sementara itu, Prof. Dr. Ichlasul Amal, Direktur Pasca Sarjana UGM, lebih melihat pada faktor elit kekuasaan. "Kita melihat perubahan itu pada perubahan di tingkat elit. Tapi juga perubahan itu bisa dari produk elit yang sama yang mengeluarkan perubahan. Jadi keputusannya yang berubah. Nah, kalau kita melihat bahwa yang pertama tidak akan ada perubahan yang substansial sebagai akibat dari Pemilu, maka kita menjatuhkan harapan pada yang kedua. Namun kalau kita mengharap perubahan hanya dari Pemilu, sulit. Perubahan

Dalam Praktiknya selama ini, yang dimaksud wakil rakyat adalah representasi orsospol yang dipilih secara gelap. Artinya rakyat memilih wakilnya seperti memilih kucing dalam karung

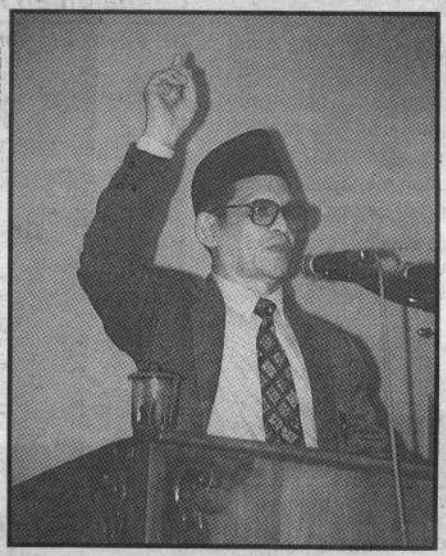

Krisna

Ismail Hasan M

bisa melalui pressure yang ada di masyarakat, antara lain ormas, LSM, opini luar negeri, atau gerakan mahasiswa. Hal itu setidaknya akan bisa mempengaruhi," ungkapnya.

Inisiatif perubahan yang dimotori oleh pihak kekuasaan, juga diharapkan oleh Soerjadi. Mantan ketua PDI ini mengembalikan permasalahan rumit ini ke pangkuan kekuasaan. Kepada BALAIRUNG Soerjadi memaparkan, "Pada dasarnya yang harus disadarkan pertama kali adalah pemerintah dan peranannya. Pemerintahan itu seharusnya dikembalikan pada rakyat. Dalam hal ini, langkah pertama dari rakyat adalah dalam bentuk OPP. Jadi, jangan jadikan OPP itu hanya sekedar embel-embel dalam Pemilu. Yang kedua, karena kekuasaan itu subyektif, maka jangan memberi hak dan wewenang terlalu banyak padanya. Kemudian, yang tak kalah penting, kekuatan sosial-politik sendiri., sebagai peserta Pemilu harus mampu berperan secara kualitatif. Jadi, bukan hanya sekedar pertandingan besar-besaran massa."

Pada akhirnya, memperbincangkan Pemilu memang menyimpulkan banyak catatan. Bagi pihak-pihak yang memandang Pemilu mengimplikasikan perubahan, agaknya mereka harus berpikir ulang. Pemaknaan Pemilu sebagai pesta demokrasi rakyat? Ah, nanti dulu. Dalam konteks teori, itu bisa jadi. Namun, bila pembikin hajatan besar ini memang diborong pemerintah, nyatalah bila pesta ini hanya milik tuan Pemerintah. Bukan pesta milik rakyat.. Rakyat hanyalah sehimpunan massa yang turut meramaikan pesta saja. Bila demikian, benarkah pemilu di Indonesia tengah mengalami demistivikasi makna? Wallahualam.

Prabowo
Agus, Mashudi, Asep M,
Widarso, Sutrisno

TURUT BERDUKA CITA
SEDALAM-DALAMNYA
ATAS MENINGGALNYA

REKAN-REKAN KAMI DALAM DEMONSTRASI
MENOLAK SK WALIKOTA UJUNGPANDANG NO.21/1996
TENTANG KENAIKAN TARIF ANGKUTAN UMUM
DI MAKASSAR 24 APRIL 1996

SEMOGA SEGALA AMALNYA DITERIMA DI SISI
TUHAN YANG MAHA ESA DAN SEMOGA
KELUARGA YANG DITINGGALKAN
DIBERI KEKUATAN LAHIR DAN BATIN

MAJALAH MAHASISWA BALAIRUNG
UNIVERSITAS GADJAH MADA

Antisipasi Globalisasi dan Era Pasar Bebas

Buku-buku pilihan yang harus dibaca para pengusaha agar tetap kompetitif

The Discipline of Market Leaders
(Disiplin Para Pemimpin Pasar)

Dr. Michael Treacy & Dr. Fred Wiersema

Membicarakan tentang disiplin yang amat Anda butuhkan untuk dapat tetap terus menjadi nomor satu, yaitu menjadi pemimpin pasar. Ini didasarkan pada riset dan praktek selama 5 tahun yang diselenggarakan bersama *CSC Index*, firma konsultan manajemen yang paling pesat berkembang di seluruh dunia.

GM 208 96.074 ; 15 x 23 cm
xvi + 264 hlm.; Rp 20.000,–

Menguak Jaringan Bisnis Cina di AsiaTenggara dan Timur

Gary Hamilton

Pertimbangan mengenai Cina dan Cina Perantauan kini mengarahkan pengambilan keputusan di Asia. Kendati demikian bukan Cina sebagai negara-bangsa yang menentukan. Kekuatan besar yang harus segera diantisipasi oleh dunia lebih dinamis dari itu dan berupa jaringan bisnis yang tak begitu saja kasat mata tetapi dahsyat, yang akan melontarkan Cina dan Etis Cina untuk mendominasi perekonomian dunia.

GM 208 96.053;15 x 23 cm
xii + 348; Rp 22.500,–

Menjadi Pemimpin Efektif : Dasar untuk Manajemen Partisipatif dan Keterlibatan Karyawan

Dr. Thomas Gordon

Mengajarkan Anda sebuah sistem kepemimpinan dan prosedur yang komprehensif, plus panduan untuk menentukan kapan dan bagaimana sistem itu harus digunakan. MPE telah disebut sebagai buku ajar terbaik tentang tehnik-tehnik kepemimpinan antar pribadi yang diperlukan agar manajemen partisipatif benar-benar berhasil.

GM 204 94.013; 14 x 21 cm
vi + 308 hlm.; Rp 16.000,–

Multicultural Management : New Skills for Global Success
(Manajemen Multibudaya)

Dr. Farid Elashmawi & Dr. Philip R. Harris

Memberi pandangan menyeluruh yang bagus tentang berbagai tantangan dalam arena interaksi bisnis global yang ketat yang Anda hadapi saat ini. Bagi Anda yang ingin menjadi manajer global yang sukses yang kelak akan berhadapan dengan berbagai hambatan akibat perbedaan budaya, buku ini akan memberi bantuan besar.

GM 208 96.039; 15 x 23 cm
xiii + 272 hlm.; Rp 16.000,–

Reflections For Managers
(Renungan Para Manajer)

Bruce Hyland & Merle Yost

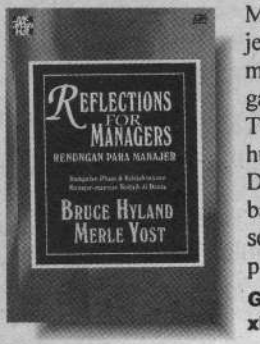

Mengetengahkan kebijaksanaan beberapa manajer dan eksekutif paling sukses di dunia, yang diminta memaparkan apa yang mereka anggap sebagai peraturan-peraturan manajemen paling efektif. Tanggapan mereka mencerminkan tata krama dan hubungan antarmanusia paling mendasar.
Disajikan secara humoris, lugas, dan membangkitkan semangat. Dijamin akan mengubah selamanya cara berpikir Anda, metode kepemimpinan Anda, dan cara hidup Anda.

GM 208 96.054; 14 x 21 cm
xii + 202 hlm. ; Rp 16.500,–

Reengineering The Corporation
(Rekayasa Ulang Perusahaan)

Dr. Michael Hammer & James Champy

Sebagai buku terlaris di seluruh dunia, buku ini menyodorkan seperangkat gagasan mengenai bagaimana perusahaan-perusahaan bisa merekayasa kembali cara kerja mereka.
Reengineering The Corporation membicarakan tentang cara berlomba, sedangkan *The Discipline of Market Leaders* tentang lomba mana yang harus Anda ikuti.

GM 208 95.143; 15 x 23 cm
xvi + 214 hlm; Rp 17.500,–

Info Buku Terbitan Gramedia Pustaka Utama

First Things First
(Dahulukan Yang Utama)

Stephen R. Covey; A.Roger Merrill; Rebecca R.Merrill

Memberdaya Anda untuk menentukan apa yang sungguh penting; meraih tujuan yang ber-manfaat, dan untuk menjalani sebuah kehidupan yang kaya, membahagiakan dan seimbang. Buku ini merupakan penuntun revolusioner untuk mengelola waktu Anda dengan cara menyeimbangkan hidup Anda.

GM 204 95.289; 15 x 23 cm
xxii + 450 hlm.; Rp 25.000,–

Megatrends Asia

Terbaru

John Naisbitt

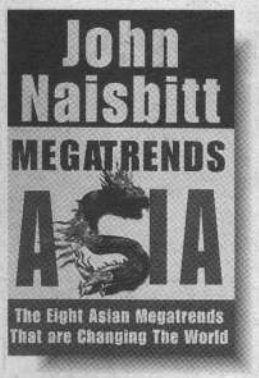

Memaparkan 8 pola besar yang terjadi di Asia, yang akan berdampak luar biasa terhadap dunia. Tak kurang 8 juta eksemplar karya John Naisbitt sekarang ini beredar di seluruh dunia. Penulis ini meramalkan bahwa Asia bakal mengubah dunia. Indonesia disebut-sebut sebagai salah satu pelaku penting di dalamnya.

15 x 23 cm; Rp 25.000,–

Lengkapilah kepustakaan Anda dengan buku-buku ini. Dan manfaatkan literatur ini untuk membina dan mengembangkan sumber daya manusia di perusahaan Anda.

- **Mencapai Sasaran Melalui Kerja Sama Tim**
  – *Manchester Open Learning* ..... Rp 11.000,–
- **Membuat Presentasi Yang Efektif**
  – *Manchester Open Learning* ..... Rp 8.000,–
- **Merencanakan dan Mengelola Perubahan ***
  – *Manchester Open Learning* ..... Rp 11.000,–
- **Mengendalikan Konflik dan Negosiasi**
  – *Manchester Open Learning* ..... Rp 11.000,–
- **Desain Pelatihan Efektif bagi Supervisor dan Manajemen Madya**
  – *Prof. Eng. Derek Lockwood* ..... Rp 8.500,–
- **Sukses Memotivasi: Jurus Jitu Meningkatkan Prestasi**
  – *Richard Denny* ..... Rp 9.000,–
- **Bukan Boss Tapi Pemimpin**
  – *John Adair* ..... Rp 9.000,–
- **Buku Manajemen Bagi Wanita: Siapkah Anda Mengelola ?**
  – *Gerarldine Brown & Chaterine Brady* ..... Rp 7.500,–
- **Menjual Dengan Empati: Teknik Terbaru Menjual dengan Jitu**
  – *Christopher C. Golls* ..... Rp 11.000,–
- **Pengambilan Keputusan yang Efektif: Petunjuk Praktis dan Komprehensif untuk Manajemen**
  – *Helga Drummond* ..... Rp 11.000,–
- **Seni Perang : Menang dalam Persaingan**
  – *Sun Tzu* ..... Rp 10.000,–
- **Sukses Menjual : Jurus Jitu Merebut Pasar**
  – *Richard Denny* ..... Rp 9.000,–
- **Meretas Belenggu Kegagalan dan Meraih Sukses Dalam Penjualan**
  – *Frank Bettger* ..... Rp 7.500,–
- **36 Kesalahan Terbesar Para Penjual dan Cara Membetulkannya**
  – *George S. Khan* ..... Rp 7.500,–
- **Manajemen Untuk Sekretaris**
  – *Tony Waworuntu* ..... Rp 7.500,–
- **Manajemen Kearsipan**
  – *Drs. Zulkifli Amsyah, MLS* ..... Rp 9.000,–
- **Pengantar Ilmu Manajemen**
  – *Prof.Dr. A.M. Kadarman & Drs. Jusuf Udayana* ..... Rp 8.000,–
- **Manajemen Sumber Daya Manusia**
  – *Drs. Moh. Agus Tulus dkk* ..... Rp 6.000,–
- **Strategi Efektif Berwirausaha: mencakup studi kelayakan usaha ***
  – *Joe Setyawan* ..... Rp 5.500,–
- **Taktik Menetapkan Harga**
  – *Gregory Lewis* ..... Rp 5.000,–
- **Meraup Uang dengan Multilevel Marketing: Pedoman Praktis Menuju Network Selling yang Sukses**
  – *Peter J.Clothier* ..... Rp 17.000,–
- **Menjadi Kaya dengan Multilevel Marketing**
  – *David Roller* ..... Rp 15.000,–
- **Compassionate Capitalism**
  (Kapitalisme dengan Kepedulian Sosial)
  – *Rich DeVos—AMWAY* ..... Rp 22.500,–
- **How To Win Consumer Competitions**
  (Menang Undian: memperbesar peluang mendapatkan hadiah)
  – *Graham R. Stevenson* ..... Rp 8.500,–
- **Everyone Can Win**
  (Siapa pun Bisa Menang : Strategi Menang-Menang dalam Konflik)
  – *Helena Cornelius Shoshana Faire* ..... Rp 16.000,–
- **How to Make Money from Ideas and Inventions**
  (Meraup Uang dengan Ide dan Penemuan)
  – *R. Rogers* ..... Rp 10.000,–
- **Kiat Sukses Rapat**
  – *Malcolm Peel* ..... Rp 12.000,–
- **Sukses Wawancara: Kiat Sukses Menghadapi Berbagai Macam Wawancara dalam Pekerjaan**
  – *Iain Maitland* ..... Rp 7.000,–
- **Mengatasi Stress Secara Positif: Petunjuk Praktis bagi Anda yang Bekerja di Bawah Tekanan**
  – *Peter E. Makin & Patricia A. Lindley* ..... Rp 8.000,–
- **Berhasil dalam Wawancara**
  – *Michael Stevents* ..... Rp 11.000,–
- **Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan**
  – *Prof.Dr.R.Slot & Drs.G.H.Minnaar* ..... Rp 22.500,–
- **Analisis Kredit untuk Account Officer**
  – *Jopie Jusuf* ..... Rp 15.000,–
- **Akuntansi Manajemen**
  – *Gudono MBA* ..... Rp 29.000,–
- **10 Pemenang Nobel Ekonomi**
  – *Prof. William Breit & Roger W. Spencer* ..... Rp 11.000,–

*Ket.: *) Persediaan kami sedang habis. Barangkali Anda masih bisa memperoleh di toko buku langganan Anda.*

Buku-buku terbitan kami dapat Anda peroleh di toko buku terdekat langganan Anda. Pesanan melalui wesel pos harap dialamatkan kepada **TB Gramedia Jakarta, Jl. Gajah Mada 104-107 Jakarta 11140**atau **TB Gramedia Surabaya, Jl. Manyar Kertoarjo No. 16 Surabaya 60116**dengan mengirimkan sejumlah harga buku ditambah ongkos kirim melalui pos laut/biasa sebesar Rp. 1.500,–/eks.

GRAMEDIA
penerbit buku utama

Hasil Polling Pemilu BALAIRUNG:

Dari Yang DIPAKSA Sampai Yang Tak Mau MEMILIH

Agaknya, kendati Pemilu masih tahun depan, aktivitas masing-masing Orsospol sudah mulai hingar bingar. Banyak yang telah mencoba kampanye, sebelum pluit kampanye dibunyikan. Gonjang-ganjingnya paling keras terdengar di Yogya. Namun, sebenarnya bukan rahasia lagi, bahwa jauh-jauh sebelumnya, Golkar sudah sering kampanye walau dieufimismekan dengan "temu kader". Kondisi ini, menurut pengamatan BALAIRUNG, ternyata turut memanasi pula para pemilih dan simpatisan para kontestan Pemilu 1997 mendatang.

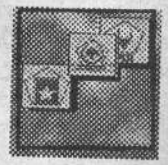

Untuk menjaring pendapat para pemilih dari berbagai kelompok yang strategis, BALAIRUNG mencoba membuat *pool* pendapat sekitar persoalan Pemilu di kota Yogyakarta. Sengaja, BALAIRUNG membagi pool pendapat tersebut secara *proporsional random sampling* pada empat kategori responden. Total responden yang terkumpul 177 orang.

Kelompok responden pertama yang ditemui adalah para pegawai negeri yang sering diwanti-wanti untuk loyal pada kontestan tertentu (25 responden). Kelompok kedua, mahasiswa (81 orang). Kelompok ketiga, para wiraswastawan (38 orang). Dan kelompok terakhir, para pelajar SMTA yang tahun 1997 akan mendapat kesempatan pertama kali memilih (33 orang). Berikut kami sajikan analisis hasil polling pendapat tersebut (laporan lengkap lihat tabel).

Pertanyaan angket dimulai dengan pertanyaan umum sekitar makna dan arti Pemilu itu bagi kebanyakan pemilih yang ditemui BALAIRUNG?

Jawaban paling normatif, ternyata terutama muncul dari kelompok pegawai negeri (48%) dan juga pelajar (45,5%) yang melihat Pemilu sebagai bentuk ekspresi demokrasi Pancasila. Jawaban normatif ini tentunya tidak terlepas dari *milieu* para pegawai negeri dan para pelajar yang setiap harinya ditatar--langsung maupun tidak langsung--melalui disiplin, upacara protokoler, dan Pendidikan Pancasila. Hingga cara pandang mereka pun terungkap di sini, yakni sangat berkait dengan Demokrasi Pancasila yang selalu diterimanya, lebih minimal dibanding kelompok wiraswasta maupun kelompok mahasiswa.

Ada pula yang melihat Pemilu sebagai kesempatan memberi dukun-

gan bagi kontestan yang dijagoi. Hal ini terutama terlihat dari para pegawai negeri (20%). Sementara, kelompok mahasiswa dan wiraswasta justru melihat Pemilu sebagai peristiwa kenegaraan yang penting, yang memiliki implikasi signifikan terhadap kelangsungan bangsa.

Namun, cukup banyak pula kelompok responden BALAIRUNG yang melihat Pemilu sebagai peristiwa yang "biasa-biasa saja'. Jawaban semacam ini paling banyak muncul dari kelompok mahasiswa (23,5%) dan wiraswastawan (28,9%).

Dalam menghadapi Pemilu 1997 kebanyakan dari pemilih, baik dari kelompok wiraswasta, pegawai negeri, pelajar, maupun mahasiswa menyatakan tertarik dan antusias. Bagi mereka, Pemilu 1997 merupakan kesempatan untuk menyalurkan aspirasi politik.

Meskipun antusias untuk ikut memilih, beberapa kelompok sampel mengungkapkan pula rasa pesimismenya akan Pemilu 1997 yang menurut mereka tetap tidak akan banyak mengubah keadaan. Impresi pesimis ini terutama muncul dari kelompok wiraswasta (23,6%) dan mahasiswa (48,1%). Ini karena mereka melihat ada sistem kekuasaan raksasa yang kekuatannya jauh melebihi Sistem Pemilu dan Sistem Kepartaian saat ini. Meminjam konsep *Maurice Duverger* dalam bukunya *"Political Parties: Their Organization and Activity in The Modern State"* (1951), fungsi kelembagaan Pemilu dan Kepartaian kita agaknya telah tereliminir oleh apa yang disebut Duverger sebagai Faktor Z (pemegang kuasa sesungguhnya). Tak heran, jika apapun yang terjadi dalam Pemilu 1997 di Indonesia, menurut para responden, skenarionya cenderung akan melanggengkan pemegang kuasa. Jadi, pesimisme itu beralasan..

Apa saja yang menjadi alasan responden dalam memilih kontestannya? Sebagian besar dari kelompok pelajar menyatakan tertarik dengan program-program yang dijanjikan kontestan (30%). Rupa-rupanya, janji-janji kontestan saat kampanye atau program-program yang ditawarkan menjadi pegangan dan cara pemilih muda menilai kontestan yang hendak dipilih. Dengan analisis ini, dapat diprediksi bahwa probabilitas keberhasilan kempanye Pemilu 1997 akan lebih tinggi dan efektif jika *target group*-nya adalah pemilih-pemilih muda, kelompok usia pelajar. Sementara, bagi mahasiswa dan kelompok wiraswasta, alasan ketertarikan pada salah satu kontestan yang utama adalah karena komitmen kontestan tersebut terhadap perjuangan demokrasi di Indonesia.

Alasan lain yang secara umum dijawab semua kelompok yang menyebabkan mereka memilih suatu kontestan adalah kesesuaian dengan garis politik yang dianut serta solidaritas keagamaan. Kondisi ini mengingatkan bahwa unsur-unsur SARA masih akan menjadi bumbu sedap yang terus dijual untuk menarik para pemilih dari berbagai golongan dalam Pemilu '97 nanti. Ini tak akan jauh berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, yang banyak menggunakan *approach* religi atau garis ideologi alternatif tertentu, dalam menarik simpati para pemilih.

Yang penting pula di sini, alasan keterpaksaan atau karena adanya intimidasi, ternyata paling banyak muncul dari kelompok pegawai negeri (24%). Ini tentu erat terkait dengan *Permen 12* (Peraturan Menteri No.12 tahun 1970) yang "mewajibkan" para pegawai negeri untuk memilih Golkar dalam setiap Pemilu. Ditambah lagi, banyak atasan kantor yang menakut-nakuti bawahannya untuk memilih, juga membuat para pegawai negeri yang menjadi responden ini merasa tidak punya pilihan lain.

Ketika ditanya tentang harapannya pada Pemilu 1997, masing-masing kelompok memberikan jawaban variatif. Namun, jabawan paling

MINAT DAN REAKSI MENGHADAPI PEMILU 1997

	Wiraswasta	PNS	Pelajar	Mahasiswa
Senang	23,6%	56%	42,4%	18,5%
Biasa-Biasa Saja	50%	36%	42%	27,1%
Pesimis	23,6%	8%	15,2%	48,1%
Tidak peduli	2,8%	0%	0%	6,3%

ARTI PEMILU

	Wiraswasta	PNS	Pelajar	Mahasiswa
Perwujudan Hak Demokrasi Pancasila	28,9%	48%	45,5%	12,3%
Kesempatan memberi dukungan bagi kontestan yang disukai	3,3%	20%	3%	4,9%
Peristiwa penting bagi masa depan bangsa	28,9%	16%	45%	40%
Biasa saja	28,9%	16%	6%	23,5%

KETERTARIKAN MEMILIH SALAH SATU KONTESTAN

JAWABAN LEBIH DARI SATU

	Wiraswasta	PNS	Pelajar	Mahasiswa
Program yang dijanjikan	7,8%	8%	30%	11%
Jumlah massa pendukung besar	2,6%	8%	3%	1,2%
Kontestan sering memberi dana rakyat	7,8%	0%	15%	7,4%
Kesesuaian dengan garis politiknya	23%	28%	42%	32%
Solidaritas keagamaan	18%	28%	39%	27%
Komitmennya terhadap demokrasi	39%	8%	36%	43%
Keterpaksaan atau intimidasi	5,2%	24%	0%	1,2%
Tidak tertarik dengan ketiga kontestan	13%	8%	0%	28,4%

PENDAPAT TENTANG PEMILU SEBELUM '97

	WIRASWASTA	PNS	PELAJAR	MAHASISWA
BERLANGSUNG JURDIL	31,6%	56%	15,2%	3,7%
TIDAK JURDIL	42,1%	36%	42,4%	77,8%
TIDAK TAHU	26,3%	8%	42,4%	18,5%

banyak dari responden adalah harapan akan terjadinya perbaikan perekonomian. Harapan berikutnya adalah perubahan iklim politik dan terakhir harapan terjadinya suksesi.

Namun, di antara keempat kelompok tersebut, ada pula yang tidak banyak berharap. Hal ini terutama terlihat dari jawaban sebagian besar mahasiswa (26%). Agaknya, mereka merasa *hopeless* melihat situasi sosial ekonomi politik yang tidak banyak berubah walau pemilu sudah berkali-kali berlangsung, sejak Pemilu tahun 1955. Beberapa mahasiswa kritis yang dijadikan responden, bahkan menyatakan pemilu saat ini hanyalah bagian dari "dagelan politik". Ketika ditanya lebih lanjut tentang maksudnya, mereka menjawab, "Pemilu, hanya supaya dikira negara kita demokratis. Padahal tidak ada pengaruhnya apa-apa, sementara DPR bisanya apa?"

Berikutnya, ketika ditanya tentang opini mereka perihal pemilu-pemilu sebelumnya, ternyata baik kelompok wiraswasta, mahasiswa maupun pelajar sebagian besar menyatakan bahwa Pemilu sebelumnya berlangsung tidak jujur dan adil. Kebanyakan mereka menilai bahwa Pemilu-pemilu sebelumnya diwarnai banyak kecurangan. Hanya kelompok pegawai negeri yang menganggap Pemilu telah berlangsung jujur dan adil (56%). Selebihnya, mereka tidak mau memberikan komentarnya..

Ketika ditanya tentang peran pemerintah dalam Pemilu, ternyata keempat kelompok memberikan komentar sama. Semua kelompok responden BALAIRUNG menyatakan bahwa pemerintah senantiasa bersikap tidak netral terhadap ketiga kontestan Pemilu. Menurut mereka, pemerintah cenderung menganakemaskan kontestan tertentu dan mendiskreditkan kontestan lainnya.

Ketika pertanyaan terakhir diajukan menyangkut keinginan untuk aktif mengikuti Pemilu 1997, sebagian besar--sejalan dengan analisis awal--menunjukkan antusiasmenya. Namun, perlu dicermati, yang menyatakan tidak tertarik sama sekali dengan Pemilu 1997 ternyata cukup banyak. Adapun urutannya, paling banyak dari kalangan mahasiswa (34%), kemudian dari kalangan wiraswastawan (28,9%), selanjutnya dari kelompok pelajar (7%) dan yang paling sedikit yakni dari kelompok pegawai negeri (8%).

Saat dielaborasi lebih jauh tentang alasan ikut memilih dalam Pemilu, responden yang ingin mengikuti Pemilu 1997 menjawab bervariasi. Menyalurkan aspirasi politik adalah jawaban paling populer yang dipilih oleh keempat kelompok responden. Alasan normatif, yakni sebagai warga negara yang baik, paling banyak muncul dari kelompok pegawai negeri (87%) dan pelajar (77%). Padahal, jawaban ini justru paling tidak populer di kalangan mahasiswa (18%). Antusiasme pemilih muda yang diwakili kelompok pelajar sebagian besar ternyata didorong oleh keinginan memanfaatkan kesempatan langka yang belum pernah dimiliki sebelumnya (12,9%). Sementara, bagi kelompok mahasiswa alasan memilih dalam Pemilu 1997 lebih didorong oleh motivasi memberikan dukungan untuk partai yang disuka (40,7%).

Akhirnya, mungkin benar bahwa para pemilih sudah mulai membuat kriteria tentang pilihannya. Sekarang, persoalannya bagaimana para kontestan pandai-pandai menjual kecap agar sesuai dengan selera para pemilih. Akankah Pemilu 1997 akan lebih ramai atau justru makin bertambah sepi? Kita tunggu tanggal mainnya!

HAL-HAL YANG DIHARAPKAN DARI PEMILU '97

	WIRASWASTA	PNS	PELAJAR	MAHASISWA
AKAN TERJADI SUKSESI	23,7%	32%	36%	38,3%
ADA PERUBAHAN IKLIM POLITIK DI INDONESIA	39,5%	56%	42,4%	51,9%
ADA PERBAIKAN KEHIDUPAN EKONOMI	63,2%	52%	81,8%	64,2%
TIDAK BANYAK BERHARAP	10,5%	0%	6%	26%

PENDAPAT TENTANG PEMERINTAH NETRAL TERHADAP KETIGA KONTESTAN

	WIRASWASTA	PNS	PELAJAR	MAHASISWA
YA, PEMERINTAH NETRAL	13,2%	32%	18%	2,4%
TIDAK, PEMERINTAH CENDERUNG MEMIHAK	63%	52%	48,5%	80%

Anthony Dio Martin,

dibantu tim riset laporan utama: Akhid, Kun Anggoro, Nining, Agus, Prabowo, Widarso, Sutrisno, Iin, Wuwun, Arifin

Referensi Penting *untuk* Mahasiswa Fakultas Teknik

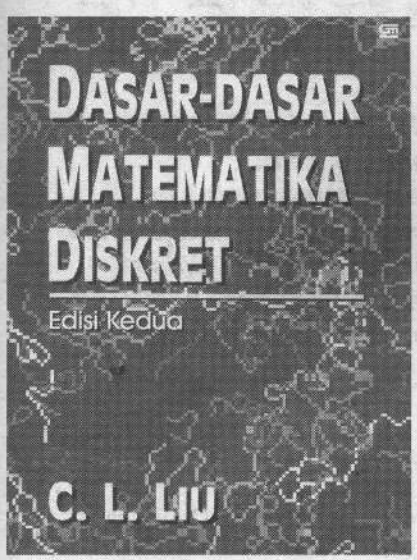

TULISAN C.L. Liu ini ditujukan untuk Anda yang mempelajari matematika terapan, ilmu komputer, dan perekayasaan. Materi buku ini antara lain terdiri dari teori himpunan, kombinasi, teori graf, dan aljabar ditambah dengan komputabilitas dan bahasa formal, mesin status tak terhingga, analisis algoritma, probabilitas diskret, perlakuan asimtotik fungsi-fungsi, dan algoritma rekursif.

- **GM 211 95.232; xi + 443 hlm.; Rp 32.500,–**

PEGANGAN ini mengetengahkan informasi yang berkaitan dengan penggunaan metode dan peraturan terbaru berdasar Standar Tata Cara Perhitungan Struktur Beton nomor: SK SNI T-15-1991-03. Juga menyajikan dasar-dasar pengetahuan sistem struktur beton sederhana pada umumnya, dan perilaku serta kekuatan komponen struktur beton bertulang pada khususnya.

- **GM 209 94.122; xv + 527 hlm.; Rp 35.000,–**

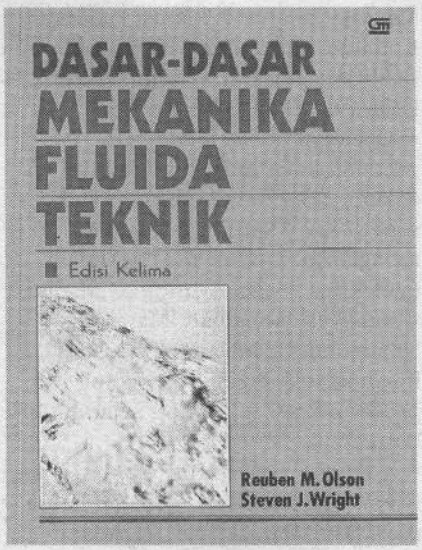

DASAR-DASAR Mekanika Fluida Teknik (*Essentials of Engineering Fluid Mechanics*) tulisan **Reuben M. Olson & Steven J. Wright** ini akan menuntun Anda dalam mempelajari prinsip-prinsip perilaku fluida dan mengembangkan pemahaman tentang sifat-sifat fluida, agar Anda mampu memecahkan masalah-masalah dalam praktek.

- **GM 209 93.603; xiii + 667 hlm.; Rp 42.500,–**

Lengkapi kepustakaan bidang teknik dan statistika Anda dengan judul-judul ini.

- **Vademekum Elektronika**
  – *Wasito S.* ..... **Rp 45.000,–**
- **Dasar-dasar Termodinamika Teknik 1 & 2**
  – *Dr. Ir. Harijono Djojodihardjo* **Rp 14.000,–**
  – *Buku 2* ..... **Rp 12.000,–**
- **Dasar Teknik Tenaga Listrik dan Elektronika Daya**
  – *Dr. Zuhal, M.El.Eng* ..... **Rp 16.000,–**
- **Perencanaan Biaya Bangunan**
  – *Allan Ashworth* ..... **Rp 26.000,–**
- **Sifat Gas dan Zat Cair**
  – *Robert C. Reid, John M.Prausnitz, Thomas K. Sherwood* ..... **Rp 26.000,–**
- **Dasar Metalurgi Fisik untuk Rekayasawan**
  – *W.O. Alexander, PhD, CEng, FIM.* **Rp12.500,–**
- **Metalurgi Fisik Modern**
  – *R.E. Smallman BSc, Ph.D. PIM* **Rp 31.000,–**
- **Korosi: untuk Mahasiswa dan Rekayasawan**
  – *K.R. Trethewey & J. Chamberlain* ..... **Rp 24.000,–**
- **Aljabar Linear**
  – *Wono Setyo Budhi* ..... **Rp 30.000,–**
- **Metode Plastis: Analisis dan Desain**
  – *Ir. Laurentius Wahyudi & Ir. Sjahril A. Rahim, M.Eng.* ... **Rp 15.000,–**
- **Mekanika Tanah 1 & 2**
  – *Hary Christady Ardiyatno (1)* . **Rp 24.000,–**
  – *Buku 2* ..... **Rp 34.000,–**
- **Etika Rekayasa**
  – *Mike W. Martin & Roland Schinzinger* ..... **Rp 30.000,–**
- **Matematika Teknik Lanjutan Edisi Ke-6 Buku 1 & 2**
  – *Erwin Kreyszig* ..... @ **Rp 50.000,–**
- **Analisis Hidrologi**
  – *Dr. Ir. Sri Harto Br., Dip.H.* .... **Rp 21.000,–**
- **Struktur Baja**
  – *Charles G. Salmon dan John E. Johnson* ..... **Rp 27.500,–**
- **Pengantar Statistika**
  – *Ronald E. Walpole* ..... **Rp 25.000,–**
- **Prinsip dan Prosedur Statistika**
  – *Robert G.D. Steel & James H. Torrie* ..... **Rp 25.000,–**
- **Statistik Nonparametrik Terapan**
  – *Wayne W. Daniel* ..... **Rp 17.000,–**
- **Analisis Regresi Edisi Kedua**
  – *N.R. Draper & H. Smith* ..... **Rp 47.500,–**
- **Bahan Polimer Konstruksi Bangunan**
  – *Dorel Feldman dan Anton J. Hartomo* ..... **Rp 15.000,–**

Buku-buku terbitan kami dapat Anda peroleh di toko buku terdekat langganan Anda. Pesanan melalui wesel pos harap dialamatkan kepada **TB Gramedia Jakarta, Jl. Gajah Mada 104–107 Jakarta 11140** atau **TB Gramedia Surabaya, Jl. Manyar Kertoardjo No. 16 Surabaya 60116** dengan mengirimkan pembayaran sejumlah harga buku ditambah ongkos kirim melalui pos laut/biasa sebesar Rp 1.500,–/eks.

GRAMEDIA
penerbit buku utama

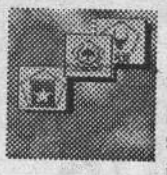

HEGEMONI

Pentas Pemilu memang mirip pentas sepakbola. Masing-masing tim ingin tampil sebagai juara. Mengadakan victory lap sambil mengusung piala, disambut sorak bahana jutaan massa. Namun, apa jadinya bila cara-cara curang ikut bermain di lapangan? Wasit pertandingan hanya berpihak pada satu tim kesebelasan? Dan repotnya, Pemilu bukanlah seremeh pertandingan sepakbola.

Percaturan politik makro Indonesia mencatat peristiwa penting dengan lahirnya sebuah lembaga independen pengawas Pemilu. Tepatnya hari Jumat 15 Maret 1996, bertempat di Taman Ismail Marzuki Jakarta, deklarasi kelahiran Komite Independen Pengawas Pemilu (KIPP) dicetuskan. Lembaga yang konon dipelopori sekelompok masyarakat kelas menengah prodemokrasi ini, tergabung di dalamnya berbagai unsur politik, seperti PRD, SMID, Aldera, PMII, dan sebagainya. Duduk pula sejumlah intelektual seperti Nurkholis Madjid, Goenawan Mohamad, Marsilam Simanjuntak, Mulyana W. Kusuma. Inilah aliansi terbesar gerakan prodemokrasi sepanjang sejarah Orde Baru.

Pembentukan KIPP, seperti kata Goenawan Mohamad sebagai ketua presidium, muncul dari kesadaran bahwa Pemilu merupakan amanat konstitusi dan sekaligus sarana pendidikan rakyat secara kongkrit. Selanjutnya, kelahiran KIPP merupakan derivasi dukungan terhadap gagasan Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Keberadaan KIPP ini, agaknya tak jauh berbeda dengan **NAMFREL** (National Movement for Free Election) di Filipina, **Pollwacth** di Thailand, dan **CEL** di Chili. NAMFREL, sebagaimana kita ketahui, tampil sebagai lembaga independen pengawas Pemilu yang punya andil besar dalam menumbangkan rezim Presiden Marcos.

Meskipun demikian, Mulyana W. Kusumah selaku Sekjen KIPP, saat ditemui BALAIRUNG menolak kalau kelahiran KIPP membebek fenomena yang tengah trend secara internasional. Lahirnya KIPP, menurutnya, menjadi keniscayaan sejarah. Yakni, kebutuhan dari masyarakat agar mereka tidak menjadi obyek Pemilu semata, yang dimobilisir demi kepentingan politik tertentu. Dalam konteks politik masa kini, sudah saatnya masyarakat menjadi subyek yang berpartisipasi aktif mengontrol jalannya kekuasaan. "Pemilu tidak sekedar berkaitan dengan proses rekruitmen politik untuk menampilkan seseorang pada badan legislatif. Tetapi menentukan kehidupan negara selanjutnya. Untuk itu KIPP tampil sebagai gerakan moral yang mempunyai komitmen untuk menyehatkan kehidupan politik, " tutur dosen Kriminologi UI ini.

Lebih lanjut, ia tegaskan, berdirinya KIPP memungkinkan proses Pemilu dapat dikontrol secara transparan. Setidaknya ada empat aspek yang dapat dilakukan KIPP seperti pemantauan, publikasi dari pemantauan, pemberdayaan politik rakyat, serta menfasilitasi dialog publik antar calon kontestan.

Menyoal kemungkinan KIPP menjadi gerakan politik seperti NAMFREL di Philipina, Mulyana mengatakan bahwa semua itu tergantung pada proses politik dan luasnya dukungan terhadap KIPP. Namun sementara ini KIPP hanya memfokuskan diri pada persoalan Pemilu saja.

Kemunculan KIPP sebagai lembaga pengawas Pemilu di luar Panwaslak, merupakan fenomena menarik dalam diskursus perpolitikan Indonesia. Di tahun 1992, H.J. Princen juga pernah membikin BPHR (Badan Perlindungan Hak-hak Politik

REPRO: GARIS BESAR POLITIK AMERIKA

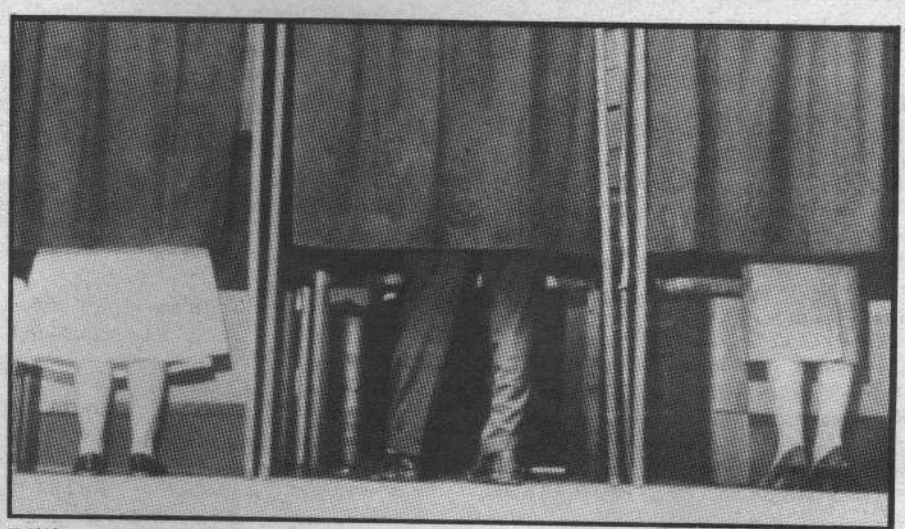

Bilik suara

Dari sinikah hegemoni itu dimulai?

di Bilik Suara

Rakyat). Namun entah kenapa gaungnya kurang terdengar. Kemudian di Bandung juga berdiri KNPP (Komite Nasinal Pemantau Pemilu) yang dipelopori oleh Effendi Saman.

Sedangkan kelahiran KIPP, agaknya satu kasus yang berbeda dari lembaga swasta pendahulunya. KIPP memiliki nuansa tersendiri karena mendapat dukungan dan harapan dari banyak pihak. Serta memancing perdebatan ramai di ruang publik, baik yang pro maupun kontra.

Dalam konteks penyelengaraan Pemilu, lembaga ini muncul sebagai gerakan moral yang berupaya mengembalikan Pemilu pada substansinya sebagai sarana perwujudan demokrasi rakyat. Hal ini mengindikasikan tumbuhnya kesadaran politik rakyat akan perlunya jaminan terhadap hak-hak bagi politiknya.

Selain itu, KIPP juga dapat dilihat sebagai fenomen politis, yakni sebagai manifestasi resistensi rakyat akibat tindakan manipulatif negara dalam praktik penyelengaraan Pemilu. Sebab, secara faktual memang banyak ditemukan kecurangan di setiap penyelenggaraan Pemilu. Dus dengan demikian, jelas belum terwujud asas Luber dan Jurdil dalam Pemilu. Lalu, seberapa jauh Pemilu di Indonesia dimanipulasi dan direduksi penguasa demi status quo ?

PELAKU PELANGGARAN PEMILU 1992

I. APARAT KEAMANAN	
ABRI	31
Polisi	16
Hansip	12
Babinsa	4
Aparat lainnya	8
II. BIROKRASI	
Gubernur	1
Bupati dan aparatnya	14
Camat dan aparatnya	58
Lurah dan aparatnya	177
Kepala Dusun dan aparatnya	29
Aparat lainnya	17
III. GOLONGAN KARYA	23
IV. BADAN PENYELENGGARA PEMILU	
KPPS	510
PPS	100
PPD	7
Panwaslak	1
V. LEMBAGA LAIN	
Rektor	3
Guru	3
Kepala Sekolah	1
Lembaga lainnya	4
JENIS PELANGGARAN	
1. Pelanggaran kampanye	
Larangan pemasangan gambar parpol	30
Larangan menghadiri kampanye parpol	30
Larangan terhadap kampanye parpol	10
2. Intimidasi dan kekerasan terhadap warga parpol	
Kekerasan terhadap warga parpol	8
Intimidasi terhadap warga parpol	15
Penahanan terhadap warga parpol	5
3, Pelangganan terhadap saksi parpol	
Penolakan	425
Intimidasi	26
Kekerasan	12
Penahanan	7
Penyuapan	2

Sumber : Buku Pemilu; Pelanggaraan Asas Luber, Alexander Irwan, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta ' 995

Kecurangan-kecurangan Pemilu

Praktik penyelenggaraan Pemilu di Indonesia selama ini, memang belum memberikan citra sebagai arena pertandingan politik yang fair. Berbagai tindak kecurangan secara kental mewarnai setiap pehelatan lima tahunan di negeri ini. Intimidasi, manipulasi, ketidakjujuran, dan ketidakadilan. Semua seolah diawetkan pihak kekuasaan demi kelanggengan statusnya.

Menengok realitas ini, William Liddle, menyatakan bahwa Pemilu Orde Baru merupakan proses electoral yang dikendalikan secara sangat berencana dan ketat, untuk mengukuhkan keabsahan pemerintah kepada rakyatnya. Demikianlah, Pemilu dijadikan mesin kekuasaan untuk menguatkan hegemoninya, dan didesain lewat jalur regulatif maupun praktik penyelenggaraan.

Alexander Irwan dalam bukunya **Pemilu, Pelanggaran Asas Luber,** menunjukkan secara gamblang berbagai varian kecurangan yang terjadi. Menurut penelitiannya yang secara khusus melihat Pemilu 1992, mencacat kurang lebih 900 kasus pelanggaran Kasus pelanggaran yang berkaitan dengan saksi parpol, menempati peringkat tertinggi, yakni 472 kasus. Kasus ini terdiri dari penolakan terhadap saksi, intimidasi, kekerasan, penahanan, dan penyuapan saksi parpol. Peringkat kedua kecurangan dalam pemungutan dan perhitungan suara, yakni terjadi 223 kasus yang meliputi manipulasi kartu tanda pemilih, kecurangan penghitungan suara, dan pencoblosan ilegal. Tindak intimidasi yang memaksa masyarakat memilih Golkar juga dilakukan. Menurut Alexender Irwan, pelanggaran-pelanggaran itu

tidak terjadi secara kebetulan, tetapi tersistematisir dan disengaja untuk memenangkan satu partai tertentu, yang kita semua sudah tahu.

Dari data penelitian Alexender ini, ironisnya, pelaku pelanggaran terbanyak justru dilakukan oleh badan-badan penyelengara Pemilu, baik KPPS, PPS, PPD, maupun Panwaslak sendiri. Badan yang seharusnya netral ini, anehnya malahan nimbrung memanipulasi pemilu. Hal ini belum lagi ditambah para aparat birokrasi pemerintahan mulai gubernur sampai dengan kepala dusun. .

Panwaslak sendiri, sebagaimana ditandaskan Alexander Irwan kepada BALAIRUNG, justru tidak berfungsi sama sekali. Wakil partai memang diikutsertakan, namun seperti halnya saksi-saksi di TPS-TPS, mereka tidak berdaya menghadapi tindak intimidasi. "Ada yang diancam siksaan fisik segala macam," jelasnya.

Berangkat dari borok-borok politik semacam inilah, lembaga pengawas Pemilu yang independen menjadi sangat mendesak diperlukan. Namun meskipun demikian, menurut Alexender Irwan, lembaga independen tidak dapat bekerja sama dengan salah satu OPP. Sebab, keabsahannya akan berkurang. Di sini muncul dilema. Di satu pihak ada yang mendirikan badan pemantau Pemilu independen, tetapi tidak mempunyai mesin pemantau. Di lain pihak partai politiklah yang siap melakukan pengawasan.

Adanya berbagai praktik kecurangan pemilu juga diakui oleh Effendi Saman, salah seorang penggagas Komite Nasional Pengawas Pemilu (KNPP). Kepada BALAIRUNG dia menuturkan, sulit untuk membantah dugaan-dugaan pemerintah melegitimasi kemenangan Golkar. Sebab, sistem politik yang ada memberi peluang Golkar untuk mendapatkan akses dari birokrasi. "Sulit bagi kita untuk menafikkan adanya kolusi antara Golkar dan Birokrasi. Sejak awal Golkar sudah dapat menghitung jumlah kekuatannya pada saat pemilu," ungkap Effendi Saman yang juga direktur LBH Nusantara ini.

Menurutnya juga, kalau bicara soal kecurangan Pemilu yang sering terjadi justru bukan di perkotaan, tapi di pedesaan. Saksi dan masyarakat desa tidak berani untuk menyampaikan kecurangan karena adanya intimidasi.

Bila kita tengok wajah perundang-undangan Pemilu, meskipun sudah beberapa kali mengalami renovasi, mulai UU No. 15/1969 sampai UU No.1/85, tetap saja dimanipulasi untuk pemenangan Golkar. Materi regulasi yang dirancang sangat menguntungkan Golkar, dan sebaliknya mematikan partai politik lainnya. Mulai dari mekanisme kampanye, litsus anggota partai, sampai pada penyelengaraan Pemilu. Dari segi penyelenggara misalnya, dinyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan pemerintah di bawah pimpinan Presiden. Presiden selanjutnya menunjuk Menteri Dalam Negeri sebagai ketua panitia Pemilu, kemudian menyusul di bawahnya secara urut kacang dari gubernur sampai lurah.

Sejak tahun 1982 lewat UU No2/1982 memang dibentuk dibentuk Panwaslak (Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu) yang melibatkan unsur partai politik. Tetapi, keterlibatan mereka hanya sekedar formalitas belaka. Komposisi lembaga ini masih didominasi pemerintah sehingga posisi partai politik tetaplah periferal Ini pula yang menyebabkan lembaga ini mandul dan tidak berfungsi sebagai wasit pemilu, tetapi justru menjadi penggembira pelaku pelanggaran.

Ketiga OPP memang sudah diikutsertakan dalam panitia pemilihan maupun panitia pengawas pelaksanaan pemilu ini, baik di tingkat pusat maupun daerah. Akan tetapi di tingkat desa, ketiga OPP justru tidak diikutsertakan dalam Pantarlih (Panitia Pendaftaran Pemilih) dan KPPS. Padahal lewat lembaga ini praktik kecurangan sangat besar kemungkinannya terjadi, walaupun ada saksi-saksi ketiga OPP di TPS.

Kasus-kasus kecurangan pemilu yang selama ini terjadi, bisa jadi bermuara dari tiadanya lembaga independen yang mengawasi pelaksanaan Pemilu. Ditambah lagi monopoli Pemerintah sebagai penyelenggara hajatan besar ini . Tindakan hukum pun tidak pernah divoniskan terhadap tindak kecurangan yang terjadi. Dalam konteks yang lebih luas, kondisi ini

Repro

Deklarasi KIPP

Suara demokrasi dari Taman Ismail Marzuki

didukung adanya regulasi pemilu yang didesain penguasa demi pemenangan Partainya. Sebab Kemenangan Golkar dianggap jalan paling aman untuk mempertahankan status quo. Sehingga, tak ayal lagi Pemilu menjadi alat legitimasi kekuasaan guna menguatkan hegemoninya semata.

Ideologisasi pembangunan dan stabilitas

Pereduksian makna Pemilu yang terjadi selama ini, tidak lepas dari *platform* besar perpolitikan Orde Baru. Yakni, ideologisasi pembangunan dan stablitas politik. Diawali saat terjadi pengalihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru. Elit Orde Baru sepakat untuk menempatkan pembangunan ekonomi dan stabilitas politik sebagai prioritas utama. Sebagaimana **James Schiller** menuliskan, bahwa tujuan penting Orde Baru ialah terciptanya suatu masyarakat yang merasa aman, menikmati arti penting ketertiban, dan mengejar kemajuan pembangunan dalam iklim stabilitas. Kemudian dilakukanlah serangkaian penertiban politik guna menciptakan stabilitas politik yang diinginkan.

Salah satu langkah politis-strategis, tampak dengan diciptakannya partai negara, yakni Golkar. Golkar yang sinonim dengan *electoral machine* bagi kekuasasan. Golkar yang mengemban misi tunggal untuk memenangkan Pemilu. Sebab seolah ada anggapan bahwa kemenangan Golkar berarti kemenangan Orde Baru yang seolah menjadi satu-satunya jalan untuk menjamin kelangsungan pembangunan. Maka cukup beralasan bila kemudian didesainlah konsep Pemilu yang sangat memanjakan partai beringin ini, dan menganaktirikan dua orsospol lainnya.

Bila merunut akar historisnya, upaya ini diawali sejaki Pemilu 1971. Saat Amir Mahmoed mengemas birokrasi lewat Permendagri No 12 tahun 1969 dan menggiringnya ke bawah pohon Beringin. Militer yang sejak awal berada di belakang proses kelahiran Golkar, memberikan dukungan dengan memobilisasi massa lewat Bapilu dan Opsus. *Security approach* via BAKIN dan KOPKAMTIB-pun juga digunakan.

Sedang upaya untuk menjauhkan partai politik dengan massanya ditetapkan kebijakan *floating mass* (massa mengambang). Kebijakan ini sangat merugikan partai politik. Sebaliknya Golkar lewat tangan-tangan birokrasinya dapat leluasa memobilisasi massa sampai tingkat bawah.

Tahun 1973 pembonsaian partai dilakukan dengan difusikannya beberapa partai ke dalam Partai

Asep M.

Efendi Saman

Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia. Proses ini, disinyalir Prof. Dr. Ichlasul Amal, menunjukkan kuatnya kendali pemerintah dalam merealisasi rekayasa politiknya. Implikasinya membuat partai politik tidak berfungsi sebagai *countervailing forces* (kekuatan pengontrol), melainkan hanya sebagai penguat legitimasi dan kepanjangan tangan kekuasaan. Bermuara dari situlah, konflik-konflik partai politik mengalir, membenangkusut sampai saat ini.

Penderitaan parpol semakin parah saja ketika diundangkan 5 paket Undang-undang Politik. Yakni, UU No.1 tahun 1985 tentang Pemilu, UU No.2 tahun 1985 tentang Susunan dan Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat, UU No.3 tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, UU No.5 tentang Refferendum, serta UU no.8 tentang Ormas. Kelima regulasi politik tersebut jelas sengaja di-*setting* untuk memperkokoh status quo, menjauhkan perubahan dan meminimalisir demokratisasi yang tak begitu antusias diinginkan.

Di tengah kejumudan perpolitikan rezim Orde Baru saat ini, kehadiran KIPP tentunya membawa angin segar. Setidaknya memberikan kontribusi bagi proses pedagogi politik rakyat.

Namun agak ironis memang, bila kelahiran KIPP justru disambut pemerintah dengan paras curiga dan *negatif thinking*. Dimulai dari sikap Golkar yang menganggap KIPP inkonstitusional dan di luar sistem. ABRI juga ikut-ikutan tidak mengakui keberadaan KIPP, disusul sikap Panwaslak dan para gubernur yang ramai-ramai membebek

Dan lucunya, untuk menandingi kemunculan KIPP muncul pula lembaga-lembaga tandingan yang bertujuan mengawasi segala aktivitas KIPP, semacam LIP-KIPP (Lembaga Independen Pengawas KIPP), TOPP (Tim Obyektif Pemantau Pemilu), dan sebagainya. Aha, dagelan politik apa lagi ini?

Maka tak aneh, bila di berbagai daerah kegiatan-kegiatan KIPP -- disandung dan dibubarkan. Berbagai azab dan sengsara tak henti menggebuki si bayi kecil yang tak diharapkan lahir ini. Tidak hanya datang dari aparat keamanan, penganiayaan terhadap KIPP ternyata juga dilakukan oleh sekelompok "preman politik". Kasus Medan misalnya, ketika ada acara rapat pembentukan KIPP di kantor LBH Medan, mereka dilempari bahkan kantornya dibakar.

Reaksi-reaksi minor yang ditunjukkan pemerintah terhadap kehadiran KIPP, menandakan betapa pemerintah selalu mencoba berkelit dari keinginan masyarakat untuk ikut mengontrol negara ini. Mengharapkan *political will* dari pemerintah, menjadi nonsen juga agaknya.

Pada akhirnya, kekuasaan di mana saja rasanya perlu membaca pepatah Romawi Kuno yang berbunyi *Vox Populi, Vox Dei,* suara rakyat itu ibarat suara Tuhan. Meskipun cuma tamsil, namun siapa tahu pepatah ini ada benarnya.

Agus Riyanto
Mashudi, Widarso, Asep M, Sutrisno, Prabowo.

Pemilu 1997 Festival

Perhitungan Suara

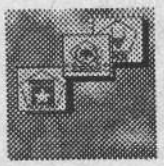

TAHUN depan pesta lima tahunan itu akan digelar kembali. Pemilu 1997. Yang ketujuh sejak Indoesia merdeka, keenam di masa Soeharto dan pertama di era PJPT II. Banyak pengamat mencoba melihat arti pentingnya. Dalam perspektif ke depan, inilah Pemilu yang digelar pada era di mana Indonesia memasuki kecenderungan ekonomi-politik global. Indonesia tidak akan dapat menghindari keterbukaan politik dengan tuntutan aspirasi yang lebih meluas.

Kita juga menyaksikan suhu politik yang terus menanjak naik. Sejumlah perdebatan politik diangkat di hadapan publik. Sebut saja misalnya Pemilu jurdil (jujur dan adil), kemunculan KIPP (Komite Independen Pengawas Pemilu), kampanye terselubung dan posisi ABRI. Di tengah hiruk-pikuk itu, kita dihadapkan dengan satu pertanyaan serius: Apa signifikansi Pemilu 1997 bagi kualitas perpolitikan Indonesia? Inilah tema sentral yang menjadi topik garapan Temu Wicara BALAIRUNG, yang menghadirkan Prof. Dr. Ichlasul Amal, Direktur Program Pasca Sarjana UGM dan Guru Besar Fisipol UGM, Ari Dwipayana, dosen muda Ilmu Pemerintahan UGM, Andi Arief, mahasiswa Pemerintahan UGM angkatan 1990; Mulyadi J. A. Malik, mahasiswa Filsafat angkatan 1990, serta sejumlah aktivis diskusi mahasiswa. Temu wicara dipandu oleh Hary Prabowo.

Panggung sejarah politik Indonesia modern telah menggelar enam kali pesta demokrasi. Satu kali dalam suasana yang hikmat di jaman Soekarno berkuasa, tahun 1955. Lima kali di masa rezim Orde Baru, di bawah iklim politik yang terkendali.

Menyokong Legitimasi Kekuasaan

Apa sebetulnya yang ingin diperoleh pemerintah dari sekian pemilihan umum yang telah digelar? Memperoleh legitimasi. Itulah jawaban yang lazim diberikan. Ari Dwipayana memahami Pemilu Orde Baru dalam konteks ini. Dosen pemerintahan ini menempatkan Pemilu dalam desain besar politik Orde Baru. Sebuah rezim menurut Ari membutuhkan alat legitimasi. Untuk itu diperlukan kemenangan satu partai dalam Pemilu demi menjamin hegemoni kekuasaan. "Pada mulanya memang legitimasi Orde Baru didapatkan dari basis material, prestasi ekonomi yang dimotori oleh boom minyak tahun 70-an. Namun, pemberian *reward* material saja belum cukup. Pengakuan itu sudah saatnya didapat dari Pemilu, bahwa rezim itu diakui oleh masyarakat."

Seorang pengamat Indonesia dari Asian Studies Flinders University, Jim Schiller, menyimpulkan bahwa legitimasi internasional akan mudah diperoleh Orde Baru. Bagi pemerintahan Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa Barat, lanjut Schiller, hubungan dagang dan keamanan merupakan prioritas yang lebih penting daripada demokratisasi dan hak asasi manusia. Sebaliknya legitimasi domestik agak susah diperoleh.

Harapan Orde Baru untuk mendapatkan legitimasi sekaligus hegemoni melalui Pemilu tidak sepenuhnya tercapai. Paling tidak ini pendapat Andi Arief. Mantan Pemimpin Umum Majalah *Sintesa* ini berkesimpulan hegemoni telah gagal. "Studi Alexander Irwan tentang kecurangan pemilu menunjukkan pemerintah sepenuhnya gagal. Yang terjadi adalah dominasi dan bukan hegemoni." Penurunan perolehan suara Golkar dalam pemilu 1992 oleh Andi Arief juga dijadikan salah satu bukti kegagalan hegemoni kekuasaan.

Pemilu Orde Baru memang sulit dipisahkan dari kepentingan rezim yang berkuasa; pembangunan, dan stabilitas. Dalam kaitan dengan Pemilu obsesi ini membawa dilema tersendiri. Mengikuti kesimpulan Jim Schiller, persoalannya adalah bagaimana menyelenggarakan pemilihan dan

proses kampanye yang melahirkan partisipasi dan antusiasme masyarakat tanpa mengancam stabilitas politik dan keberlangsungan rezim. Bagaimana memenangkan Golkar tanpa pemboikotan dari dua partai yang lain.

Menggenjot Demokratisasi

Pemilu dan demokrasi adalah dua konsep politik modern yang sulit dipisahkan. Harapan orang akan demokrasi selalu tumbuh bila mengamati Pemilu. Lantaran itulah orang pun berharap Pemilu 1997 membawa angin baru bagi demokratisasi di Indonesia. Tentu bukan tanpa sebab. Momentum Pemilu 1997 menurut Andi Arief akan mempercepat gerakan-gerakan demokratisasi. Banyak isu-isu muncul ke permukaan menjadi pembicaraan publik. Lihat saja misalnya, pembicaraan tentang posisi ABRI, kejujuran pelaksaanaan Pemilu dan kecurangan-kecurangan Pemilu sebelumnya menggelinding ke depan. Lebih jauh Andi Arief melihat ada alasan historik-empirik mengapa kita berharap banyak pada Pemilu. Mengacu pada Huntington dalam bukunya "Gelombang Ketiga", Andi menunjukkan contoh 14 negara yang berhasil melakukan transformasi politiknya dari negara otoriter menuju demokratik. "Ada harapan pada Pemilu untuk perubahan dan transformasi politik. Karena dalam negara di mana gerakan-gerakan massa dan pro demokrasi belum kuat, institusi semacam Pemilu masih dijadikan momentum untuk melakukan perubahan.

Meskipun mangakui Pemilu bukanlah momentum yang benar-benar di-*manage* untuk suatu tujuan perubahan politik, Andi melihat tiga peluang yang bisa diambil oleh kekuatan prodemokrasi. *Pertama* pemilu menunjukkan adanya percepatan-percepatan politik yang bisa diarahkan pada suatu perubahan. *Kedua,* ada kesempatan dari kekuatan prodemokrasi untuk melakukan kampanye tentang demokratisasi melalui pengumpulan massa-massa yang legal. *Terakhir,* Pemilu adalah momentum yang penting untuk melakukan pembangunan opini di masyarakat. Kesempatan ini sulit diperoleh pada masa-masa sebelumnya.

Hal yang agak berbeda diungkapkan oleh Prof. Dr. Ichlasul Amal. "Saya tidak berharap banyak kalau dalam Pemilu akan terjadi perubahan." Walaupun demikian, masih menurut Amal, ada semacam harapan dalam Pemilu dari masyarakat yang kurang beruntung. "Dulu kita mengenal ratu adil. Sekarang metamorfosisinya beragam. Dan Pemilu adalah salah satu harapan untuk perubahan, meski masih sangat samar-samar," ungkap pengamat politik UGM ini.

Masih menurut Ichlasul Amal, berharap pada kemenangan dua partai juga agak susah. Kedua partai ini tidak terbentuk secara alamiah, melainkan karena ada rekayasa. Sehingga eksistensinya juga sulit. Amal

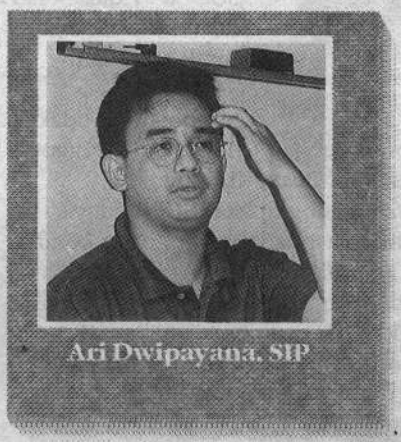
Sunu

Ari Dwipayana, SIP

mengambil contoh di Meksiko. Di sana demokratisasi bisa terbentuk melalui pemilu sebab semua partai yang ada terbentuk secara alamiah. Tidak mengherankan bila di Indonesia partai politik berada dalam situasi ketidakberdayaan. "Ketika Pemilu dilaksanakan, partai politik mengalami kematian panjang, suatu bentuk kesengajaan dari desain besar yang dilakukan rezim ini untuk prestasi ekonomi," ungkap Ari. Menurut Ari, rezim ini mengembangkan politik korporatisme negara dan mengkooptasi lembaga-lembaga politik yang ada dalam masyarakat. Sehingga institusi yang terbangun dalam masyarakat lemah atau dilemahkan.

Dalam situasi inilah ide pembentukan partai baru sangat beralasan. "Kalau pembentukan partai baru dimungkinkan, mengikuti isu yang berkembang, harus diberi kesempatan," tegas Amal, Doktor lulusan *Monash University* Australia ini. "Jumlah partai," demikian Amal, " tidak sekian terus (tetap, red), melainkan harus bisa mengikuti perkembangan isu."

Ada hal yang juga menarik tentang pemilu dalam konteks Indonesia. Ia dipahami sebagai satu bentuk perlawanan masyarakat terhadap praktik politik represif penguasa. Menurut Ari Dwipayana, Pemilu sebagai perlawanan ini terjadi ketika kebijakan pembangunan menimbulkan gejolak pada masyarakat. Bentuk perlawanannya adalah memenangkan OPP yang lain, yang tidak didukung penguasa. Lebih tajam dosen muda ini melihat akar persoalannya pada kegagalan pembangunan institusi politik dalam *framework* tradisional, semisal partai politik atau pun DPR. "Masyarakat tidak percaya lagi pada *framework* tradisional. Maka tidak aneh jika muncul gerakan buruh dan tani, gerakan-gerakan massa, dan gerakan akar- rumpun (*grass root movement*). Parpol, parlemen atau apa pun dalam *framework* tradisional tidak berarti bagi mereka," tegas Ari. Ia lebih jauh menambahkan ada kecenderungan yang timbul dari gerakan massa di negara berkembang di mana *grassroot movement* lebih digunakan. Ini dianggap lebih baik daripada jalur parlementer atau jalur lainnya pada mekanisme demokrasi parlementer.

Dalam konteks Pemilu sebagai perlawanan, Andi Areif memberikan tiga bentuk perlawanan massa yang mungkin. *Pertama,* pemboikotan pemilu. *Kedua,* strategi golput. *Ketiga,* memenangkan kedua OPP yang lain. Namun semua ini tentu butuh koordinasi. Di sinilah salah satu makna kehadiran KIPP. "Pemboikotan dan perlawanan akan lebih bisa dikoordinasikan dengan adanya KIPP," ungkap Andi.

Sepakat dengan Andi, Ari melihat kehadiran KIPP sangat dibutuhkan untuk memperkuat lembaga-lembaga masyarakat yang melakukan infra-politik perlawanan tidak langsung terhadap penguasa. Masih dalam konteks perlawanan, Pemilu menurut Ari bukanlah proses yang berujung pada tindakan memilih warga negara untuk meyalurkan kepentingannya,

tetapi lebih pada gerakan protes. Memenangkan OPP lain selain Golkar. "Konteks kelahiran KIPP dan Pemilu lebih sebagai gerakan perlawanan tersembunyi", tegas Ari.

KIPP: Terapi bagi kecurangan ?

Ada yang baru dalam keramaian isu menjelang Pemilu tahun depan. KIIP. Singkatan dari Komite Independen Pengawas Pemilu. Sebuah akronim yang luar biasa. Betapa tidak, bayangan kita akan terarah pada kata *to keep* dalam bahasa inggris. Tidak terlalu salah. Kira-kira begitulah formulasi peran yang akan dimainkan KIPP nanti. Menjaga dan mengawasi Pemilu agar jauh dari praktik kecurangan.

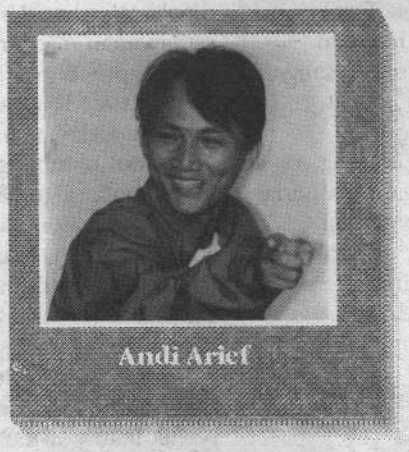
Sumu

Andi Arief

Kemunculan KIPP seolah membawa satu kejutan politik. Pro-kontra pendapat pun mengalir seputar isu ini. Banyak kalangan pemerintah menganggapnya di luar sistem dan inkonstitusional, karenanya harus segera diamankan. Namun tidak sedikit yang menganggapnya tidak perlu dirisaukan. Ini adalah sebuah kewajaran politik dalam negara yang menyebut dirinya demokratis.

Banyak pengamat menempatkan kelahiran KIPP ini dalam konteks demokratisasi di Indonesia. KIPP dipahami sebagai sebuah pengorganisasian aspirasi masyarakat akan Pemilu yang berkualitas. Seperti diutarakan Andi Arief, KIPP lahir karena dari pengalaman lima kali Pemilu sebelumnya banyak kecurangan yang terjadi. Rakyat lebih banyak dimobilisasi untuk Pemilu daripada berpartisipasi. Pengalaman faktual Pemilu sebelumnya memberi ruang yang nyata bagi kehadiran KIPP. Di tingkatan subyektif, menurut Andi, banyak pengamat melihat KIPP sebagai wujud menggelembung dan meningginya aliansi dari kekuatan pro-demokrasi. Tidak salah bila kemudian orang seperti Goenawan Muhamad menganggapnya sebagai eksperimentasi demokrasi. Berbagai kelompok dengan visi yang berbeda namun dengan *concern* yang sama yakni demokrasi bergabung dan mengabaikan perbedaan yang ada di antara mereka. "KIPP adalah gerakan terbesar prodemokrasi pasca Malari," ungkap Andi. KIPP lanjut Andi adalah hasil dari represi negara yang lahir sebagai bentuk resistensi yang baru.

Keberadaan KIPP menurut Andi harus dipahami pada tingkatan taktik (dalam proses demokratisasi di Indonesia, red). Karena itu harus dibedakan dengan Golput. "Tidak benar kalau kehadiran KIPP untuk meredam Golput. Isu pemboikotan tidak relevan dengan KIPP " ,tegas anggota presidium Pusat KIPP ini.

Menyinggung apakah KIPP hanya berorientasi pada pelaksanaan pemilu yang jurdil, mahasiswa pemerintahan ini dengan tegas mengatakan " tentu tidak". Ada tiga target politik KIPP. *Pertama,* massa mengorganisasikan diri untuk resisten jika terjadi pelanggaran pemilu. *Kedua,* massa bawah yang telah mendapat pendidikan politik akan melakukan tekanan pada kedua parpol, PDI dan PPP, untuk memboikot hasil pemilu jika ditemukan banyak terjadi pelanggaran dan kecurangan. *Ketiga,* mendongkrak perolehan suara dari PPP dan PDI.

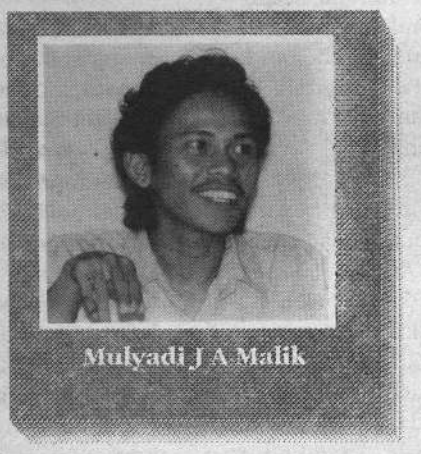
Sumu

Mulyadi J A Malik

Hingga saat ini KIPP masih menjadi pembicaraan orang-orang kota. Padahal seharusnya menurut Mulyadi, KIPP harus menjadi gerilya desa dan bukan gerilya kota. "KIPP harus membangun basisnya di desa, karena di sanalah mobilitas komunitas desa untuk kepentingan golkar terjadi." Kemungkinan untuk mengorientasikan KIPP ke desa juga dilihat Andi Arief. Menurut Andi jalur-jalur seperti pesantren atau juga KWI (Konferensi Wali Gereja Indonesia-red) bisa dipakai untuk mengsosialisasi KIPP ke desa. Hal ini didukung oleh isu KIPP yang tidak terlalu membutuhkan tingkat pendidikan politik yang tinggi. Hal ini berbeda misalnya dengan isu Golput yang harus mengenalkan sistem-sistem politik modern. Namun seorang peserta diskusi, Arie Sudjito, menolak pengorientasian KIPP ke desa. Sebaliknya ia lebih memilih gerakan KIPP harus ditekankan pada kelas menengah perkotaan. Karena sosialisasi KIPP perlu waktu, apalagi di tingkat desa. Masih menurut Arie Sujito, hubungan antara pemilu dan masyarakat tidak bersifat timbal-balik. Melainkan masyarakat yang dibutuhkan dalam Pemilu untuk melegitimasi kekuasaan.

Menakar signifikansi Pemilu 1997

Untuk apa sebetulnya jutaan suara yang diberikan rakyat negeri ini dalam setiap Pemilu? Ini tentu bukan sekadar pertanyaan iseng. James Schiller dari Asian Studies Flinders University di tahun 1994 menulis sebuah kertas kerja dengan judul yang menukik: *Counting for Nothing ? Interpreting the results of Indonesian's controlled elections.* Di sana ia menyimpulkan Pemilu Indonesia hanya mempertunjukkan pilihan, dan bukan mendorong pemilih untuk membuat pilihan. Sekadar tontonan pemihan dan bukan keputusan politik. Schiller barangkali tak seluruhnya benar. Tetapi kesimpulannya yang bersifat pertanyaan itu menggambarkan dengan tepat pelaksaan Pemilu di negari ini. Lalu apa yang akan terjadi setelah Pemilu ?

Menebak apa yang terjadi dalam politik Indonesia memang bukan perkara gampang. Tak ada garis linear

politik. Lantaran itulah banyak ramalan yang meleset. Sebut saja misalnya tulisan Benedict Anderson di tahun 1978 tentang "hari-hari terakhir Soeharto". Sampai hari ini Soeharto ternyata masih menghitung hari-harinya yang panjang. Mungkinkah ada perubahan yang berarti setelah Pemilu 1997?

"Tidak akan ada perubahan yang sangat besar," tegas Prof. Dr. Ichlasul Amal. Salah satu cara melihat perubahan ini adalah apakah akan terjadi pergantian kekuasaan. "Pertanyaan kita adalah siapakah calon pemimpin (Presiden, red). Tanyakan saja pada PDI dan PPP. Pasti jawabannya sama". Dengan kata lain tak akan ada suksesi tahun 1998. Padahal dalam pandangan Amal inilah sebetulnya yang menjadi faktor kunci perubahan di Indonesia. Hal ini mudah dimengerti. Setelah tiga dasawarsa bercokol di atas kursi kekuasaan. Soeharto menjadi figur yang paling menentukan arah perpolitikan Indonesia.

Suksesi memang menjadi target politik. Namun persoalannya, seperti diungkapkan Andi Arief, kesadaran anti penguasa sekarang belum menjadi kesadaran kolektif. Masih berupa kesadaran individu-individu. Aktivis mahasiswa ini memberi contoh isu suksesi yang digulirkan Amien Rais. "Walaupun isu itu menggaung tetapi apakah masyarakat lalu menjadi anti-Soeharto? Saya kira tidak", tegas Andi. Suksesi masih menjadi kesadaran individu-individu. Tidak atau belum ada basis material untuk membangun atau mengarahkannya menjadi kesadaran kolektif dan tuntutan riil politik.

Lalu tak adakah artinya pergeseran perolehan suara ketiga OPP berkaitan dengan hubungan lembaga eksekutif dan legislatif? Menurut Amal pergeseran itu tidak membawa banyak arti. Dengan tajam mantan Dekan FISIPOL ini justru mempersoalkan apakah kita setuju melihat dua partai yang lain (PDI dan PPP, red) sebagai simbol dari rakyat. "Jika benar, akan menaikkan *bargaining position* DPR dalam berhadapan dengan lembaga legislatif". Namun situasi sekarang tidak menunjukkan sinyalemen seperti itu. Mahasiswa, menurut Amal, justru enggan melepaskan perannya pada dua partai ini. Mahasiswa akan tetap melihat dirinya sebagai suatu alat yang lebih efektif dalam melakukan perubahan politik. "Sehingga meski partai itu suaranya bertambah banyak, *bargaining position*-nya tidak akan terlalu bertambah. Perubahan suara tidak secara otomatis menaikkan posisi tawar DPR. Rakyat yang sadar politik tidak akan mempercayainya", lanjut Prof Amal. Kalau harapan sekarang ditaruh pada dua partai menurut Amal itu lebih sebagai simbol resisten. Masih menurut pengamat Politik UGM ini, dalam perpolitikan Indonesia militer masih menjadi aktor yang paling menentukan. Demokratisasi justru lebih banyak didorong jika dalam lembaga ini terjadi perbedaan pendapat.

Sunu

Prof.Dr Ichlasul Amal

Merefleksikan Pemilu selama Orde Baru Prof. Ichlasul Amal mempunyai analogi yang menarik. Pemilu baginya sering dipararelkan dengan pentas lawak Srimulat. Sebuah hiburan. Semua sudah tahu cerita dan akhir ceritanya. Bahkan terus diulang-ulang. Namun masih ada yang menonton, bahkan tertawa sebelum dipentaskan. "Di Indonesia proses pemilunya begitu semarak, namun hasilnya kurang penting. Berbeda dengan Australia yang prosesnya biasa saja, namun hasilnya sangat ditunggu", ungkap Amal.

Ichlasul Amal tidak sendirian. Di tahun 1992, Michael Vatikiotis, ketika berbicara tentang "partai dan politik parlementer di Indonesia tahun 1987-1993" menulis : "Dalam biografinya Soeharto berbicara tentang pemilu sebagai sebuah fungsi yang penting dalam demokrasi Indonesia. Namun dia memikirkan pentingnya sebuah Pemilu yang berjalan lancar dan hampir mengabaikan signifikansi hasilnya. Bagi Soeharto adalah penting menghadiahi rakyatnya sebuah tindakan pilihan, bukan memilih yang sesungguhnya."

Pemilu Indonesia adalah sebuah tontonan, yang akhir ceritanya sudah diketahui. Dan kita, rakyat di negeri ini, seolah ditakdirkan untuk menjadi penonton yang baik. Di tengah kesenyapan politik seperti inilah kehadiran KIPP layak disambut, agar kita bisa berteriak tentang kecurangan dan ketidakadilan yang ada.

Frans Surdiasis

Sunu

Temu wicara di kantor redaksi

Legenda Pemilu dan Utopia Perubahan

Sutopo Sasmito Edy
Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Setiap penyelenggaraan Pemilu di tanah air ini selalu disambut dengan sejumlah harapan, utamanya harapan akan terjadinya perubahan-perubahan politik ke arah kehidupan politik yang lebih demokratis. Baik eksplisit maupun implisit, harapan itu ditujukan ke arah terciptanya keseimbangan posisi partai-partai politik

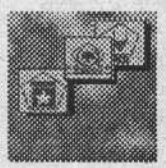

TITIK awal perubahan politik diasumsikan terjadi bila partai-partai politik nonpemerintah dapat mengambil posisi dan peran politik secara lebih signifikan melalui kenaikan perolehan suara mereka dalam Pemilu.

Masalahnya, apakah kenaikan suara OPP nonpemerintah dalam Pemilu memiliki relevansi dengan harapan di atas ? Apakah Pemilu di Indonesia merupakan wadah atau mekanisme untuk melakukan perubahan politik ?

Untuk keperluan analisis, akan direkayasa sebuah prediksi perolehan suara ketiga OPP dalam Pemilu 1997 mendatang. Pemilu sepanjang sejarah Orde Baru memiliki kecenderungan tetap; yaitu adanya peraturan-peraturan Pemilu yang lebih menguntungkan Golkar, tidak netralnya birokrasi dan militer, serta kecurangan dan manipulasi dalam proses kampanye sampai penghitungan suara yang sangat merugikan partai nonpemerintah. Kita sebut saja kecenderungan tersebut sebagai *variabel statik* yang muncul di setiap Pemilu dan hanya berfluktuasi pada derajat intensitasnya, misalnya pada pemilu 1992 di mana birokrasi dan militer dianggap lebih menjaga jarak dengan Golkar.

Gejala-gejala sosiologis dan kultural yang berkembang saat ini menunjukan semakin tingginya kesenjangan ekonomi, disparitas sosial, kesadaran kelas yang meningkat, serta kondisi-kondisi psikologis yang menunjukkan meningkatnya frustasi sosial. Tuntutan perubahan, keadilan, partisipasi, dan kontrol sosial menguat sejalan meningkatnya kesadaran politik masyarakat. Gejala-gajala tersebut diasumsikan melahirkan *protest votter* ataupun *anti votter* dan kita sebut saja sebagai *variabel dinamik* (kontinyu).

Ada faktor-faktor internal partai yang diasumsikan turut berpengaruh pada pola perilaku memilih massa. PPP saat ini relatif sepi dari konflik dan kepemimpinan Buya Ismail memperlihatkan diri lebih ofensif dan provokatif dengan isu-isu politiknya, walaupun partai ini sedikit mengecewakan sebagian pendukung tradisionalnya yang berasal dari NU. Dalam pemilu 1992 lalu terjadi proses *realigment* (kembalinya pemilih tradisional PPP) dan juga dukungan besar dari *urban votter,* sehingga di beberapa daerah seperti Pekalongan dan Pasuruan PPP mampu menggeser kedudukan Golkar.

PDI juga menguat posisinya karena kelihaiannya mengeksploitasi isu-isu sosial-ekonomi, identifikasi dirinya sebagai partainya *wong cilik,* partai alternatif, atau partai masa depan, sekaligus mendapat dukungan besar dari kaum muda di perkotaan. Walau konflik sifatnya permanen di partai ini, anehnya dalam dua pemilu terakhir suara mereka meningkat secara signifikan, terutama di daerah-daerah urban di pulau Jawa. Tampilnya keluarga Bung Karno setidaknya dianggap sebagai faktor yang sangat berpengaruh dalam memikat massa, apalagi dengan tampilnya Megawati nantinya.

Kehadiran Komite Independen Pengawas Pemilu (KIPP) kita asumsikan akan memperkuat kontrol masyarakat terhadap Pemilu mendatang, dan kondisi-kondisi internal partai yang kondusif mendukung bekerjanya variabel dinamik secara lebih dominan ketimbang variabel statik. Variabel statik dianggap hanya signifikan di daerah-daerah luar Jawa, utamanya di pedesaan, dan hanya mampu mempertahankan suara Golkar pada tingkat tertentu. Di sisi lain, rangkaian variabel dinamik menyebabkan daerah-daerah urban dimenangkan PPP dan PDI. Maka murni 'meramal', kita dapatkan angka; PPP memperoleh 24 % (102 kursi), PDI mendapat 23,29 % (99 kursi), dan Golkar dengan dukungan sepenuhnya dari militer dan birokrasi masih bertahan dengan perolehan suara 52,71 % (244 kursi).

Lalu apa pengaruhnya kenaikan suara parpol non-pemerintah di atas ? Pertama-tama, kita harus berpijak dari kenyataan bahwa Pemilu di Indonesia tidak memiliki relevansi dengan pembentukan eksekutif atau rotasi

kekuasaan (*non-electoral politics*). Artinya, partai-partai atau wakil-wakil rakyat di parlemen tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk menyusun kabinet (eksekutif) seperti dalam model parlementer, sehingga siapapun memenangkan pemilu dan menguasai suara di DPR belum tentu merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan. Ini dikarenakan kekuasaan politik secara riel dipegang oleh koalisi militer dan birokrasi di bawah kendali Soeharto, yang menentukan hampir segala proses pengambilan keputusan di tingkat mana pun dalam pemerintahan. Keberadaan koalisi ini sama sekali tidak tergantung pada (atau dipengaruhi oleh) proses Pemilu.

Setelah pemilu menghasilkan komposisi dan pembentukan legislatif, maka secara formal para wakil rakyat itu berperan besar dalam pengambilan keputusan politik di SU MPR, yaitu merumuskan GBHN, pemilihan presiden dan wakil presiden, serta keputusan-keputusan lain melalui Ketetapan MPR. Namun, pada praktiknya, justru di lembaga pengambilan keputusan tertinggi inilah koalisi kekuasaan *non-electoral* menegaskan manifestasi politiknya. Di MPR terdapat Fraksi ABRI dan Fraksi Utusan Daerah yang memiliki hak dan suara sebagai kekuatan politik tersendiri (yang persis sama dengan ketiga fraksi lainnya) yang mana keanggotaan mereka ditentukan atau dipilih sendiri oleh presiden (*incumbent*). Bersama-sama F-KP, F-ABRI dan F-UD membentuk koalisi dalam menggolkan dan mengamankan setiap *policy* pemerintah, sehingga menimbulkan permasalahan relevansi representasi mereka di MPR. Dalam struktur kekuasaan kelembagaan semacam ini, kekuatan non-pemerintah menjadi sangat tidak berarti.

Bila di MPR para wakil rakyat itu masih berpeluang mempengaruhi atau berperanan minimal dalam pengambilan keputusan, di DPR mereka berperan sebagai legitimator atau sekedar melakukan respon atas kebijaksanaan-kebijaksanaan eksekutif (fungsi kontrol) tanpa bisa mempengaruhi, menentukan, atau bahkan membatalkan. Secara formal fraksi-fraksi di DPR berhak mengajukan usulan perubahan UU (inisiatif) seperti yang tengah dilakukan PPP bersama PDI saat ini, tapi inisiatif tersebut tak akan pernah menjadi usulan Dewan tanpa persetujuan fraksi-fraksi pemerintah.

Maka tidak mengherankan bila sepanjang sejarah Orde Baru tak satupun *political decision* bisa lolos bila berasal dari usulan fraksi non-pemerintah, atau setidaknya belum pernah ada agenda perubahan politik berasal dari PPP dan PDI keluar sebagai *political-outcomes* melalui proses *bargaining power* di lembaga politik seperti MPR atau DPR, yang mencerminkan derajat determinasi peran politik mereka.

Akan tetapi apakah realitas politik di atas membuat kenaikan suara PPP

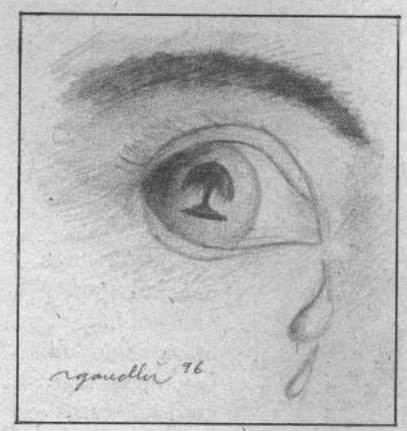

dan PDI dalam Pemilu 1997 menjadi tidak bermakna sama sekali ? Tentu saja fenomena di atas memiliki relevansi simbolis (moral) maupun politis, tergantung pada sikap-sikap politik kedua parpol pasca Pemilu 1997.

Pertama-tama meningkatnya perolehan suara PPP dan PDI atau turunnya suara Golkar jelas mencerminkan melorotnya dukungan masyarakat terhadap pemerintah, atau dengan kata lain merosotnya legitimasi pemegang kekuasaan. Lebih jauh, dalam masyarakat yang sedang berubah dan menghendaki perubahan-perubahan politik, turunnya legitimasi berarti pula merosotnya kepercayaan masyarakat, dan umumnya hal itu menuntut alternatif kebijaksanaan baru. PPP dan PDI akan menjadi kekuatan simbolis mewakili sebagian massa yang menghendaki pembaruan yang harus didengar suaranya dalam pembentukan kebijaksanaan baru tersebut.

Tambahan suara tersebut bisa memperkuat dukungan moral fraksi-fraksi nonpemerintah atau melegetimasi tuntutan perubahan politik dalam lembaga-lembaga pengambilan keputusan. Dengan kata lain, klaim-klaim isu perubahan politik bisa dipijakkan dari dasar kehendak masyarakat dan setidaknya dalam kondisi meningkatnya legItimasi PPP dan PDI, *incumbent* tak akan cukup bertahan pada (sekedar) argumentasi-argumentasi subyektif-ideologis dalam merespon desakan perubahan.

Karena dalam berbagai proses pengambilan keputusan politik di mana mayoritas suara bukanlah kerangka acuan utama, maka implikasi moral di atas bisa cukup signifikan. Namun, lebih konkret lagi PPP dan PDI bisa menjadi penyeimbang kekuatan, bahkan bila *voting* digunakan dalam proses *decision-making* sekalipun.

Taruhlah misalnya PPP dan PDI dengan bekal dukungan moril di atas berhasil memaksakan voting untuk SU MPR 1998 dengan mengajukan calon presiden/wakil presiden alternatif. Praktiknya memang sulit bagi keduanya untuk menang dengan komposisi suara seperti di atas. Namun jumlah suara atau dukungan yang mereka peroleh (dan ini tidak menutup kemungkinan terjadinya perpindahan dukungan secara diam-diam dari fraksi pemerintah secara individual) yang menunjukkan keputusan tersebut tidak bulat/mutlak, akan menjadi batas-batas legitimasi bagi kepemimpinan kandidat terpilih. Artinya, dalam mengoperasikan *policies* nantinya eksekutif akan selalu dibatasi, tidak bisa mutlak-mutlakan, dan bahwasannya tidak setiap kebijaksanaan yang dijalankan mendapat dukungan sepenuhnya dari seluruh masyarakat.

Sampai di sini implikasi politis kenaikan suara ditentukan oleh sikap masing-masing kekuatan politik, apakah konsisten mendesakkan perubahan-perubahan politik (atau setidaknya mengusahakan celah-celah ke arah itu) atau malah menjadi konservatif dan berlindung-diri dalam konsesi-konsesi politis minimal sang *incumbent*.

Pemilu (Yang Bersih) Tidak (Mesti) Berarti Demokrasi

ISTIMEWA

Eric Hiariej
Penulis adalah staf di jurusan Hubungan Internasional Fisipol UGM.

Negara menurut kaum pluralis adalah lembaga netral. Setiap kekuatan sosial politik, kelompok maupun perorangan, sedikit banyak ikut berperan menentukan kebijakan negara. Sekalipun terdapat selisih relatif kekuatan antarkelompok, negara tetap melaksanakan kebijakan yang menentukan heteroginitas kepentingan masyarakat

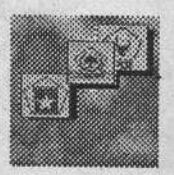

MENJADI warga negara berarti menjadi bagian mayarakat plural. Lebih jauh lagi, menjadi warga negara sama dengan menjadi perorangan atau anggota suatu kelompok yang ikut ramai-ramai menentukan kebijakan negara. Kewarganegaraan tidak dihitung sekedar mengikuti domisili atau letak tempat kelahiran. Kewarganegaraan dengan cara yang lebih substansif diukur mmenurut ada tidaknya dan besar kecilnya keterlibatan dalam proses pengambilan kebijakan negara.

Kewarganegaraan dalam pemahaman demikian merupakan prinsip terpenting demokrasi. Secara inheren kewarganegaraan dalam tradisi pluralia tersebut mengandung unsur penting. *Pertama*, hak dan kewajiban negara melaksanakan keputusan bersama. *Kedua*, kewajiban negara melaksanakan keputusan itu, mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat, dan membuka akses bagi kontrol sosial. *Ketiga*, kewajiban setiap anggota masyarakat menghormati keputusan bersama. Dan *keempat*, hak dan kewenangan negara untuk menjamin efektifitas perwujudan keputusan tersebut.

Ada beragam tata cara yang pernah dikembangkan melintas waktu dan batas geografis dalam rangka mewujudkan prinsisp kewarganegaraan. Namum terdapat prosedur dasar yang disepakati sebagai persyaratan maksimal. Diantaranya; pemungutan suara secara rahasia, hak pilih universal bagi orang dewasa, Pemilu berkala, kompetisi antarpendukung, serta akses dan perlakuan yang sama bagi setiap kelompok. Singkatnya, konsensus ini mengetengahkan Pemilu—yang jujur, adil, dan bebas—sebagai syarat minimal yang harus ada bagi sebuah demokrasi.

Konon kabarnya Pemilu itu sendiri adalah pesta demokrasi. Huntington dengan cara berbeda menyebutkan *sine qua non* yang tak terelakkan bagi demokrasi. Hanya saja kerap Pemilu adalah pesta tanpa demokrasi. Pemilu tak lebih dari ajang untuk kekuatan kekuasaan absolut. Pemilu sangat rentan terhadap berbagai bentuk penyelewengan. Mulai dari sekedar *koersi* terhadap oposisi sampai manipulasi suara. Untuk itu Pemilu musti dijaga. Atas nama demokrasi Pemilu harus dipagari dari bentuk

penyelewengan apa saja, agar tidak sekedar menjadi festival nasional yang terlalu banyak makan biaya.

Mungkin lantaran ini—atau juga agar tidak monoton, lebih menarik dan bermakna—muncul ide mengawasi Pemilu. Goenawan Mohamad dan kawan-kawan memutuskan membentuk KIPP. KIPP bertujuan melindungi Pemilu dari manipulasi. Karenanya eksistensi lembaga ini seharusnya didukung, setidaknya di tingkat ide.

**

Tulisan ini sebetulnya hendak membicarakan beberapa kesalahpahaman yang kerap didiamkan dalam perbincangan tentang Pemilu dan demokrasi. *Pertama*; Pemilu merupakan syarat mutlak bagi demokrasi. Pemilu yang adil, jujur dan bebas sekalipun bukan jaminan bagi tegaknya demokrasi.

Di beberapa tempat Pemilu yang bersih secara ironis, justeru melahirkan kekuatan-kekuatan yang mengancam demokrasi. Sementara, di beberapa tempat lainnya Pemilu malah melegitimasi kekuasaan diktatorial.

Di Bulgaria misalnya, pemilu pasca komunisme berhasil dimenangkan partai komunis yang sebelumnya menjadi partai yang paling menakutkan. Di Rusia pemilihan yang diselenggarakan khusus untuk anggota parlemen telah menempatkan kelompok komunis Mongolia tetap menguasai 60-70 % kursi parlemen tanpa harus mengekang oposisi.

Di lain pihak PAP (*People's Action Party*)—partai yang berkuasa secara berulang-ulang— selalu memenangkan Pemilu Singapura tanpa harus repot-repot melakuakn manipulasi. Sedangkan Kuomintang yang sudah berkuasa semenjak berdirinya Taiwan memantapkan dominasinya lewat Pemilu yang benar-benar bersih beberapa waktu lalu.

Kedua; Gerakan politik—terutama arus bawah—muncul sebagai primadona. Bahkan gerakan ini dianggap sebuah keniscayaan dalam menegakkan demokrasi. Padahal kenyataannya tidak harus demikian. Lihatlah Filipina, apakah *people power* sudah berhasil melahirkan demokrasi?

Pada tahun 1973 di Thailand berlangsung apa yang mirip dengan *people power* di Filipina. Dominasi militer berhasil ditumbangkan, dan sebuah pemerintahan sipil yang demokratis berhasil dibentuk. Tapi kegembiraan rakyat yanga demokratis hanya bertahan tiga tahun. Pada tahun 1976 sebuah kudeta militer berhasil mengembalikan dominasi tentara.

Rupanya, pemerintah sipil tidak cukup baik dalam menjaga ketertiban sosial. Selama tiga tahun masa pemerintahan, terlalu banyak terjadi kerusuhan sosial. Rakyat Thailand belum siap berdemokrasi. Perbedaan kepentingan bukannya digiring ke meja kompromi, malah dibawa ke medan konflik. Muncul situasi yang memancing militer melakukan campur tangan.

Sementara, di Afrika Selatan sebuah gelombang tekanan rakyat yang maha dahsyat telah melepaskan

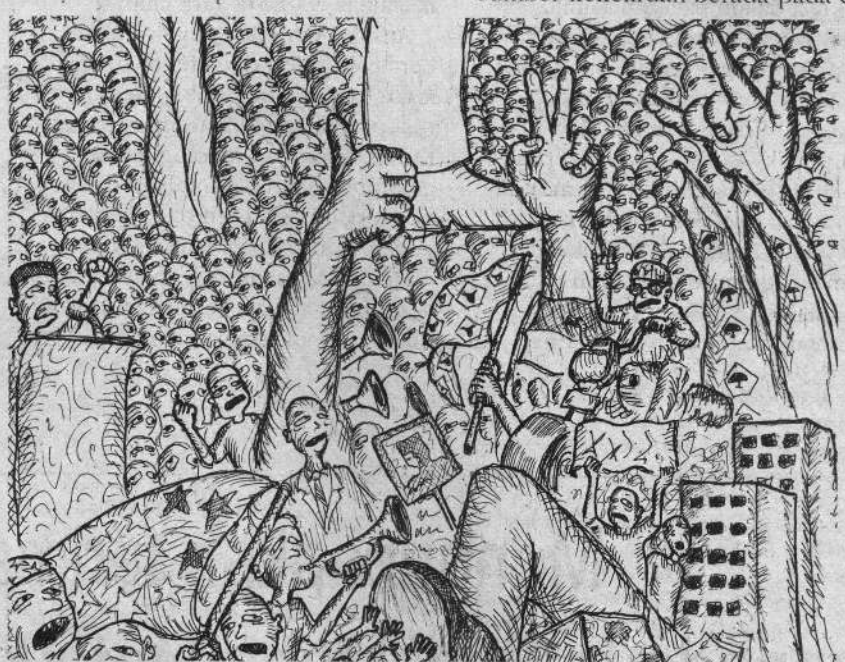

cengkeraman apartheid. Gelombang itu terus berlanjut memaksa pemerintah kulit putih melaksanakan Pemilu multi- partai dan multi-rasial, hingga berakhir dengan terbentuknya pemerintahan demokratis yang mewakili seluruh etnis yang ada.

Tapi tidak ada cukup jaminan, apakah kerusuhan sosial yang memuncak sebelum pencabutan apartheid dan Pemilu tidak akan terulang lagi. Atau apakah kehidupan demokrasi akan hidup dan berkembang? Masalahnya, budaya kompromi dan negosiasi yang dipraktekkan di Afrika Selatan hanya terjadi di tingkat afiliasi. Mandela, de Klerk dan Buthelezi bisa duduk di satu di satu meja dan saling bertukar konsesi. Tapi sebagian besar anggota maupun simpatisan ANC, IFP dan partai-partai kulit putih lebih percaya pada cara-cara kekerasan. Karenanya kelangsungan hidup demokrasi Afrika Selatan tergantung pada seberapa jauh elit-elit kelompok mampu mengendalikan anggotanya.

Artinya, gerakan politik mampu memaksakan Pemilu yang demokratis. Tapi ternyata demokrasi butuh hal-hal lain yang jauh lebih luas.

Kenapa kesalahpahaman ini bisa terjadi? Apa hal-hal lain yang dibutuhkan demokrasi di luar Pemilu dan gerakan politik?

***

Penulis berpendapat, bahwa sumber kekeliruan berada pada cara mendefinisikan, melihat, dan merasakan demokrasi. Karena itu persoalan tersebut paling baik diselesaikan di tingkat teoritik.

Demokrasi yang akrab dengan kita akhir-akhir ini merupakan konsep yang sudah terlalu jauh dipengaruhi tradisi Schumpeterian, yaitu demokrasi yang didefenisikan secara prosedural. Demokrasi adalah metode politik, yakni sebuah tata cara kelembagaan untuk mencapai keputusan bersama, yang di dalamnya setiap individu memperoleh kesempatan mempengaruhi keputusan melalui kompetisi yang adil dan bebas. Sebuah sistem politik tergolong demokratis bila para elit pengambil

kebijakan disaring melalui Pemilu yang bebas, jujur, adil dan berkala. Melalui Pemilu, para calon elit bersaing memperoleh dukungan dari pemilih lewat suara.

Defenisi prosedural pertama-tama memberikan patokan untuk menilai demokratis tidaknya sebuah sistem politik. Bila suatu sistem politik menghalau partisipasi masyarakat dalam Pemilu, maka dapat diapastikan sistem itu tidak demokratis. Begitu pula bila oposisi dikekang atau perhitungan suara diselewengkan.

Selain itu defenisi ini tampaknya lebih sesuai dengan penerapan konsep demokrasi di kehidupan nyata. Demokrasi yang benar-benar dilihat dan dirasakan adalah demokrasi dalam batasan pemilu. Selanjutnya setiap tindakan di luar jiwa dan semangat pemilu yang jujur dan adil—kudeta militer, manipula pemilu atau koersi terhadap lawan-lawan politik—secara jelas dan pasti dapat dikategorikan bukan demokrasi.

Menurut tradisi Schumpeterian setiap upaya menuju keterbukaan pasti melibatkan pertentangan antara pemerintah dan kelompok non-pemerintah. Karenanya demokrasi harus diperjuangkan secara politik. Bagi pejuang demokrasi persoalannya adala bagaimana memperkuat diri setidaknya sampai batas yang mampu mengimbangi kekuatan pemerintah.

Sayangnya defenisi ala Schumpeter ini mungkin terlalu menyederhanakan. Demokrasi jauh lebih luas dan ideal dari sekedar Pemilu. Dalam bahasa klasik harus ada liberte, egalite dan fraternite. Pemilu tanpa diragukan merupakan esensi demokrasi yang utama. Lebih sekedar tata cara demokrasi yang menghendaki kontrol warga negara terhadap kebijakan pemerintah, pemerintah yang bertanggung jawab, kejujuran dan keterbukaan dalam politik; kesediaan bermusyawarah, dan sejumlah moralitas warga negara lainnya.

Artinya, demokrasi hanya akan bertahan hidup dan efektif selama kultur, spirit dan ideologi demokrasi hidup ditengah-tengah masyarakat. Kultur, spirit dan ideologi pada gilirannya akan dipantulkan dalam pengorganisasian lembaga-lembaga negara dan asosiasi masyarakat.

Di sini perjuangan menegakkan demokrasi adalah perjuangan sosial. Bukan saja membina kekuatan, melainkan mendidik masyarakat agar mampu berdemokrasi. Yang dibutuhkan bukan hanya kekuatan maha besar yang mampu memaksakan—atau setidaknya mengawasi—pemilu yang bersih, tapi sebuah moralitas sosial yang mampu melahirkan dan menjamin kelangsungan demokrasi. Moralitas ini diantaranya budaya akomodatif dan toleransi terhadap perbedaan; kesediaan berkompromi; dan kebiasaan menghormati aturan main.

Tulisan ini hendak menegaskan dua hal. *Pertama,* Pemilu tidak identik dengan demokrasi. Pemilu yang bebas,jujur dan adil sekalipun tidak harus berarti demokrasi. Demokrasi berkaitan dengan moralitas sosial tertentu.

Kedua, KIPP dan pejuang-pejuang demokrasi lainnya memperjuangkan demokrasi melalui gerakan politik bukanlah suatu keniscayaan. Sebuah gerakan sosial, tidak harus radikal, progresif dan dalam jangka panjang lebih berarti bagi demokrasi. Dan yang terpenting, gerakan sosial moralitas yang memihak pada demokrasi dapat dibangun❑

Mengucapkan terima kasih
kepada Ir. Budi Mangunoto(Kagama Sumut)
Drs. Gde Rai (Bali)
Drs. Suprapto (Kagama Jatim)

Majalah BALAIRUNG UGM

Hartono Ack, Direktur PEDULI AQUA

PEDULI AQUA:

PROGRAM DAUR ULANG MENYELAMATKAN LINGKUNGAN

RATUSAN bahkan ribuan perusahaan ada di negeri ini. Tetapi, dari jumlah yang banyak itu, hanya puluhan yang peduli dengan limbah industrinya. Dari yang sedikit itu, PT AQUA GOLDEN MISSISSIPI (PT AGM), pemroduksi air dalam kemasan, adalah salah satu yang telah memeloporinya. Bentuk konkretnya diwujudkan lewat program PEDULI AQUA.

Lahirnya PEDULI AQUA bermula dari tantangan Prof Dr Emil Salim kala masih menjabat sebagai Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup (KLH). Dalam acara yang diselenggarakan IBWA (*International Bottled Water Association*) di Jakarta, 9 Januari 1993, yang kebetulan AQUA sebagai tuan rumah, Menteri Emil Salim yang menjadi *keynote speaker*nya, berkata dengan nada menantang bahwa ada satu persoalan yang masih harus dipikirkan oleh AQUA, yakni menangani botol-botol plastik yang mengotori lingkungan dan mengganggu keindahan kota.

Oleh Tirto Utomo, pendiri dan pemegang PT AGM, tantangan Menteri KLH yang yang diucapkan dihadapan 130 orang peserta dari 17 negara itu dinilai tidak main-main. Karenanya, ia segera mengumpulkan semua stafnya untuk secara khusus membahasnya.

Hasilnya adalah dilahirkannya program PEDULI (Pengembangan Daur Ulang Limbah Indonesia) AQUA Karena sifat kerjanya yang spesifik, program ini dikelola di luar mekanisme kerja PT AGM. Resmilah pada tanggal 1 Februari 1993, PEDULI AQUA terbentuk dan siap beroperasi dengan kerja-kerjanya.

Untuk menangani program ini ditunjuk Hartono Ack sebagai orang nomer satu yang bertanggung jawab penuh atas kesuksesan program AQUA terbaru itu.

KUMPULKAN BOTOL BEKAS

Apa program pertama yang dijalankan oleh Hartono? Ia punya ide sederhana, tetapi siapa sangka hasilnya menjadi sangat luar biasa. Hartono dan stafnya berpikir tentang bagaimana caranya agar botol-botol bekas AQUA di seluruh Jakarta bisa dikumpulkan dan diproses kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat.

Dalam praktiknya ternyata tidak mudah. Banyak kesulitan yang harus dihadapi. "Bahkan, untuk bisa meyakinkan para pemulung bahwa botol-botol AQUA bekas kini bisa dijual, susahnya sungguh bukan main," kata Hartono. Sebab, memang selama ini di kalangan mereka hanya dipahami bahwa hanya kardus dan kertas saja yang bisa dipulung, sedangkan botol-botol plastik tidak.

Botol-botol yang diambil dari pemulung itu ada dua jenis. Yakni, botol plastik berukuran 1500 ml dihargai Rp 20,00 dan botol plastik berukuran 500 ml dibeli seharga Rp 10,00 per botol. Atau, dalam bentuk kiloan, botol-botol itu dibeli seharga Rp 550,00 per kg. "Hanya dua botol ini memang yang kita beli karena keduanya terbuat dari bahan PET (*Polyethylene Terephthalate*), bahan yang tidak mempengaruhi kualitas dan rasa air," jelas Hartono Ack kepada BALAIRUNG di kantornya Jl. Pemuda Kav. 1449 A Rawamangun Jakarta, Telepon (021) 4759608, 4723101.

Sampai saat ini ada sekitar 500-an pemulung atau *palapak* yang bekerja untuk program PEDULI AQUA ini. Setiap harinya tak kurang dari 1 ton botol-botol plastik bekas AQUA yang bisa ditampung pabrik, untuk kemudian di daur ulang. Jumlah itu masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan pemakaian botol plastik AQUA oleh konsumen yang mencapai 600 ton per bulannya atau 7200 ton per tahunnya. "Padahal, mesin pabrik kami sanggup mengolah lebih dari 8 ton sehari," tandas Hartono Ack.

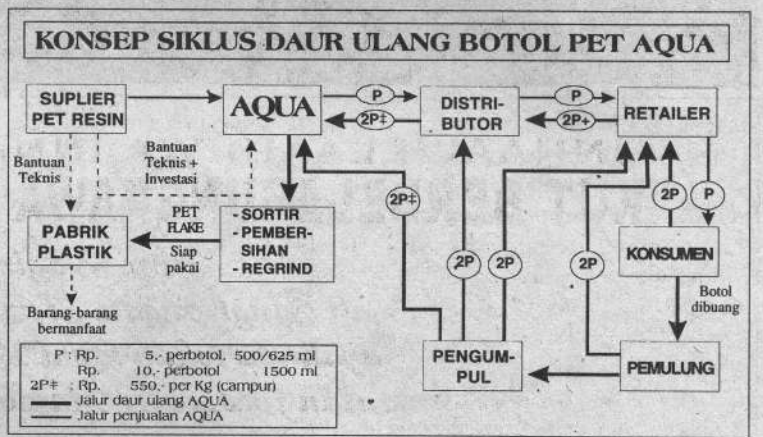

Yang juga menarik, proses dan hasil daur ulang botol AQUA sendiri. Sebab, ternyata diluar sangkaan banyak orang, botol-botol AQUA bekas ini bisa dijadikan bahan utama pembuatan tekstil. Setelah menjadi *flake*, bisa diolah menjadi bahan *spring bed*, pegas, senar, dan kain.

AKSI-AKSI PENGEMBANGAN

Berhasil dengan program pengumpulan botol-botol bekas, PEDULI AQUA terus mengembangkan aksi-aksi pedulinya. Tidak saja sebatas memasuki lingkup industri, tetapi juga ke lingkup sosial dan akademis.

Maka aksi-aksi turun langsung lapangan pun banyak dilakukan. Misalnya, melakukan aksi sosial ke masyarakat pinggiran, khususnya ke komunitas para *palapak*. Untuk pengembangan ke lingkungan akademik, PEDULI AQUA banyak memberikan sponsor kepada kegiatan-kegiatan di perguruan tinggi yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Semua itu dilakukan dalam rangka menyebarluaskan informasi tentang kegiatan kepedulian lingkungan PEDULI AQUA, sekaligus juga untuk mempertahankan *image* positif perusahaan di mata masyarakat.

"Oktober 1995 lalu, kami menjadi salah satu pendukung seminar dan pameran yang berlabel AKRAB LINGKUNGAN yang digelar mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM," ujar Hartono. Sebelumnya, aksi-aksi serupa juga dilakukan. Antara lain, bersama Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia-Jakarta (FK3I) saat mengadakan aksi bersih pantai di Pulau Seribu Jakarta Utara. Atau, bersama Kelompok Pecinta Alam Jakarta melakukan aksi bersih gunung di Pangrango tahun 1994.

SUMBANG DANA MITRA LINGKUNGAN

Selain aksi sosial, PEDULI AQUA juga bekerja sama dengan Dana Mitra Lingkungan, sebuah yayasan yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Kepada yayasan ini PEDULI AQUA menjadi donatur tetap, yang secara suntikan dana secara periodik.

Sampai saat ini, PEDULI AQUA sudah dua kali memberikan sumbangan ke Dana Mitra Lingkungan. Pertama, tahun 1994, dana yang disumbangkan PEDULI AQUA epada Dana Mitra Lingkungan sebesar Rp 200 juta. Kedua, tahun 1996, PEDULI AQUA menyumbang lagi sebesar Rp 600 juta, yang penyerahannya langsung disaksikan Menteri Negara. Lingkungan Hidup, Ir. Sarwono Kusumaatmadja.

Apa yang telah dilakukan PEDULI AQUA ini selayaknya diacungi jempol. Namun, harapannya tentu saja tidak sebatas itu, tetapi bagaimana ini bisa mendorong perusahaan-perusahaan lain untuk juga peduli dengan limbahnya dan lingkungan hidup secara keseluruhan.

Bumi ini adalah tanggung jawab bersama penghuninya. Oleh karenanya, kelestariannya harus dipikirkan bersama. Kalangan industri yang selama ini banyak dituding sebagai pencemar lingkungan seyogyanya bisa membuktikan diri dengan upaya-upaya yang konkret bahwa kepeduliannya terhadap lingkungan juga tinggi. Dengan begitu, nasib bumi ini akan lebih terjamin.

AQUA GOLDEN MISSISSIPI telah memulainya. Siapa akan menyusul?

(Pariwara /Among K. Ebo)

Serah terima dana sumbangan AQUA-DML yang disaksikan oleh Menteri Sarwono Kusumaatmadja dan Ny. Tirto Utomo.

BALAIRUNG ADV.

PADUKA FM 101.6

PURWOKERTO'S REAL FM STEREO

Jl. Dr. Soeparno 65 A Purwokerto 53123 telp. (0281) 38629

INNAALILLAAHI WA INNAAILAIHI RAAJI'UUN

IKUT BERBELASUNGKAWA ATAS MENINGGALNYA

Bp. Wagiman
di Cangkringan, Sleman, Yogykarta
ayahnda rekan kami Kelik Supriyanto
mantan fotografer Majalah BALAIRUNG

Soeratmin Dwijowirjono
di Delanggu, Klaten
ayahnda rekan kami Sri Budyartati
staf Litbang SKM Bulaksumur

Bp. Soleh
di TlogoMas, Malang, Jawa Timur
ayahnda rekan kami Antariksa
reporterSKM Bulaksumur

BPPM UGM

Go ahead.....

PTPN RASITANIA

100.2 FM

MURIA

ISTIMEWA

Yulius Riyantoko
Mantan wakil pemimpin redaksi majalah Psikomedia, Fakultas Psikologi UGM, kini aktif di berbagai LSM

Anda tentu masih ingat kejadian bencana nuklir Chernobyl, Monju, Harrissburg, La Hague dan Hanford? Ngeri, itulah jawaban atas peristiwa itu. Nuklir memang sekilas tampak merupakan suatu gambaran prestise bahkan parameter kehebatan suatu negara. Namun seringkali orang lupa bahwa bencana yang ditimbulkannya bisa memusnahkan umat manusia. Nuklir-sebagai energi dan senjata-tetaplah merupakan proyek mahal dan penuh resiko.

Di Indonesia,tepatnya di Semenanjung Muria, rencananya akan dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir(PLTN). Tentu saja rencana tersebut disambut dengan dua sikap yaitu pro dan kontra.Mereka yang pro mengatakan bahwa energi alternatif yang dipandang cocok adalah nuklir dengan sekian argumentasi lainnya.Sementara yang kontra lebih menekankan pada dampak negatif nuklir terutama setelah mempelajari berbagai kejadian kecelakan atau kebocoran nuklir di berbagai negara di belahan bumi ini.

Masyarakat terlanjur mengidentikkan nuklir dengan bom atom.Akibatnya trauma kengerian melekat erat dalam nurani mereka. Pada sisi lain ada sebuah kenyataan yang mesti diperhatikan untuk kemudian diagendakan, yaitu masih banyak pula masyarakat yang miskin informasi mengenai nuklir. Bahkan tidak tahu apa itu nuklir. Keluguan dan tingkat pendidikan mereka belum bisa mengakses informasi sebanyak-banyaknya tentang nuklir. Hal ini dibaca oleh Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN). Mereka menurunkan satuan tugas (Satgas) pemasyarakatan PLTN Jepara, yang dibentuk berdasarkan SK Bupati Jepara No 671.2/82, 2 Mei 1992. Sayangnya, materi yang disampaikan hanya"iming-iming" manfaat teknologi nuklir. Sedangkan hal yang menyangkut dampak bahaya resiko nuklir tidak dibahas mendalam.

Siapa yang paling berkepentingan atas berdirinya PLTN nanti? Seandainya benar akan didirikan,maka manfaat PLTN paling banyak dinikmati oleh para pengusaha besar. Karena industri-industri mereka membutuhkan sumber energi yang besar untuk menjalankan proses produksinya. Ini jelas merupakan hitungan besar dari segi pemasukan uang bagi negara (pandangan dari pembangunan PLTN).

Belajar dari pengalaman dan sejarah ada baiknya dicermati sebagai upaya preventif agar nantinya tidak ada kejadian saling tuding.Salah besar jika menempatkan tenaga nuklir sebagai prioritas.Indonesia masih kaya dengan berbagai sumber energi yang aman seperti panas bumi, batubara, gas alam dan air, angin, surya. Siapa yang akan bertangggung jawab atas bencana yang akan terjadi bila nantinya ternyata PLTN malah berdampak negatif? Jadi pembangunan PLTN berimplikasi luas. Pertanyaan yang lebih essensial adalah benarkah teknologi nuklir Indonesia sudah tinggi dan mampukah mengatasi segala permasalahan yang bakal timbul baik sebelum,proses maupun sesudah pembangunan PLTN?

Biaya yang tinggi untuk pendirian, pengoperasian dan pemeliharaan PLTN pastilah ditopang dengan hutang dengan luar negeri. Ini akjan menyebabkan ketergantungan terhadap fihak lain. Seorang teman pernah mengatakan begini:"Bikin mobil saja belum bisa, kok mau bikin nuklir memangnya segampang bikin kacang atom? "Terdengar nada pesimis memang.Namun coba kita renungkan kemampuan teknologi Indonesia di bidang nuklir ini.

Masyarakat Muria tentu menginginkan kehidupan yang semakin baik. Tetapi bila proyek PLTN tetap dilaksanakan maka keinginan tersebut tinggal sebuah impian manis tanpa realisasi. Seharusnya lebih banyak lagi fihak yang diajak berdialog. Kalangan agama, pemuka masyarakat, LSM, intelektual dan rakyat. Disitu dibicarakan tentang segi positif dan negatif secara terbuka dan tanpa manipulasi data dan fakta.

Pernah suatu media massa mengupas tentang bahaya nuklir. Digambarkan terutama masalah radiasinya yang bisa menimbulkan efek somatis dan efek genetis. Efek somatis berkaitan dengan tubuh. Misalnya kulit gatal, kering, kemerahan dan rambut rontok, gejala sakit pada hepar, ginjal, kantung kemih.Sedangkan efek genetis berhubungan dengan alat-alat reproduksi dan bisa menurun ke keturunannya. Misalnya kemandulan, mutasi gen. Dampak lain yang tidak bisa dibilang kecil adalah dampak psikologis,dimana masyarakat hidup dalam kondisi traumatis dan gampang curiga(*paranoid*). Akibat-akibat seperti tersebut diatas mestinya perlu dipikirkan.

Sebelum semuanya terjadi, lebih baik mengkaji ulang rencana pembangunan PLTN Muria. Masih banyak sumber energi lain yang bisa dikembangkan. Jangan bebani anak cucu kita, para generasi muda depan dengan radiasi dan hutang luar negeri.biarkan masyarakat Muria hidup wajar. Dan ketika malam mereka bisa tidur tanpa cemas besok digusur atau tidak sempat lagi mendengarkan nyanyian alam sekitarnya. Bukankah pembangunan sebenarnya ditujukan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat? Yang jelas rakyat sudah kapok hidup susah dan ditindas serta ditakut-takuti. Biarlah mereka menjadi lebih cerdas dari waktu-waktu sebelumnya.Indonesia tidak akan turun pamornya hanya karena tidak punya PLTN ❑

Romansa Perempuan-Perempuan 'BUEN'

Stigma dan tuduhan masyarakat yang ditimpakan pada seorang narapidana kadang begitu memojokkan mereka ke dalam kubangan hitam pekat tiada batas. Terlebih lagi bila yang menyandang label narapidana tersebut adalah seorang wanita.

Masyarakat kita, yang terkenal sopan dan ramah meski kadang lebih merupakan basa basi belaka- terlanjur menstigmasi status narapidana tanpa mau melihat latar belakang penyertanya. Stigmasi ini akan semakin menjadi ketika si penyandang gelar tersebut adalah seorang kaum Hawa. Siapa yang salah? Sulit untuk menjawabnya.

Bagaimanapun, wanita adalah sosok yang sangat peka terhadap penilaian dari dunia sekelilingnya, karena peran dan keberadaannya yang begitu kentara dan sangat mengakar dalam kelangsungan kehidupan ini. Tanpa wanita apa jadinya warna dunia ini. Sulit untuk dibayangkan.

Toh demikian, saat wanita jatuh dalam kekhilafan yang membuatnya bertindak salah, dan masuk ke padepokan 'buen' (penjara), tanggapan pun akan segera beruntun dan merebak, bak serbuan lalat pada tumpukan sampah busuk.

Ada banyak jalan mengantarkan seseorang masuk dalam lingkaran 'dosa'. Saat realitas hidup menguji ketegaran seseorang, ada kalanya justru ketabahan hati menjadi rentan, dan si empunya menjadi terpuruk masuk dalam kubangan derita, akibat ketidakberdayaanya bertahan pada jalan yang lazim dan benar.

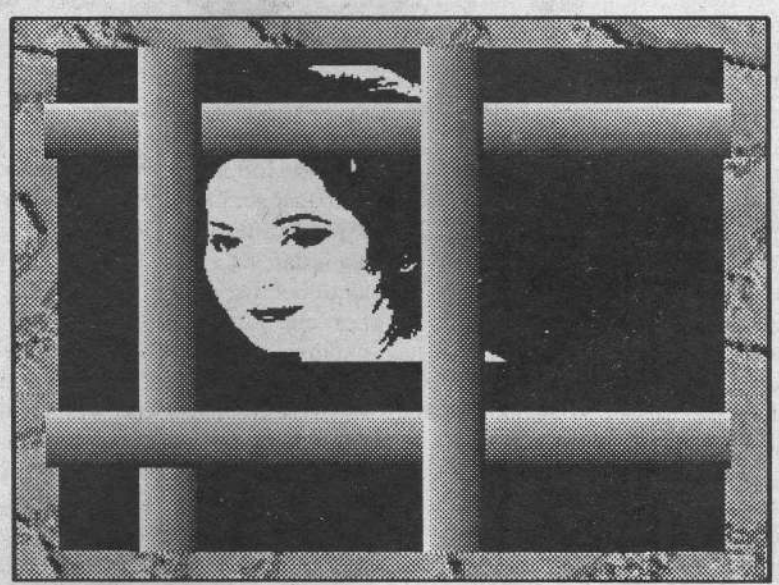

Agung

Tidak berbuat salah dalam hidup, adalah sesuatu yang tidak mudah dilakukan. Kekhilafan dapat menimpa siapa saja, tak peduli jenis dan macam manusianya.

Dan saat ini, banyak wanita yang menjalani 'pertapaan' di lembaga pemasyarakatan, karena suatu perihal kekhilafan yang diperbuatnya.

Segolongan kaum wanita ini hidup dalam 'proses pertobatan' yang diawasi, yang menjadikan dirinya tidak dapat menikmati kesegaran udara di dunia bebas, dan harus rela mengikhlaskan kepergian hasrat dan perannya, selama dalam perjalanan lakunya di balik tebalnya tembok bui.

Menjadi seorang narapidana wanita, adalah kisah tersendiri yang sulit dibandingkan dengan kisah-kisah

pengasingan yang lain, karena justru seorang perempuanlah yang menyandangnya. Lebih banyak beban persoalan dan masalah yang harus ditanggung olehnya. Penjara bukanlah sekedar tempat 'pemasyarakatan' ataupun 'pertapaan' bagi mereka. Terpenjara bagi seorang wanita merupakan biji penderitaan yang tumbuh dan membuahkan penderitaan yang beranak pinak.

Adalah Suwiji (bukan nama sebenarnya), usia 44 tahun, ibu rumah tangga berputra enam, seorang narapidana asal Wonosobo yang menjalani hukumannya di LP Wanita Semarang karena kasus pembelian uang palsu. Dari masa hukuman 5 tahun, Bu Suwiji baru menjalani hukuman selama 16 bulan. "Saya sebenarnya hanya ingin membantu perekonomian keluarga yang selama ini kekurangan. Kasihan suami saya, ia tidak mengerti apa sebenarnya perbuatan saya", ujarnya ketika BALAIRUNG menanyakan motivasi yang melatarbelakangi tindakannya. Bagi wanita jebolan sekolah menengah ini, menjalani hidup di penjara mendatangkan rasa berdosa, lebih dari sekedar kesalahan yang telah diperbuatnya. Ia merasa jauh terpuruk dari keluarga yang dicintainya, meski sebulan sekali kadang dibesuk. Terutama dengan anak-anaknya, ia merasa sangat bersalah karena tak dapat melihat dan mendampinginya setiap saat. "Saya sangat menyesal tak dapat hidup di antara mereka, yang juga merupakan tanggung jawab saya, dengan suami saya juga merasa bersalah".

Perasaan semacam itu tentulah bukan hal ringan bagi seorang ibu. Hati seorang ibu selalu tak kan terpisah dari anak yang menjadi buah hatinya. Dari hari ke hari kerinduannya untuk kembali ke rumah semakin bertumbuh. Ia sangat berharap, agar masa tahanannya cepat berakhir.

Kisah yang lain adalah penuturan dari Tukiah (nama samaran), wanita setengah baya, seorang narapidana dari LP Wirogunan Yogyakarta. Ibu dari dua anak asal Kulon Progo itu sudah 19 bulan menjalani pembinaan di LP Wirogunan. Meski di dalam penjara ia mendapat banyak kegiatan, pembinaan rohani, dan hampir semua waktunya terisi, ia selalu terbayang oleh rasa malu yang besar kepada semua teman dan saudaranya. "Atas kasus yang menjadikan saya di sini, saya begitu merasa malu kepada tetangga dan saudara. Mereka tak pernah menjenguk saya, hanya suami dan anak saya yang sesekali masih mau membesuk saya".

Krisna

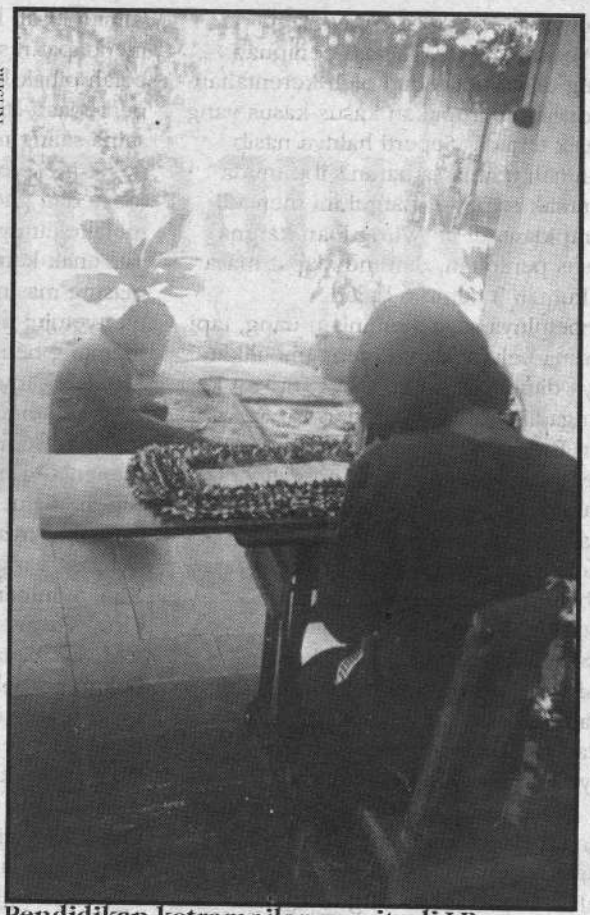

Pendidikan ketrampilan wanita di LP

Sekedar menutup rasa malu?

"Sebenarnya saya hanya pinjam uang, tapi saya belum bisa mengembalikan, karena uang itu pun tak cukup untuk membayar bunganya. Dan ketika waktunya tiba, saya diajukan ke pengadilan dan dituduh melakukan penipuan. Sama sekali saya tak pernah membayangkan kalau saya akhirnya sampai ke sini", begitu ia menuturkan dengan lirih. Untuk pulang ke rumah sebenarnya ia masih belum bisa mengabaikan suara-suara sumbang yang akan datang dari orang-orang sekelilingnya. "Terus terang, saya belum siap menghadapi kenyataan pahit yang akan saya jumpai bila bebas nanti".

Kebutuhan dan tekanan hidup yang begitu berat dirasakan, ternyata mampu membuat seseorang menjadi larut dalam ketakberdayaan, dan sekaligus menjadikannya beringas dalam menyampaikan protes jiwa yang tertekan. Namun sayangnya, apa yang mereka anggap sebagai jalan keluar justru mengantar mereka ke dalam sebuah situasi yang menyebab-

Krisna

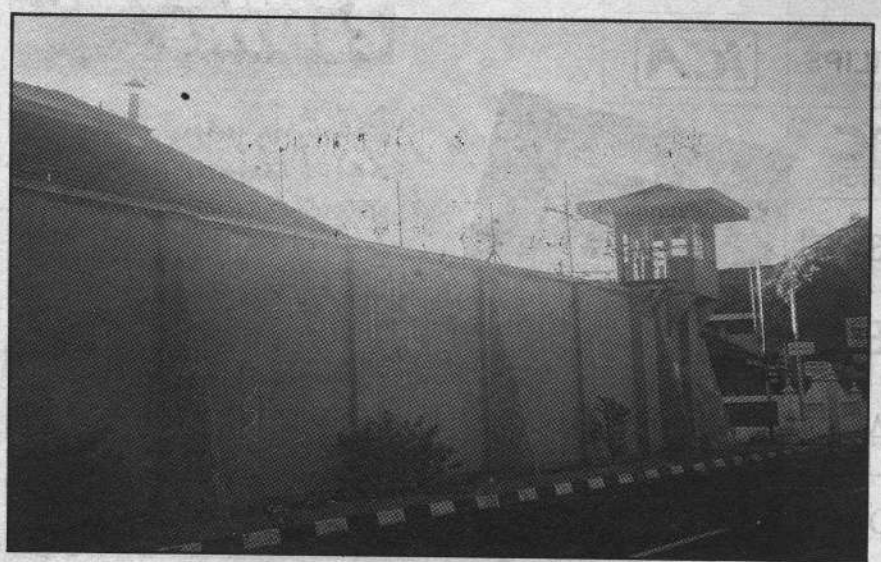

Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta

Di sini banyak wanita menjalani 'proses pertobatan'

kannya lebih tidak berdaya lagi.

Agaknya, kasus-kasus penipuan yang dilatarbelakangi oleh kerentanan ekonomi merupakan kasus-kasus yang klasik terjadi. Seperti halnya nasib Juminah (nama samaran), ibu muda beranak satu asal Bantul ini menjadi narapidana di LP Wirogunan karena kasus penipuan, dan mendapat masa hukuman 3 tahun 6 bulan.

"Sebetulnya saya meminjam uang, tapi karena belum dapat mengembalikan saya dituduh menipu dan diajukan ke pengadilan". Berbeda dari Bu Suwiji dan Bu Tukiah, Bu Juminah ini telah mempunyai rencana yang lebih mantap bila ia bebas kelak karena nasibnya yang sedikit lebih baik. "Saya akan meneruskan usaha saya sebelum dipenjara yaitu usaha katering",katanya ketika ditanya mengenai rencana setelah keluar. Namun buru-buru ia menambahkan, "Tapi saya tidak tahu apakah akan tetap laris seperti dulu. Sekarang, saya kan seorang narapidana".

Sekarang, lain halnya dengan kisah yang dialami Suminem (juga bukan nama sebenarnya), 19 tahun dan belum menikah, sedang menjalani hukuman di LP Wanita Semarang dengan masa hukuman 2.5 tahun. Nasib yang dialami gadis jebolan sebuah akademi tahun pertama ini memang cukup tragis. Bermula dari jalinan kisah kasihnya yang tidak mendapat restu dari orang tua kedua belah pihak karena masalah perbedaan status sosial. Karena sama-sama saling mencintai, kedua sejoli itu nekat melakukan hubungan pra nikah. "Saya dan pacar saya nekat melakukannya karena kami berharap, bila anak kami lahir, orang tua kami masing-masing akan luluh dan menyetujui hubungan kami". Namun, memang benar bahwa impian tak seindah kenyataan. Orang tua yang diharapkan akan menjadi luluh malahan semakin marah dan menentang hubungan tersebut. Karena kalut dan bingung, jalan pintas pun akhirnya ditempuh. Bayi tak berdosa yang menjadi korbannya. Kini, Suminem hanya bisa berpasrah diri. "Pacar saya sekarang kuliah di AAL Surabaya, dan sampai sekarang belum pernah menjenguk saya di sini, malu mungkin. Kalau keluarga datang tiap bulan sekali", ujarnya sendu. Walau demikian ia tetap optimis dalam memandang masa depannya. "Kalau untuk melanjutkan kuliah saya sudah nggak niat lagi. Saya pengin kerja saja, saya nggak akan peduli dengan omongan orang yang mencemooh saya, cuek saja".

Dari kenyataan yang ada, ternyata wanita dari masyarakat kelas bawahlah yang justru banyak menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Dan kasus-kasus yang diperkarakan pun adalah perkara-perkara yang begitu lekat dengan kehidupan kelas bawah; kemiskinan, keterbelakangan,yang merupakan akar pangkal kesenjangan sosial. Banyak pencurian dan penipuan yang dilakukan seorang wanita karena rasa tanggung jawabnya terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga.

Perjuangan hidup yang keras dan begitu menghimpit dalam alam bebas saja sudah membuat mereka sesak nafas dan tak leluasa bergerak, apalagi saat mereka harus memperjuangkan hidup dari balik jeruji penjara, yang jelas lebih tertutup dari dunia bebas.

Untuk kesekian kalinya kisah-kisah pilu kehidupan terlukis dalam bentangan realitas. Seringkali kita tak dapat terharu, dan lebih mudah untuk memaklumi dan mendiamkannya. Terlebih lagi, kita menjadi enggan untuk sekedar menatapnya, bukan lantaran karena kita bebal, melainkan kepedulian kitalah yang telah tumpul dan menjadi kedap oleh persaingan hidup yang menuntut kita mengerjakan yang penting-penting saja untuk sebuah kepentingan tertentu❑

F Indirasari

Laporan : Nining, Anjar, Arifin, Aris

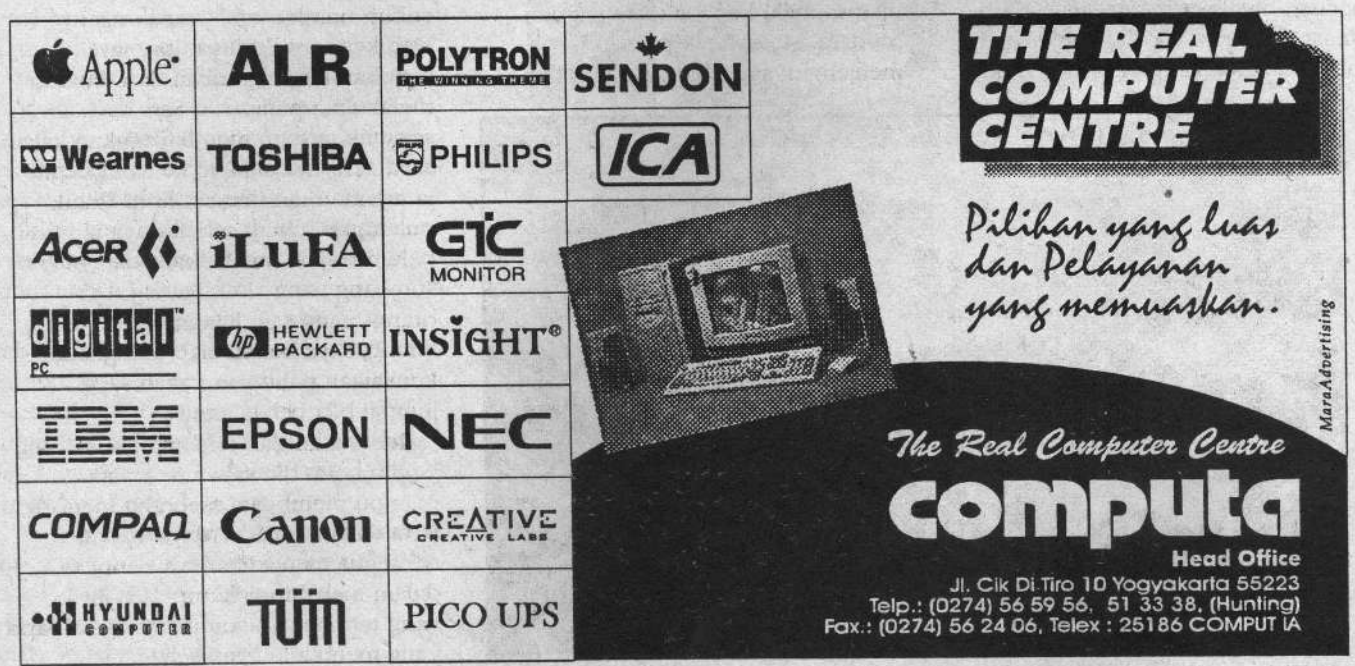

Kampanye Prematur

Sumu

Saat cat-cat kosmetika politik mulai dilaburkan.
Entah mengapa langit di atas Jawa Tengah
hanya kuning warnanya.
Pepohonan, pagar halaman, vas bunga,
batu nisan, bahkan keranda.
Memantul sendirian warna itu di sana.
Mengangkang dengan paras nan dureksa.

Krisna

Kelik

Berjaga buat siapakah kosmetika ini, sayangku?
Kulihat wajahmu makin miskin pesona dan wagu
Padahal waktunya masih ranum untuk dimulai
Hari juga masih sore, adalah saat enak untuk bersantai
Namun kau pergi begitu tergesa-gesa
dengan polesan muka warna seroja
dan melupakan arti seikat estetika

Sunu

Apalah jadinya nanti, sayangku
Saat engkau menjadi asing pada agama dan keindahan
sebab di padang pesta kurusetra
dengan lantang engkau harus berkata:
Agamaku adalah partai.....

Foto : Tri Wasono Sunu, Achmad Krisna, Kelik Supriyanto
Narasi : Hary Prabowo

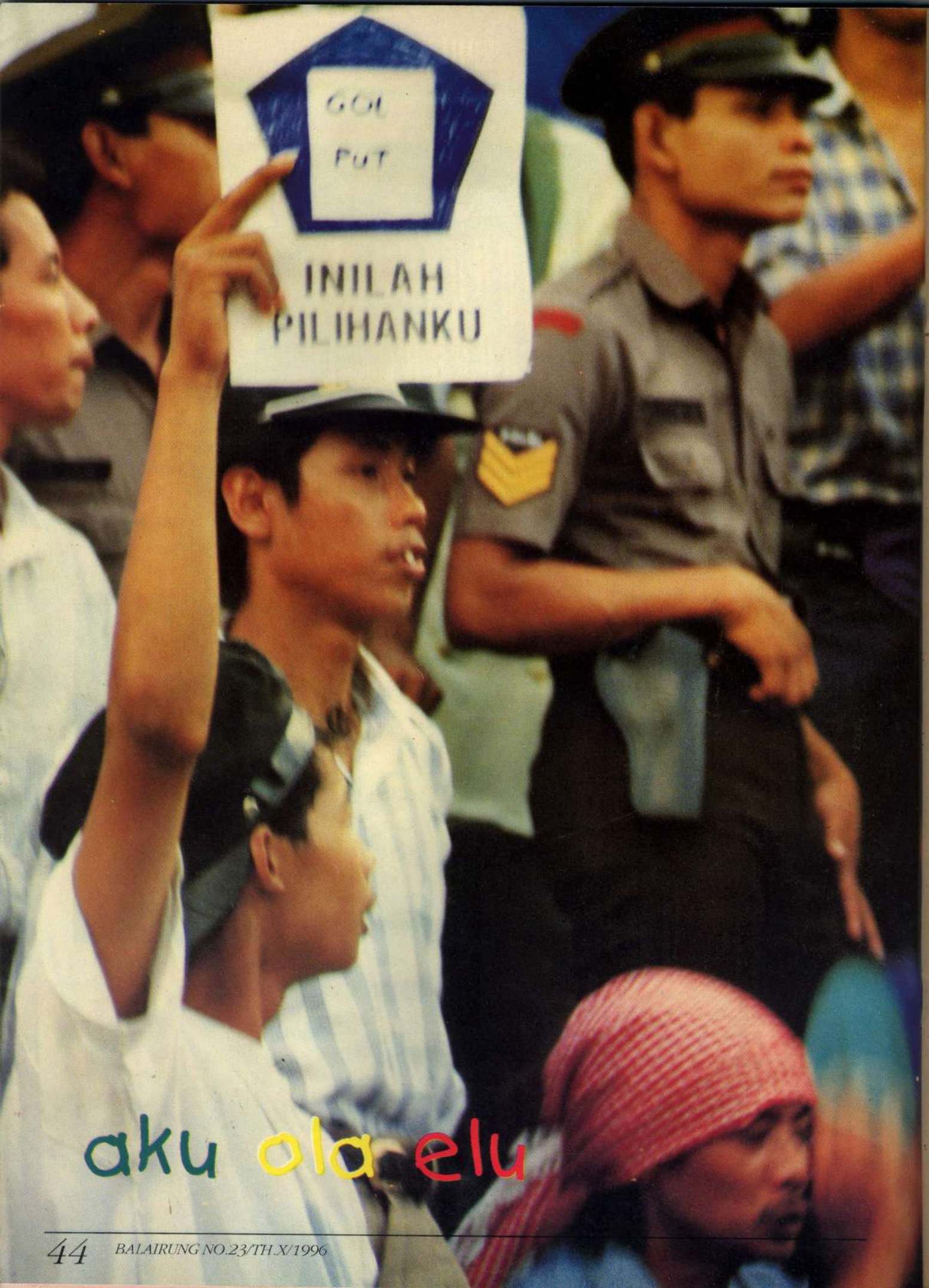
GOL
PUT
INILAH
PILIHANKU
aku ola elu

Kampanye Pelestarian Lingkungan di Indonesia

Potret Kesadaran Masyarakat Negara Berkembang

Dikeluarkannya Surat Keputusan Presiden No. 23 Tahun 1994 tentang berdirinya Bapedal berarti dimulainya babak baru pembangunan lingkungan hidup di negri ini. Tetapi betulkah momentum ini berarti menjadi awal dari keberhasilan penyadaran masyarakat tentang lingkungan hidup yang berkeseimbangan?

Tepat tiga hari menjelang umat manusia merayakan 'pesta' hari bumi 22 April 1996, Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia mengumumkan hasil audit lingkungan untuk PT Freeport, sebuah perusahaan asing yang mengusahakan penambangan bijih tembaga di Irian Jaya. Dilakukannya audit lingkungan ini merupakan peristiwa penting dalam pengelolaan alam lingkungan di Indonesia, mengingat PT Freeport selama ini dituduh telah menimbulkan kerusakan secara biogeofisik maupun sosial di Irian Jaya. Sehingga selain terganggunya ekosistem Sungai Aykwa, memunculkan pula persoalan-persoalan sosial menyangkut Suku Amungme, Dani dan suku lain di daerah Timika, tempat PT Freeport berada. Berkaitan dengan itu pakar ekologi Prof. Dr. Otto Sumarwoto pun berkomentar, mudah-mudahan kasus PT FI akan menjadi contoh sehingga makin banyak perusahaan yang mau melakukan hal serupa. Dengan demikian PT FI yang kini menjadi bulan-bulanan kritik dan kecaman akan meletakkan tonggak sejarah kemajuan dalam pengelolaan lingkungan. Sedemikian pentingkah sebenarnya sehingga usaha-usaha penyadaran manusia akan pelestarian lingkungan hidup sangat dibutuhkan akhir-akhir ini? Sehingga peristiwa sebuah audit lingkungan pun sempat dianggap hal yang luar biasa bagi pencapaian usaha menjaga lingkungan hidup tetap lestari.

Transformasi masyarakat dari agraris, pra-industri, industri dan pasca industri barangkali memang menuntut konsekuensi manusia untuk memikirkan teknologi perlindungan lingkungan, perangkat hukum yang mengaturnya, dan cara-cara efektif untuk meningkatkan kesadaran manusia itu sendiri, sejalan dengan tahap-tahap transformasi masyarakat itu sendiri. Sejauh mana usaha-usaha itu telah dilakukan manusia sehingga bumi satu-satunya milik manusia tidak keburu rusak? Indonesia yang akan menghadapi kecenderungan ekonomi-politik global maka mau tak mau kini dihadapkan pada persoalan pencemaran lingkungan, penurunan ragam sumber daya alam hayati, dan transformasi sosial masyarakat dengan ciri khas negara berkembang.

Meskipun undang-undang tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup telah digulirkan sejak 1982 melalui UU No.4 tahun 1982 secara kelembagaan Indonesia baru membentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) sejak tahun 1990, yang bertugas mengemban fungsi dan kegiatan pengendalian dampak lingkungan yang timbul akibat aktivitas industri yang terus meningkat di Indonesia.

Berkaca pada negara maju seperti Amerika serikat, sejarah penyadaran tentang pentingnya lingkungan hidup yang berkeseimbangan pun barangkali juga menemui jalan berliku. Senator Gaylord Nelson, pada masa pemerintahan presiden Jhon F. Kennedy harus menunggu delapan tahun untuk berjuang mengenalkan masalah konservasi dan lingkungan ke seluruh Amerika, dia bertemu dengan berbagai organisasi masyarakat mulai dari yang paling bawah serta kampanye ke para pelajar dan mahasiswa. Tetapi itulah hasil jerih payah yang harus ia peroleh. Majalah *American Heritage Magazine* yang dikutip Kompas menuliskan, Bayangkan lebih 10 persen penduduk Amerika Serikat telah berdemonstrasi untuk meminta pemerintah mengubah kebijakannya dan mendukung kebijakan yang melestarikan lingkungan. Gaung hari bumi sendiri sebagai sebuah momentum untuk lebih peduli pada kondisi lingkungan hidup, meskipun bukan satu-satunya telah masuk ke Indonesia.

Sudah efektifkah program penyadaran pelestarian lingkungan hidup, sebagai bagian dari pembangunan lingkungan atau pelestarian lingkungan di Indonesia? Prof. Dr. Sugeng Martopo, peneliti senior di Pusat Penelitian Lingkungan Hidup UGM mengungkapkan kepada Hendrik dan Naufal dari BALAIRUNG,"Usaha-usaha yang dimulai sejak tahun 1972 itu jelas telah terlihat hasilnya. Anda bisa melihat semakin meningkatnya kepedulian dan rasa memiliki terhadap lingkungan oleh masyarakat dan semakin tumbuh dan berkembangnya LSM-LSM yang concern terhadap pelstarian lingkungan di Indonesia". Menurut Prof. Sugeng Martopo, sesuai pasal 9 UU No. 4/1982 pemerintahlah yang sebenarnya berkewajiban aktif menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggungjawabnya dalam pengelolaan lingkungan hidupnya.

Berkaitan dengan pencapaian Bapedal (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan) sebagai badan pelaksana program-program pelestarian lingkungan hidup di Indonesia, Dra. Liana Bratasida, M.S., direktur pengembangan teknis Bapedal yang ditemui Pedy Artsanti dari BALAIRUNG, mengungkapkan bahwa untuk menilai keberhasilan program pelestarian lingkungan di Indonesia tidak bisa dinilai secara keseluruhan. Dari program barangkali belum semua aspek dapat terlaksana. Tetapi secara kelembagaan Indonesia telah berhasil mendirikan lembaga BAPEDAL, sehingga program-program pelestarian lingkungan dapat dilaksanakan secara terencana. Sementara Bapedal sendiri mempunyai strategi yang dutujukan kepada upaya mengembangkan penataan lingkungan, meningkatkan kapasitas kelembagaan dan membina kemitraan dengan masyarakat. Kemudian Bapedal sendiri telah membuat banyak program, seperti pengembangan sumber daya manusia, pembinaan dan pengembangan laboratorium lingkungan, pengembangan program Ekolabel, program Kali bersih, Proper Prokasih, program langit biru, program Adipura, program pinjaman lunak lingkungan, OECF-PAE, Produksi bersih, Pengendalian Kerusakan lingkungan, Pengendalian Dampak Kegiatan, Skala Kecil Pengendalian Pencemaran Laut dan pesisir, Pengelolaan Limbah Bahan Berbahayadan Beracun dan Amdal. Tetapi apakah kesemua program itu dapat menyentuh kesadaran masyarakat dan dapat menjawab persoalan lingkungan hidup modern? Ternyata tidak demikian. Seperti halnya program Adipura kini ditengarai banyak pihak hanya menyentuh kesadaran masyarakat untuk sekedar meraih hadiah kebersihan semata, sementara justru meninggalkan aspek konservasinya.

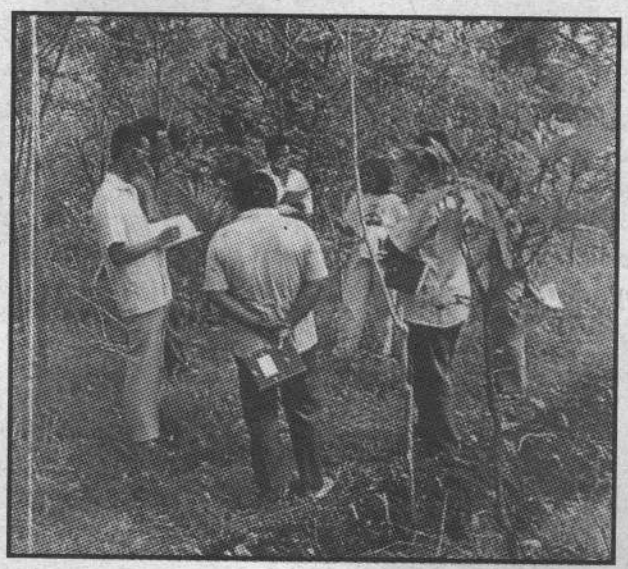

dok. PPLH Seloliman

Program pendidikan lingkungan dewasa, di Indonesia mereka masih layak untuk sadar

Kasus kerusakan lingkungan di Indonesia sebagai akibat aktivitas manusia menurut Prof. Dr. Sugeng Martopo menolak untuk memisah antara pelaku masyarakat dan industri dalam menimbulkan kerusakan lingkungan. Menurutnya peningkatan pencemaran misalnya dapat terjadi karena adanya peningkatan permintaan konsumen. Pendapat ini agak berbeda dengan Dra. Emy Hafidz seorang Direktur Eksekutif WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Jakarta. Menurutnya kerusakan lingkungan di Indonesia ada dua kategori penyebab. Pertama yang dilakukan oleh masyarakat kelas bawah dan kedua masyarakat elit, pemilik HPH dan industriawan. Keduanya harus diperlakukan terpisah. Yang masyarakat kelas bawah memang perlu dilakukan bimbingan intensif, tetapi sayangnya kementerian lingkungan hidup di Indonesia itu fungsinya hanya koordinasi."Sehingga kalaupun banyak poster ajakan tetapi tidak ada solusi ya tidak ada artinya. Jangan dibandingkan dengan di luar negri, karena di sana seluruh infrastruktur telah ada, sementara di Indonesia tidak. Di sana pemerintah telah menyediakan sarana pendukungnya, sehingga masyarakat pun siap. Seperti sekarang WALHI gencar mengan-jurkan daur ulang sampah tapi mau di daur dimana, tahun lalu WALHI bekerjasama dengan pemerintah DKI tetapi sampai sekarang tidak pernah terlaksana", ungkapnya kepada Amalinda dari BALAIRUNG. Masalah dana barangkali memang menjadi kendala bagi upaya-upaya penyadaran pelestarian lingkungan di negara dunia ketiga seperti Indonesia.

Kepada pelaku perusakan lingkungan dari kalangan elite sangsinya tidak hanya kepada pemilik HPH atau industriawan semata, tetapi juga diberi kekebasan kepada masyarakat untuk menilai, sehingga ada transparansi. Dan ini juga mewujudkan sistem kehidupan yang demokratis sehingga masyarakat dapat melakukan kontrol sosial terhadap kasus pencemaran lingkungan. Tetapi dengan kondisi demokrasi tertutup seperti di Indonesia sekarang ini khan masyarakat dalam posisi lemah. Sekarang khan kalau HPH melakukan pencurian kayu sementara pemerintah tidak mengungkapkannya masyarakat tidak akan tahu kasusnya.

Bagi Emy Hafidz kampanye pelestarian lingkungan hidup adalah tugas semua pihak. Kita tidak bisa membebankan pada kementrian lingkungan hidup, karena sebenarnya kementrian lingkungan hidup tidak punya implementing power, mestinya departemen penerangan. Tetapi kalau departemen penerangan hanya sibuk menjelaskan posisi pemerintah, sibuk menjelaskan agar masyarakat tidak protes, sibuk menjelaskan apa itu hak

azasi manusia dalam arti Indonesia, jelas tidak proporsional. Sekarang itu khan menteri penerangan hanya sebagai corong pemerintah untuk mengidoktrinasi masyarakat, sebenarnya dia yang yang melakukannya, ide bisa dari menteri lingkungan hidup, tetapi departemen penerangan lah yang melakukanya. Tetapi yang terjadi sekarang departemen penerangan hanya bidang politik yang menjadi prioritas utama programnya. Sebenarnya ada bidang-bidang lain yang menjadi tugasnya. Departemen penerangan khan punya fasilitas untuk menjangkau desa-desa.

Sementara itu di Indonesia muncul trend penguasaan informasi, sebagai alat pembangun opini masyarakat. Misalnya dalam kasus pembangunan PLTN (pembangkit Listrik Tenaga Nuklir) di Indonesia maka pihak yang akan menjadi pelaksana pembangunan PLTN diberi kebebasan untuk membikin seminar tentang hal-hal positif dari PLTN, tetapi pihak yang tidak setuju PLTN tidak diberi kebebasan menyelenggarakan forum pembelaan. "Ini khan suatu ketimpangan informasi, atau upaya membatasi dan membuat ketertutupan pers. Seharusnya WALHI Blo Forum itu melakukan counter terhadap informasi yang di bikin PWI misalnya, tetapi kita tidak mampu, kita tidak punya dana. Yang bisa kita lakukan adalah mengajak temen-teman pers untuk mengcover pemberitaan tentang HPH (Hak Pengusahaan Hutan), tentang PLTN dan lain sebagainya. Dan untungnya institusi pers sangat gigih", kilahnya.

Dra. Liana Bratasida, sebenarnya mengakui bahwa dalam pelaksanaan program-program pelestarian lingkungan tidak bisa menghindari berbagai bentuk kolusi atau usaha untuk menyuap. Hal ini berkaitan dengan misalnya pelaksanaan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dari suatu industri tidak menutup kemungkinan munculnya oknum-oknum yang berusaha menyuap agar hasil studi AMDALnya positif. Hal ini pula yang menjadi kendala bagi program-program Bapedal lain, seperti Ekolabel, Proper Prokasih dan lain sebagainya.

dok. PPLH Seloliman

Program pendidikan lingkungan untuk anak-anak di PPLH Seloliman

Berbeda dengan Bapedal, Walhi sebagai salah satu LSM yang banyak bergerak di bidang lingkungan di Indonesia barangkali mempunyai sesuatu yang ingin dicapai dari upaya-upaya penyadaran ini. Bagi WALHI yang diinginkan adalah terbentuknya *civil society*, terbentuknya masyarakat yang mempunyai kemandirian tentang kesadaran pelestarian lingkungan hidup. Juga masyarakat yang memiliki keberanian dan pengetahuan yang cukup untuk melakukan advokasi terhadap pelanggar program pelestarian lingkungan. Walhi tidak hanya sekedar bicara pencemaran semata atau pentingnya sanitasi. Untuk sekian tahun ke depan Walhi akan mengurangi aktivitas penyadaran, tetapi berupaya meningkatkan upaya-upaya dalam aspek *awarenes*. Dari aspek ini nantinya diharapkan menjadi suatu kekuatan. Yaitu upaya-upaya untuk untuk mengangkat kasus-kasus yang menyangkut rakyat kecil, memberikan hak-hak pendidikan politik masyarakat, dan ini barangkali menjadi bagian dari upaya demokratisasi di negri ini.

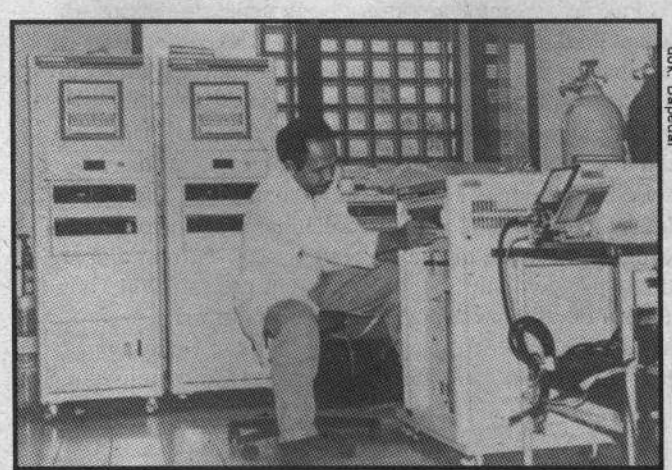

dok. Bapedal

Teknologi perlindungan lingkungan di Bapedal, cukup canggih

Di sisi lain Ir. Iskandar Zulkarnain Direktur WALHI pusat berkaitan dengan penanaman kesadaran untuk menciptakan lingkungan hidup yang berkeseimbangan dari masyarakat sempat melontarkan ide untuk mendirikan sekolah pendidikan lingkungan. Barangkali berbeda dengan lembaga pendidikan serupa yang sudah ada seperti dikenal adanya Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH), Seloliman Trawas Jawa Timur, ide Iskandar Zulkarnain adalah mendirikan sekolah formal yang barangkali mempunyai kurikulum yang mempunyai banyak muatan tentang penyadaran pelestarian lingkungan ini.

Meski demikian hendaknya harus ada upaya untuk membuat spesifikasi untuk masing-masing lembaga pendidikan lingkungan agar terjadi sinkronisasi antara program Bapedal dan kurikulum lembaga pendidikan lingkungan. PPLH Seloliman misalnya, untuk *short course*-nya mempunyai materi pengenalan tentang ekosistem hujan tropis, pertanian ekologis, pengelolaan sampah, hukum lingkungan, ekologi pedesaan, ekonomi lingkungan, etika lingkungan, pencemaran lingkungan sampai pengenalan AMDAL. Usaha PPLH Seloliman ini jelas sangat membantu program Bapedal yang mempunyai kebijakan ke skala nasional.***

Lais Abid

laporan: Amalinda Savirani, Pedy Artsanti, M.Naufal, Hendrik FS.

TENTARA

Kata-kata arif lagi bijak, acapkali muncul dari para tetua. Bagi pejabat menjelang pensiun atau setelah pensiun, kearifan ini sering muncul. Mungkin ini kristalisasi dari pengalaman atau bisa jadi karena tak peduli lagi akan kepentingan.

Hal itu berlaku bagi Jenderal Purnawirawan Edy Sudradjat. Menurut Pak Edy, penggunaan pendekatan keamanan untuk menangani kasus-kasus yang berakar pada permasalahan sosial dan ekonomi harus ditinggalkan. Karena selain tidak populer, justru akan menimbulkan kemarahan masyarakat dan tuduhan pelanggaran hak-hak asasi manusia.

Rasanya ganjil, usulan seperti itu keluar dari seorang jenderal (walau sudah pensiun).Rupanya Pak Edy prihatin, melihat tindakan yang dilakukan militer dalam menangani beberapa kasus demonstrasi. Tewasnya sejumlah demonstran di Ujungpandang, menambah catatan buram kebrutalan militer di masa damai.

Peristiwa itu jelas-jelas menyulut kemarahan mahasiswa. Lebih-lebih mendengar pernyataan dari jenderal yang lebih muda dari Pak Edy, bahwa mereka tewas karena tercebur ke kali tatkala desak-desakan dengan tentara. Padahal, ditemukan darah bercipratan diruang-ruang kelas. Peluru berserakan dan dua panser menghambur masuk kampus. Selain sejumlah mahasiswa tewas, sebagian dirawat di rumah sakit, dan beberapa diantaranya menderita amnesia. Dalam suasana duka, muncul pernyataan lagi, bahwa penggerak demonstrasi akan diusut dan ditindak sesuai hukum. Pernyataan itu merupakan cermin sebuah arogansi, bahwa tentara tak pernah salah. Sipillah yang selalu dituduh bikin kerusuhan.

***

Ketegangan antara militer dan sipil ada sejarahnya. Walaupun keduanya punya satu cita-cita, namun sejak awal pola pikir yang digunakan sudah berbeda. Tentara dilatih untuk memukul dan mengalahkan lawan. Sedangkan intelektual sipil dididik untuk berdiskusi dan berdiplomasi.

Pada waktu Aksi Militer Belanda ke dua, 19 Desember 1945, Jendral Sudirman memilih untuk bergerilya melawan balatentara NICA. Sedangkan Soekarno memilih tinggal di Gedung Agung dan tentunya ditangkap oleh Belanda.Tentara (laskar rakyat yang terorganisi) waktu itu mungkin bisa berkata, "Kami siap melindungi Bapak, marilah ikut kami bergerilya". Soekarno tidaklah nervous untuk gerilya. Dia memilih jalan diplomasi, sebab Jenderal Spour yang menghendaki nyawanya akan dengan mudah menembaknya, dengan alasan teroris bila dia berangkat gerilya.

Kemudian sejarah mencatat keduanya punya peranan penting. Soekarno, Hatta, Agussalim, tetap saja berpolitik di pengasingan. Sedangkan Tentara berhasil mempermalukan Belanda, di mata dunia lewat Serangan umum 1 maret, 1949. Soekarno, dari Bangka memerintahkan Mohammad Roem untuk berunding dengan Belanda. Hasilnya bisa kita lihat. Belanda ditarik dari Yogya. Soekarno kembali ke Yogya untuk melanjutkan perundingan sampai pengakuan kedaulatan. Bisa jadi tentara kecewa, kalau mampu melawan, kenapa harus berunding? Tak perlu ada klaim, siapa yang lebih berjasa militer atau sipil.

Yang pasti, sejarah Indonesia tidak dimulai tahun 1966. Militer yang sejak tahun itu berada pada panggung politik sudah harus memperhitungkan kembali kekuatan sipil. Ini adalah proses alami. Karena melejitnya pertumbuhan ekonomi menghasilkan kelas menengah berpendidikan yang semakin sadar akan hak-haknya dan menuntut praktek-praktek demokrasi.

Tindakan represi seperti yang dikatakan pak Edy, hanyalah akan menimbulkankemarahan rakyat. Hal ini sebetulnya sudah jauh-jauhari diramalkan oleh Harold Crouch (1986). Bagi Crouch, selagi kelas menengah ini kecil, tuntutan-tuntutan bisa diabaikan dan organisasi yang mewakili mereka dapat dengan mudah ditindas. Tetapi kalau golongan ini membesar, penguasa militer atau penguasa otoriter harus memberikan konsesi-konsesi bagi tuntutan mereka. Jadi pilihan represi akan membangkitkan perlawanan sipil yang lebih luas. Mengakomodasikan sipil bukan berarti mengangkat beberapa diantaranya menjadi teknokrat seperti sekarang. Karena teknokrat yang diangkat, tidaklah mewakili golongan sosial tertentu. Namun yang lebih penting adalah menjamin keadilan hukum, kebebasan berorganisasi, kebebasan pers dan lain-lain. Intinya adalah berfungsinya kontrol terhadap dominasi dan kekuasaan.

Kondisi yang telah berubah itulah yang mendorong Menhankam, mengusulkan pendekatan represif supaya digantikan dengan pendekatan preventif. Maksudnya, dengan penangkalan berlapis yang berpusat pada ketahanan pribadi tiap individu masyarakat. Strategi ini, masih menurut Pak Edy, merupakan pengalihan dari konsep garis pertahanan, menyusul kaburnya garis konfrontasi antara lawan dan kawan.

Pak Edy membayangkan sebuah arsitektur plastis, di mana lingkaran penangkalan terdalam akan berpusat pada ketahanan pribadi menghadapi tantangan lingkungannya. Apakah itu tantangan moral dan material, atau integritas kebangsaan. Tapi kita mahfum, Pak Edy tidak lagi pegang tentara. Akankah untaian bijak sarat makna itu hanya sekedar menghias koran? Atau memang kita, kaum intelektual sudah mengalami keletihan jiwa, tatkala kritik yang bertubi-tubi menguap begitu saja. "Koran dilipat, dunia tak berubah", begitu gumaman penyair Wiji Thukul .

Bila demikian adannya, siapa salahkan mahasiswa turun ke jalan? Kalau satu saja nyawa mati, akan bermunculan lagi beribu-ribu yang lain. Lantas, siapa yang menyulut keresahan?

Sunarto Cipto Harjono

Rhinitis Allergica
Radang Hidung karena Reaksi Tubuh

Seorang teman mengeluh bahwa setiap hari sehabis mandi pagi atau sholat subuh, ia selalu bersin-bersin, hidung tersumbat, dan mengeluarkan ingus encer. Gejala ini tidak menghilang dengan minum obat namun berkurang sendiri bila hari berganti siang. Ternyata banyak di antara populasi yang merasakan gangguan ini. Bila anda salah satu diantaranya, maka anda menderita Rhinitis Allergica.

Rhinitis merupakan radang hidung, sedang alergi merupakan reaksi hipersensitifitas dari sistem uminitas tubuh. Jadi, Rhinitis Allergica adalah radang hidung yang disebabkan oleh mekanisme alergi (terpacunya sistem imunitas tubuh sehingga menimbulkan reaksi berlebihan) akibat adanya alergen. Alergen dalam kasus Rhinitis ini dapat berupa antigen maupun zat yang bersifat iritatif (debu, asap rokok, bau merangsang, perubahan cuaca, suhu, dan kelembaban udara).

Yang terjadi pada Rhinitis Allergi adalah reaksi immediate hyper-sinsitifity yang merupakan reaksi antigen-antibodi. Bila tubuh terpapar pertama kali oleh antigen (zat pertahanan tubuh) humoral dan selular sehingga mengeluarkan Imunoglobulin E (Ig E). Ig E bertugas mengidentifikasi antigen tersebut. Pada pemaparan antigen yang berikutnya, Ig E langsung dapat mengenalinya, namun reaksi yang terjadi adalah berlebihan. Ig E yang terikat pada sel Mast (sel pertahanan tubuh yang bersifat basa/basofil) menyebabkan degranulasi mediator (pelepasan zat) dari sitoplasma keluar sel. Zat yang merupakan histamin, enzim proteolitik, heparin dan khemotaktik tersebut mengakibatkan pelebaran pembuluh darah, pengeluaran sekret hidung yang berlebihan, dan udema mukosa. Ketiganya merupakan gejala yang sering ditemui pada Rhinitis Allergi disamping bersin-bersin. Bersin sendiri merupakan reflek tubuh untuk mengeluarkan zat asing yang mengganggu atau mengiritasi hidung.

Mengapa Hal ini Sering Terjadi ?

Pagi hari merupakan keadaan cuaca dengan kelembaban tertinggi di samping suhu yang dingin. Pada kasus teman di atas, bisa jadi hal itulah yang merupakan alergennya. Dengan demikian ia dikatakan alergi terhadap hawa dingin dan kelembaban. Hawa dingin dan kelembaban merupakan faktor tersering, namun tidak semua penderita Rhinitis Allergi disebabkan olehnya. Pada sebagian orang, Rhinitis Allergi dapat disebabkan karena alergi terhadap debu, asap rokok, maupun bau yang merangsang. Bila Rhinitis dikarenakan oleh kelembaban, maka hal ini akan berlangsung terus menerus sepanjang tahun, terutama di daerah tropis yang mempunyai kelembaban tinggi seperti Indnesia. Sedangkan di negara empat musim, dikenal pula Rhinitis Allergi musiman yang biasa terjadi pada awal musim semi akibat serbuk tepung sari (pollen) dan spora jamur.

Siapa Saja Yang Terkena Rhinitis AllergiI?

Rhinitis Allergi sepanjang tahun dapat timbul pada semua golongan umur. Frekwensi terbanyak pada anak dewasa muda dan akan berkurang seiring dengan meningkatnya umur. Jenis kelamin, suku, bangsa, dan golongan etnik tidak begitu berpengaruh, tetapi faktor herediter (keturunan) sangat berperan. Gen yang bertanggung jawab pada banyak ciri makhluk hidup disebut dengan Major Histocompability Complex (MHC). MHC manusia terletak pada kromosom 6 lengan pendek dan dikenal dengan Human Limphosit Antigen (HLA). HLA memuat ciri dan sifat khas masing-masing individu. Kecocokan HLA berperan penting dalam berhasilnya transplantasi organ, dan HLA yang cocok dimiliki oleh anggota keluarga dalam turunan. Dengan demikian, maka HLA yang membawa banyak sifat manusia di antaranya adalah sifat alergi tersebut merupakan faktor turunan. Itulah mengapa faktor herediter pada Rhinitis Alergi sangat berpengaruh.

HLA memang menurun, namun bagaimanapun manusia secara generatif selalu mempunyai perbedaan. Orang tua yang menderita Rhinitis menurunkan sifat alergi pada anaknya. Namun alergi yang manifes (muncul) dapat berbeda. Si anak bisa menderita Rhinitis alergi tetapi bisa pula disebabkan menderita alergi yang lain misalnya asma, alergi penisilin, Alergi sea-food, dsb. Demikian pula sebaliknya, orang tua yang mempunyai penyakit asma alergi maupun alergi yang lain, maka anaknya bisa menderita alergi yang sama atau berbeda, di antaranya Rhinitis Alergi.

Apakah Rhinitis Allergica Dapat Diobati ?

Alergi pada dasarnya tidak dapat disembuhkan, sebab ia merupakan sifat herediter yang dibawa oleh HLA, yang selalu ada dalam kromosom manusia. Yang dapat dilakukan adalah: 1) Menghindari kontak dengan alergen. 2) Mengurangi gejala yang ditimbulkan, misalnya dengan dekongestan (obat pelega hidung tersumbat). 3) Atau dalam kedokteran sering dilakukan desensitifitas. Secara garis besar, desensitifitas merupakan pemaparan alergen yang terus menerus sehingga tubuh menjadi terbiasa. Serbuk sari, debu, dan zat-zat dalam makanan dapat diolah sedemkian rupa sehingga dapat disuntikkan secara berkala pada seorang penderita alergi. Tujuannya agar mekanisme imunitas tubuh terbiasa dan tidak memberikan reaksi yang berlebihan. Bila alergennya merupakan kelembababb udara maka desensitifitas sulit dilakukan, oleh karena itu penderita Rhinitis Allergica di Indonesia yang sebagian besar disebabkan oleh hal ini tidak dapat disembuhkan. Yang bisa dilakukan untuk mengatasi gangguan bersin dan hidung tersumbat setiap pagi adalah dengan melancarkan sirkulasi darah, misalnya dengan oleh raga teratur, juga dengan mengkonsumsi makanan bergizi untuk mencegah infeksi sekunder yang dapat terjadii akibat iritasi terus menerus mukosa hidung.

Apa akibat lebih lanjut dari Rhinitis Allergi ?

Rhinitis bisa merupakan tanda dari alergi, common Cold (influenza) maupun beberapa penyakit infeksi lain akibat virus dan bakteri. Yang membedakannya adalah sekret (ingus) yang dikeluarkan. Bila rhinitis diakibatkan bakteri, sekret yang keluar berbentuk kental, kuning kehijauan, dan mengandung banyak leukosit maupun sel bakteri yang telah mati, bila serangan dilakukan oleh virus, maka sekret yang keluar adalah putih kental dan lengket (namun biasanya disusul oleh ingus kekuningan akibat infeksi sekunder bakterial), sedangkan rhinitis alergi ingus biasanya encer dan bening, yang keluar bersama bersin-bersin (minimal 5 kali setiap serangan). Akibat lebih lanjut dari rhinitis alergica tentunya mengakibatkan iritasi mukosa hidung yang kronis. Selain itu dapat pula epitel pada mukosa hidung kemudian membesar dan membentuk polip; suatu massa yang lunak, kemerahan yang terdaapt dirongga hidung. Polip bukan merupakan tumor namun dapat memperburuk keadaan hidung tersumbat. Polip dapat diambil, namun biasanya timbul lagi bila individu masih kontak dengan alergen. Polip biasa terjadi pada dewasa dan jarang pada anak sebab polip merupakan akibat dari rhinitis. Gejala rhinitis alergi pada anak dan dewasa muda yang semakin berkurang seiring dengan meningkatnya umur; seperti telah disebut di atas, sebenarnya bukan merupakan tanda kesembuhan. Sebab selanjutnya pada masa dewasa biasanya dijumpai adanya polip hidung.

Rhinitis alergi sangat sering dijumpai bahkan pada orang-orang disekitar kita. Barangkali sifat alergi yang menurun memang merupakan sebagian besar sifat dari populasi, ditambah hal itu dipicu oleh kelembaban tinggi di daerah tropis, sehingga akhirnya menifes menjadi rhinitis alergi. Meskipun demikian, pemanasan tubuh seperti olah raga di pagi hari akan sangat membantu mengurangi gejala mengganggu (bersin-bersin) yang ditimbulkan.***

Mora Claramita
FKU UGM

Teknologi Kedokteran Nuklir

Menguak Isi Organ Tubuh Tanpa Pembedahan

Ternyata, Nuklir tidak selalu identik dengan teknologi persenjataan pemusnah massal yang dahsyat dan mengerikan. Disamping dikembangkan dalam bidang penyediaan energi alternatif, hidrologi, industri, dan pertanian, dewasa ini teknologi nuklir diarahkan manfaatnya dalam bidang kesehatan (medik) dan kedokteran. Sifat-sifat dari sejumlah radiasi yang dipancarkan oleh radioisotop yang mudah dideteksi ternyata memberikan manfaat yang luas dalam bidang ini.

Kedokteran Nuklir merupakan suatu kegiatan yang masih relatif baru, terutama dalam bidang kedokteran di Indonesia. Perkembangan bidang kedokteran nuklir mulanya berawal dari teknik kamera rontgen lalu Teknik terapi atau yang sekarang lebih populer dengan sebutan radioterapi, pada prinsipnya memanfaatkan energi radiasi. Tindakan yang dilakukan adalah dengan langkah penembakan sinar Gamma bertaraf intensitas tertentu pada jaringan dalam organ tubuh manusia yang sakit.

Dalam perkembangan selanjutnya, pemanfaatan teknologi kedokteran Nuklir tersebut ternyata makin ramai dikaji, lebih-lebih karena terbukti sangat efektif. Hal ini diperkuat dengan argumen dari beberapa ilmuwan teknik nuklir dewasa ini. "Teknik perunutan yang dipakai ternyata mampu mengungkapkan problem patofisiologi berbagai penyakit", demikian ungkap Ir. Maria Adiartsi B, M.Sc. salah seorang pengajar bidang teknologi proses pada jurusan Teknik Nuklir, Fakultas Teknik-UGM.

Sebenarnya penggunaan isotop-isotop radioaktif dalam bidang kedokteran telah dimulai sekitar tahun 1936. Pada waktu itu John Lawrancce dkk. menggunakan terapi fosfor P-32.

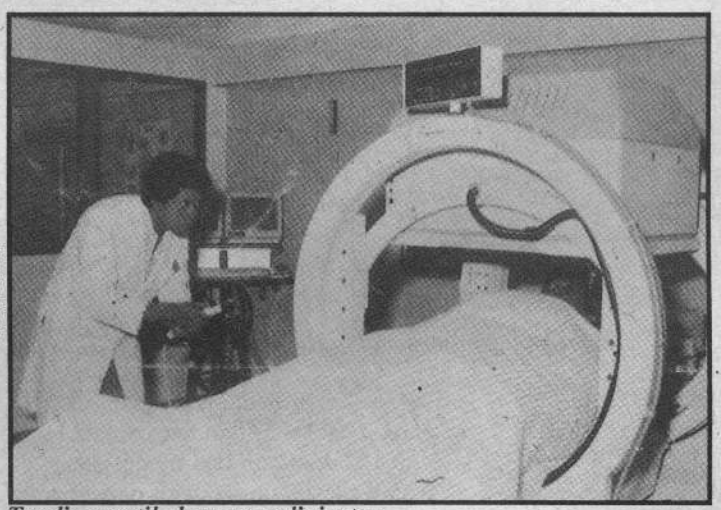

Jurnal Atomos

Tes diagnostik dengan radioisotop

Gamma camera SPECT (Single PLaton Emission Compoted Tomography)

Fosfor P-32 adalah jenis radioisotop pertama yang dibuat secara sintetis.

Metode diagnosa dengan teknologi nuklir didasarkan pada penggunaan zat radioaktif (dari radioisotop) yang dalam hal ini berperan sebagai radiofarmaka perunut. Teknik ini dapat dilakukan secara invitro yaitu pemeriksaan dari darah atau dari air seni pasien yang dicampur radio farmaka tertentu dalam gelas percobaan di laboratorium. Tindakan lainnya yakni dengan radio diagnosa invivo, teknik ini dilakukan dengan melakukan *'tracing'* langsung terhadap organ tubuh pasien dengan memakai kamera khusus. Tracing (penjejakan organ) diarahkan pada organ tubuh dengan menggunakan sediaan radiofarmaka tertentu yang dimasukkan ke tubuh pasien lewat oral ataupun *intravena* (suntikan).

Memang pada awal mula diperkenalkannya teknologi Radioterapi dan Radiodiagnosa sempat timbul berbagai kekhawatiran dari pasien. Kekhawatiran tersebut berasal dari dugaan adanya efek lain yang dapat timbul dari sistem pengobatan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut dr. H. Abdul Latief, Kepala bagian Radiologi, kedokteran Nuklir, RSUP DR. Sardjito, Yogyakarta menjelaskan,. "Dalam teknik analisa radiodiagnosa, pemasukan jenis radiofarmaka untuk penjejakan didasarkan pada fungsi Fisiologis dan sifat metabolisme sel-sel organ tubuh, dalam hal ini ditinjau dari fungsi organ kritis yang memiliki kemampuan untuk mengakumulasi lebih banyak. Jenis-jenis sediaan seperti I-131, I-123, I-125 atau Tc-99m atau sediaan - sediaan yang lainnya dalam kedokteran Nuklir dipilih dari senyawa dari isotop-isotop radioaktif dengan waktu paruhan yang sesingkat mungkin sehingga dosis radiasi yang mungkin akan diterima seorang akan berkurang dan tidak membahayakan." Penggunaan radiodiagnosa tidak menimbulkan efek-efek yang menganggu, asalkan interval pemeriksaan benar-benar diperhatikan, dari segi kesehatan pemeriksaan organ dalam sangat rawan, disini tidak diperlukan pembedahan, cukup sekali usaha *'tracing'* dan langsung dapat didiagnosa. Radiodiagnosa bahkan lebih aman karena tidak memberikan kemungkinan penyakit lain, seperti misalnya bahaya impotensi yang dapat timbul pada pasien yang

didiagnosa kelenjar prostatnya dengan cara pembedahan biasa.

Sistem kerja teknik Radiodiagnosa

Menilik bahwa dengan mengetahui distribusi radiofarmaka dalam tubuh maka kemungkinan besar dapat diperoleh informasi tentang keterangan kondisi organ dan jaringan-jaringan yang abnormal didalam tubuh. Teknologi instrumentasi dan komputasi dengan perancangan komponen yang tepat akan mampu memberikan visualisasi dari kondisi organ dan jaringan abnormal yang diperiksa tersebut. Visualisasi yang didapat biasanya disebut dengan *'scanner'* organ yang memberikan keterangan posisi organ, letak jaringan abnormal yang perlu diperbaiki, keterangan ukuran sebenarnya dari organ, laju metabolisme di dalamnya juga informasi tentang kualitas hasil serapan organ terhadap jenis radiofarmaka tertentu.

Pada dasarnya penampilan bentuk visual dari pemeriksaan organ tubuh lewat radiodiagnosa berasal dari interaksi antar cacah radiasi yang dipancarkan organ yang diperiksa, dimana kumpulan sumber radioaktif berbentuk titik - titik di identikkan sebagai organ tubuh selanjutnya dilakukan pencacahan pada setiap titik-titik tersebut.Pada tahap berikutnya data-data pencacahan radioaktif ditampilkan dalam bentuk citra distribusi radioaktifitas yang terkenal dengan teknik pemeriksaan *Imaging*. Rangkaian alat-alat pemeriksaan radioaktifitas seperti kamera gamma SPECT (Penghitungan Emisi Photon Tunggal), kamera PET (Penghitung Emisi Positron) mampu menampilkan gambar dari sifat perbedaan cacah radioaktif pada obyek organ yang diperiksa. Perbedaan cacah yang berbeda ditampilkan berupa titik-titik dengan pola warna beragam dalam suatu layar,tampilan citra ini dihasilkan oleh bagian *instrumentasi Imaging*.

Pada bagian penting dalam langkah kerja pembentukan gambar adalah informasi besar cacah dari sumber radioaktif (pada organ yang diamati) dan informasi posisi radioaktif yang dicacah. Langkah ini dilakukan oleh bagian alat penggerak dituntun dengan syarat tangkap akurasi yang cukup tinggi agar "citra" yang dihasilkan dapat terbentuk dengan baik dan sempurna. Dari hasil visualisasi citra tersebut di harapkan dapat memberikan kemudahan dalam menentukan diagnosa yang tepat. Radioterapi dan radiodiagnosa telah berhasil memberikan sumbangsih yang amat besar dan bermanfaat bagi dunia kedokteran dan medik (kesehatan) meskipun langkah penyebaran teknologinya masih terbatas karena permasalahan mahalnya peralatan dan komponen operasional, demikian ungkap Ir.Mondjo dari jurusan Teknik Nuklir FT-UGM. Menjawab masalah tersebut, diIndonesia telah dibangun fasilitas produksi radioisotop dari reaktor Triga Mark II di Bandung dan industri berskala besar di Pusat industri radio-isotop BATAN di Serpong, dengan Reaktor G.A. Siwabessy yang menghasilkan berbagai produksi yang menunjang pemanfaatan dalam bidang kedokteran Nuklir, seperti: Generator *Mo Tc*, kit Radiofarmasi, kit Radiomunoassay (RIA), berbagai jenis senyawa bertanda *(labelica campounds)* termasuk Cobalt-60 yang bermanfaat untuk terapi kanker dan sterilisasi produk suatu industri, diharapkan pada tahun-tahun mendatang teknologi ini menjadi tidak mahal lagi.

Berbagai contoh pemanfaatkan Radiodiagnosa dalam kedokteran nuklir misalnya: Pencarian anak sebar tumor ganas, kanker payudara dan kanker usus besar, tindakan penilaian gangguan hati, empedu dan limpa, pemeriksaan kelenjar paratiroid dan adrenasi, pemeriksaan placenta, pemeriksaan otak dan pengamatan jantung dengan kardiologi nuklir, serta berbagai diagnosa untuk penyakit-penyakit menular.

Mengenai tanggapan masyarakat atas pelayanan jasa bidang kedokteran nuklir, Petrus Ginting Kepala bagian kedokteran nuklir, RSUP DR. Sardjito mengungkapkan," Memang pada awalnya masyarakat enggan untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan jasa disini (kedokteran nuklir-red) mungkin itu disebabkan karena mereka belum tahu, dan masih kurangnya informasi bagi mereka. untuk jumlah pasien sekarang ini sudah cukup banyak terutama pada pelayanan hari Senin dan Rabu dan jumlahnya terus meningkat dari sejak dimulainya pelayanan bidang kedokteran nuklir. Seperti kita tahu bahwa di Indonesia fasilitas Kedokteran Nuklir untuk saat ini baru ada dibeberapa rumahsakit besar saja".

Pengembangan teknologi nuklir dalam bidang kedokteran memang telah memberikan banyak manfaat bagi kesehatan manusia, namun seyogyanyalah harus diiringi dengan peningkatan teknologi yang bersifat antisipasif, seperti misalnya pada teknologi pengelolaan sisa bahan radioisotop yang harus sangat diperhatikan, sehingga fenomena-fenomena yang menimbulkan dampak lain dari hasil penemuan umat manusia dapat diatasi dan terus mengacu pada keseimbangan alam sebagai titipan Sang Maha Kuasa.***

Herwanto

laporan Hermawan, Naufal

Eka

Buku Pengantar IPTEK Nuklir

Sediaan Radio Farmasi	Penggunaannya untuk diagnostika
1. T31 J.S.A Macroagregat	Lokasi placenta, penatahan hati dan limpa
2. Natrium Fosfat 32p	Menentukan tumor pada mata
3. Natrium Chromat 51Cr	Sel-sel darah merah, penatahan limpa
4. Natrium Fluorida 18F	Penatahan tulang
5. Natrium Pertachnetat Tc-99m	Penatahan otak dan glandtiroid
6. Oleic Acid 131I	Mempelajari absorpsi lemak
7. Rose Bengal 131I	Test fungsi hati
8. Selenometheonin 75Se	Penatahan pankreas
9. Strontium Chlorida	Penatahan tulang
10 Strontium Citrat 87Sr	Mempelajari kanker tulang
11.Serum Albumin 99mTc	Penatahan pool darah jantung dan plasenta
12.Serum Albumin 99mTc regat	Penatahan paru-paru
13Technetium-S-Serum Albumin	Penatahan hati dan paru-paru
14.Xenon 133Xe	Mempelajari fungsi pulmouari
15.Chrom Fosfat oil 32p	Pengobatan efusi peritoneal dan pleural
16.Gold 198Au Koll	Pengobatan efusi pleural dan peritoneal
17.Natrium Jodida131I	Hyperthyroidisme, penyakit jantung, kanker tiroid
18.Natrium Fosfat 32p	Policitimea vera, Leukimia kronis, kanker tulang

Beberapa contoh sediaan Radioisotop

Di balik Pascasarjana Kita

Sebagai universitas tertua, UGM selalu menjadi perhatian dalam dinamika pendidikan negeri ini. Posisi demikian sering membuat UGM berfungsi sebagai parameter bahkan kiblat bagi setiap universitas di Indonesia. Salah satu misal adalah program Pasca Sarjana (S2) yang tiap tahun ajaran baru selalu penuh dengan mahasiswa, baik yang berasal dari instansi atau atas nama pribadi

Realitas itu menunjukkan bahwa Program S2 UGM merupakan "kawah candradimuka". Artinya, Program Pascasarjana UGM menerima mahasiswa dari berbagai latar belakang. Untuk mengatasi kondisi demikian, maka langkah yang dilakukan adalah menerapkan pengetatan dalam sistem seleksi masuk. Syarat tersebut meliputi antara lain Indeks Prestasi, TPA (Test Potensi Akademik), dan Bahasa Inggris dengan TOEFL antara 400-500.

Namun, standardisasi IP tersebut sangatlah relatif, karena ukuran angka "A" di luar daerah jelas berbeda dengan IP "A" di universitas lain. Menghadapi fenomena ini, akhirnya pengelola Program S2 dihadapkan pada dilema antara kualitas dan kuantitas. Untuk itu dalam jurusan-jurusan tertentu dilaksanakan semacam 'matrikulasi'.

"Tapi, saya kasihan juga kalau ikut program matrikulasi dahulu. Misalnya, ikut matrikulasi tiga bulan. Ya kalau diterima. Padahal, ia sudah pamit-pamit sama keluarganya. Matrikulasinya macam-macam, seperti matrikulasi di bidang Hayati dan Teknik yang diadakan secara ketat", demikian Prof. Dr. Ichlasul Amal Direktur Program Pasca Sarjana mengungkapkannya pada BALAIRUNG di ruang kerjanya.

Permasalahan tersebut dalam perjalanannya tidak pernah berhenti. Tetapi, dalam proses keberlangsungan kuliah, problem intern sering menjadi kendala utama, baik tentang kurikulum, komunikasi antara dosen dan mahasiswa, serta berbagai sarana lainnya. "Ada beberapa permasalahan yang menjadikan kualitas program S2 perlu dipertanyakan," ungkap Dodik (bukan nama sebenarnya), salah satu mahasiswa S2 Fakultas Sosial Politik ini.

Menurut mahasiswa yang kuliah dengan biaya sendiri ini, ada beberapa masalah yang terjadi dalam proses kuliah di S2. *Pertama,* adanya pengulangan-pengulangan mata kuliah di program S1 yang diajarkan di S2, misalnya pelajaran Metode Penelitian. Ini membuat mahasiswa mengalami kejenuhan. *Kedua,* kurangnya komunikasi antara dosen dengan mahasiswa yang mengakibatkan mahasiswa kurang mendapat pemantauan. *Ketiga,* munculnya gejala mahasiswa yang menggunakan kelebihan ekonominya untuk melancarkan tugas-tugasnya. Dan celakanya, beberapa dosen mau menerima

ACHMAD KRISNA

Pasca Sarjana UGM
Menfungsikan diri sebagai universitas pembina

Mempertanyakan Kualitas Dosen Muda

tawaran mahasiswa itu. *Keempat,* kurangnya suasana keterbukaan, terutama dalam hal perbedaan pendapat, sehingga ada mahasiswa yang 'dibunuh' dalam proses kuliahnya. "Berbagai problem iitulah yang menjadikan kualitas S2 di sini harus dipertanyakan", ujarnya serius.

Mengomentari hal ini, Prof. Dr. Ichlasul Amal menyatakan kesangsiannya. "Ya... kalau saya memang *nila setitik susu sebelanga.* Kalau saya melihat itu cuma satu dari sekian, memang dikemukan pers, itu seolah-olah semuanya. Seperti yang saya katakan, sebenarnya kita harus *fair* untuk meneliti betul apakah satu tesis itu mengambil punya orang atau tidak,"ujarnya hati-hati.

Sementara itu menurut sumber BALAIRUNG di S2 yang tidak mau disebutkan namanya, dosen seharusnya tidak boleh bersikap tertutup terhadap perbedaan intelektual. Melainkan, dosen semestinya mentolelir adanya perbedaan itu. Baginya, ketidakterbukaan ini muncul karena dalam program S2 di UGM kurang diadakan diskusi, sehingga terkesan S2 UGM adalah bola yang dibiarkan menggelending apa adanya.

Bagaimana dengan fenomena mahasiswa yang memberi sesuatu di luar hal-hal yang bersifat akademis? Nara Sumber tadi menilainya sangat tidak etis, apalagi kalau memang dijadikan senjata. Untuk itu, dosen perlu peningkatan materi (honor). Selain itu, dosen harus punya kualifikasi serta harus banyak menulis di berbagai media masa.

Beda halnya dengan Dr. Riswandha yang menyatakan, bahwa pemberian di luar akademis adalah hal yang wajar asalkan hanya untuk sebuah persahabatan. "Sepanjang itu hanya untuk persahabatan dan pantas, *Why Not?* Jadi, mungkin itu hanya diberikan karena dia ingat akan ketergantungannya dengan dosennya," kata dosen S2 Fisipol ini.

Tentang penyempurnaan fasilitas program S2, bagi Ichlasul Amal itu memang sudah menjadi kewajiban yang selalu terus dilakukan. "Kita mencoba untuk meningkatkan fasilitas, tanggung jawab moral. Yang pasti program peningkatan fasilitas itu tanggung jawab saya, seperti fasilitas perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain sehingga mereka yang datang ke sini berada dalam satu lingkungan yang bagus," janjinya optimis.

Apa yang diungkap Ichlasul ini, berarti menjawab beberapa keluhan mahasiswa yang menginginkan adanya perbaikan beberapa fasilitas, seperti pengadaan berbagai jurnal ilmiah, perbanyakan literatur, dan penggunaan internet sebagai alat untuk mengakses informasi.

Di samping itu, hal yang paling penting dalam meningkatkan kualitas mutu S2 adalah dengan membenahi kemampuan dosen-dosennya. Langkah yang ditempuh antara lain adalah dengan meningkatkan fasilitas dosen Pasca Sarjana yang berjumlah lebih kurang 500 staf itu.

Realitas dan usaha-usaha di depan merupakan suatu wujud bahwa sudah seharusnya UGM sebagai universitas tertua sekaligus terbesar ini menjadi kampus yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Sehingga, kita tidak lagi terjebak oleh mitos-mitos nama besar Gadjah Mada belaka, melainkan sungguh-sungguh tua dalam umur dan intelektual, serta megah di gedung-gedungnya dan ide-ide besarnya.

Dus, meningkatkan kualitas merupakan kewajiban moral yang tidak bisa ditunda, antara lain dengan memberi kesempatan terciptanya kultur perbedaan pendapat dan kemerdekaan bersuara. Dengan demikian, tidak ada lagi tarik menarik atau pergulatan interes berbagai kepentingan atau golongan, sehingga obyektifitas dan kualitas Program Pasca Sarjana kita dapat dipertanggungjawabkan.***

Khoirul Rosyadi
Reporter: Wuwun, Setiati, Nenden

Mencermati staf pengajar di UGM sekarang, akan banyak ditemukan beberapa dosen baru yang tentunya *sarat dengan semangat, gaya, dan kemampuan. Dalam tahun ajaran 1995/1996 ini telah tercatat ada 71 staf pengajar muda universitas tertua ini yang tersebar di 18 fakultas.*

Perubahan demikian adalah salah satu usaha agar Gadjah Mada tidak kehilangan generasi-generasi tangguh di masa mendatang, sehingga setahun sekali diadakanlah penerimaan staf pengajar muda. "Sekarang yang berlaku dalam penerimaan calon pengajar, sekali setahun dan jatah penerimaan itu ditentukan oleh pusat (Jakarta)," kata Prof. Dr. Ir. Boma Wikantyoso, PUREK I, saat ditemui BALAIRUNG di ruang kerjanya.

Dalam penerimaan dosen muda ini ada sejumlah persyaratan yang haruis dilalui. Antara lain adalah nilai IP-nya minimal 2,75. Standardisasi ini merupakan paramater seseorang untuk menjadi pegawai negeri. Di samping IP, seorang calon staf pengajar harus mendapat rekomendasi dari beberapa dosen senior. Persyaratan terakhir ini kemudian menciptakan peluang untuk menciptakan unsur-unsur subyetifitas, sehingga dikuatirkan muncul berbagai kepentingan "tertentu" di sana.

Kekuatiran ini dibantah tegas oleh Prof. Dr. Ir. Boma Wikantyoso. "Rekomendasi itu, untuk menjadi dosen. Bukan untuk ikut dosen yang merekomendasikan atau yang membimbing. Ini untuk menghindari kubu-kubuan. Karena dalam rapat jurusan, itu harus dilihat *laboratorium* mana yang paling urgen. Jadi tidak ada itu kubu-kubuan," tandasnya.

Keterangan tersebut diperjelas oleh Dr. Anggito Abimanyu. Menurut Direktur PAU Ekonomi ini, reko-

ACHMAD KRISNA

Dosen muda

Mampukah meningkatkan mutu pendidikan ?

mendasi itu berasal dari orang yang tahu persis akan kualitas mahasiswa, karena rekomendasi tersebut berasal dari dosen pembimbing atau yang terlibat dalam penilitian.

Dalam perkembangannya mahasiswa sering mempertanyakan kualitas beberapa staf pengajar muda. Bahkan kadang secara ekstrim beberapa mahasiswa tidak jarang meragukan kualitas dosen muda yang mengajar mata kuliahnya. Keraguan ini muncul karena dalam proses pengajarannya ia tidak membawa sesuatu yang bisa dianggap lebih dari kemampuan mahasiswa..

Alasan itu mungkin bisa diterima karena bertautan dengan pengalaman dosen tersebut yang masih relatif terlalu muda. "Mereka (calon atau dosen muda) masih belum memiliki cukup bekal, mereka terlalu bergantung dengan buku panduan yang sudah dimiliki oleh mahasiswa. Itu yang membuat mahasiswa *ogah* kuliah, karena tanpa mengikuti kuliah pun mahasiswa bisa belajar sendiri dari buku acuan yang mereka miliki,"timpal Yulin mahasiswa Fakultas Hukum '95 saat dimintai komentar BALAIRUNG.

Hal senada juga diungkpakan oleh Gandhi. Mahasiswa Fakultas Sastra jurusan Sastra Jepang ini mengatakan bahwa dosen muda secara keilmuannya tidak begitu jauh beda dengan beberapa dosen seniornya. Akan tetapi, karena pengalamannya yang kurang, dosen muda sedikit 'kalah' dengan staf pengajar senior lainnya, terlebih dalam kemampuan analisisnya.

Mengomentari ini, Poppy, dosen muda Fakultas Ekonomi UGM, berpendapat bahwa dosen-dosen muda kelihatannya kurang tajam analisisnya karena mungkin masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan konsentrasi ilmunya. Artinya, tidak semua orang mempunyai kemampuan serta kecepatan dalam beradaptasi itu. Dalam hal ini, bukan berarti mereka itu bodoh, tetapi hanya karena faktor proses dan kesempatan.

Lain halnya dengan Dr. Anggito, ia melihat bahwa banyak dosen muda kurang performance. Artinya, kebanyakan dari mereka kurang menyeimbangkan antara mengajar, meneliti, dan mengembangkan ilmunya. "Bayangan saya ketika jadi dosen itu adalah meneliti, lalu mengembangkan ilmu, kemudian mengajarkannya. Yang saya selihat selama ini, keseimbangan itu kurang. Dosen-dosen muda itu entah kenapa, mungkin finansial atau kepepet macam-macam, saya tidak mengatakan semua, tapi beberapa di antaranya kurang perform. Mereka sebetulnya pinter, tapi mestinya juga sadar bahwa dosen itu seharusnya meneliti dan mengajar,"kata staf peneliti PAU UGM ini. Faktor inilah salah satu dari beberapa penyebab yang menjadikan dosen-dosen muda kualitasnya kurang. Sehingga, karenanya tidak jarang mahasiswa kemudian menjadi apatis bahkan malas untuk kuliah.

Namun, Anggito berbeda dengan Aminowoto SH. Menurut Aminoto, diskusi dan penieitian tidak menjamin kualitas dosen itu meningkat karena penelitian serta diskusi tidak identik dengan kualitas staf pengajar muda. "Ya, saya kira penelitian meningkat, juga diskusi banyak hal. Tapi, saya tidak mengatakan kualitasnya naik. Frekuensi penelitian dan perdebatan itu semakin meningkat, tetapi kualitasnya belum tentu begitu," kata dosen muda Fakultas Hukum ini.

Fenomena ragunya mahasiswa terhadap kemampuan dosennya adalah realitas. Kita tidak bisa menafikan. Tetapi, juga tidak harus menuduh macam-macam. Yang terpenting, persoalan itu mesti dipikirkan, didiskusikan. Dan yang juga tidak bisa diabaikan ialah bahwa sudah saatnya setiap dosen meningkatkan kualitas, mengembangkan budaya kritis, dan menciptakan keterbukaan di bidang akademis.***

Khoirul Rosyadi

Laporan : Mustajab. Rudy, Freddy

Penelitian antara Bisnis dan Pengabdian

Perguruan tinggi sebagai bagian integritas sosial, kehadirannya selalu tidak bisa dilepas dari perubahan kehidupan. Ini berarti segala elemen perguruan tinggi dalam sepanjang rentang sejarah memainkan peranan penting. Ini

karena kelebihan yang dimiliki orang-orang universitas pada sisi akademis, kemampuan analisis; serta Tri Darma perguruan tinggi yang dengan sendirinya tidak dapat di kesampingkan.

Kesepakatan tersebut, akhirnya menjadikan penelitian sebagai salah satu langkah riil wujud pengabdian orang kampus terhadap masyarakat. Bahkan, kualitas dan jumlah penelitian sering dibuat untuk melihat kredibilitas suatu perguruan tinggi. Artinya, penelitian merupakan sebuah aktivitas ilmiah yang paling banyak memberikan asas manfaat dalam bagi kehidupan masyarakat.

UGM, sebagai universitas yang memproklamiasikan dirinya bervisi kerakyatan, pada gilirannya memilih rakyat kecil sebagai tempat keberpihakan. Dan ini terlihat pada berbagai penelitian yang sering dilakukan, baik yang dilakukan dengan dengan beaya pribadi (UGM), pemerintah, maupun dana yang berasal dari swasta (Lihat tabel).

Tabel tersebut menunjukkan, bahwa penelitian adalah hal yang urgen terhadap perubahan suatu kehidupan. Dan ini semakin jelas bili penilitian ditilik dari sisi manfaatnya.

Berbicara tentang manfaat penelitian, berarti asas menfaat yang paling dikedepankan. Maksudnya, kredebilitas sebuah penelitian sering diukur dari bermanfaat tidaknya bagi kehidupan masyarakat.

"Kualitas dari penelitian terdiri atas tiga asas, meliputi asas manfaat, asas kelayakan, dan sifat-sifat dari penelitian. Oleh karena itu, seberapa besar pun penelitian kalau tidak asas menfaat penilitian itu sia-sia". Jelas Prof. Dr. Prayoto pada BALAIRUNG.

Hal senada juga dikatakan oleh Dr. Eko Sugiharto. Menurut staf lembaga peneliti PPLH ini, penelitian adalah suatu aktivitas ilimiah yang sarat dengan muatan positif. Dan yang lebih penting lagi kita mampu melihat secara langsung kondisi di lapangan, tidak hanya pada teori-teori serta apriori semata.

Lebih dari itu, penelitian merupakan salah satu sarana untuk mengetahui sejauh mana seseorang yang memiliki kapasitas dan kualitas intelektual. Demikian dijelaskan Drs. Slamet Sutrisno, staf pengajar Fakultas Filsafat UGM..

"Bukan berarti saya tidak percaya pada gelar atau titel, namun apa artinya suatu titel besar, kalau seseorang tidak pernah melakukan dan menghasilkan karya-karya penelitian," kata staf peneliti pada PPKPS ketika diwawancarai BALAIRUNG.

Namun, dalam perjalanannya, sering penelitian tercerabut dari akar-akar keobyektivanya. Artinya, dalam motivasi awalnya kadang penelitian hanya dimaksudkan sebagai kegiatan profit semata dan menanggalkan unsur-unsur nilai keintelektualan. Dan, meningkatkan jenjang pangkat, adalah misi yang sering muncul sehingga asas keperpihakan dan pengabdian masyarakat sering terabaikan.

"Ada penelitian yang hasilnya sudah dipesan, namun tidak menonjol," ungkap Prof. Dr. Prayoto ketika diwawancari BALAIRUNG di rumahnya. Keadaan ini dimungkinkan terjadi karena proses keluar masuknya proyek penelitian tidak terkoordinir.

Akan tetapi, mulai tahun ini, semuanya akan dikoordinasi lewat Lembaga Penelitian UGM, sehingga dapat menepis kemungkinan adanya penelitian yang isinya pesanan. Lanjut Direktur LP UGM ini.

Menanggapi adanya peneliti yang demikian, Slamet Sutrino dengan tegas menyebutnya hal itu sebagai pengkhianatan intelektual. "Seorang peneliti yang hasil penelitiannya tidak obyektif, pada

Kegiatan Penelitian
UNIVERSITAS GADJAH MADA
TAHUN 1995/1996

Sumber Dana	Jumlah Kegiatan	Bidang Ilmu *)												Besar Dana Rp
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
DPP/SPP	386		47		20	21	52	78	43	61	13	51		703.205.200
OPF	93		10		4	5	11	27	11	9	3	13		210.000.000
HIBAH	14						1	11				2		560.111.000
IPD/BASIC SCIENCE	4							1	2				1	41.600.000
PEMDA	6								4				2	64.840.000
INDUSTRI/SWASTA	14							3	2	2	1	6		57.850.000
DEPARTEMEN	24							6	5		4		9	1.691.697.100
LUAR NEGRI	28		2				1	2			4		19	936.371.514
PENGOLAHAN/PEMBINAAN														
LAINYA														
a)PPIPT	7							4	1	2				59.000.000
b)ARM	3							2			1			42.485.000
c)RUT	43							15	8	10			10	4.995.608.610
d)BAPENAS/BAPEDA	14		2					3	6				3	756.272.550
e)URGE	6					1		3	1	1				2.179.384.000
f)BULOG	1							1						125.000.000
LAIN-LAIN	10												10	17.410.000
JUMLAH	653		61		24	27	65	156	83	85	26	72	54	12.440.834.974

*) Keterangan : 1. Agama 2. Sastra/filsafat 3. Pendidikan 4. Hukum 5. Ekonomi 6. Sosial 7. Pertanian 8. MIPA 9. Teknik 10. Biologi 11. Kesehatan 12. Lain - lain

GaNdHi & aGunG
LP UGM

hakikatnya bukanlah seorang intelektual yang bermental ilmiah,"tanggapnya.

Ungkapan yang sama juga dilontarkan oleh Dr. Anggito Abimanyu. Menurut peneliti muda yang produktif ini, bahwa seorang peneliti sudah seharusnya menjaga integritas nilai-nilai akademisnya. Dan ia semestinya tidak hanya mengutamakan nilai material sebuah proyek penilitian.

"Pelacuran intelektual adalah kata tepat untuk mereka para peneliti pesanan ini,"ujar Dr. Anggito Abimanyu dalam perbincanganya dengan BALAIRUNG.

Menurut peneliti muda ini, peneliti yang bekerja berdasar pesanan sponsor, itu berarti ia bisa dibeli dengan uang. Dus, hasil penelitiannya tidak lagi bersifat ilmiah, karena hasilnya merupakan hasil rekayasa sesuai dengan pesanan pihak sponsor.

"Sebagai ilmuwan, saya tidak pernah memanipulasi data penelitian untuk pesanan sponsor. Seandainya ada yang demikian, amat saya sayangkan. Dalam hal ini saya belum bisa menyebut nama. Tapi, yang jelas saya tidak pernah memanipulasi data penelitian saya," tambah Dr. Eko Sugiharto senada dengan Anggito..

Menurutnya, seorang peneliti semestinya mengatakan kondisi lapangan seperti kenyataan adanya. Dengan demikian, misalnya ada suatu perusahaan melakukan kekeliruan yang merugikan masyarakat, bisa mengubah segera kebijakannya.

Terlepas dari terbongkar tidaknya seorang peneliti yang melakukan hal itu, penelitian yang berdasar pesanan sangat punya peluang berkembang. Artinya, penelitian yang mengutamakan nilai-nilai materi serta mengesampingkan obyetivitas merupakan bentuk pengingkaran yang bisa terjadi ketika seorang ilmuwan tidak lagi melihat penelitian sebagai sebentuk pengabdian.

Ini sesungguhnya adalah sikap yang tidak bisa diterima dengan alasan apapun, karena pada hakikatnya penelitian bukan merupakan urusan mencari uang dan makan.

"Penilitian itu *underpay*. Penelitian itu murah. Jadi, jangan katakan penelitian itu bayarnya mahal. Lain persoalannya dengan mengajar di perguruan tinggi swasta," ucap Anggito Abimanyu tandas.

Berbeda dengan Prof. Dr. Prayoto, menurutnya, gaji seorang peneliti bisa mencapai dua sampai dua koma lima juta dalam sebulan. Ini yang dari proyek pemerintah, belum proyek yang dari swasta. "Bisa beberapa puluh juta rupiah,"ujarnya terus terang..

Adanya penelitian pesanan memang tidak ditampik oleh para pengamat itu. Hanya saja memang sampai sekarang kita tidak bisa memberikan data yang akurat seberapa banyak persentase penelitian yang masuk kategori ini.

"Di negara kita, penelitian belum berkembang sebagai budaya kalangan akademisi. Kita baru dalam proses pengembangan. Karena itu yang lebih penting adalah bagaimana upaya kita untuk lebih memasyarakatkannya, sesuai dengan prosedur keilmiahan yang berlaku. Tentu juga, dengan menghindarkan diri terlibat dari penelitian yang bersifat pesanan tadi,"kata Guru Besar FMIPA ini mengakhiri wawancaranya dengan BALAIRUNG.***

Khoirul Rosyadi

Laporan : Mustajab, Aris, Yuli, Nenden, Lely

GRAFIK JUMLAH JUDUL PENELITIAN YANG DIKELOLA LEMBAGA PENELITIAN

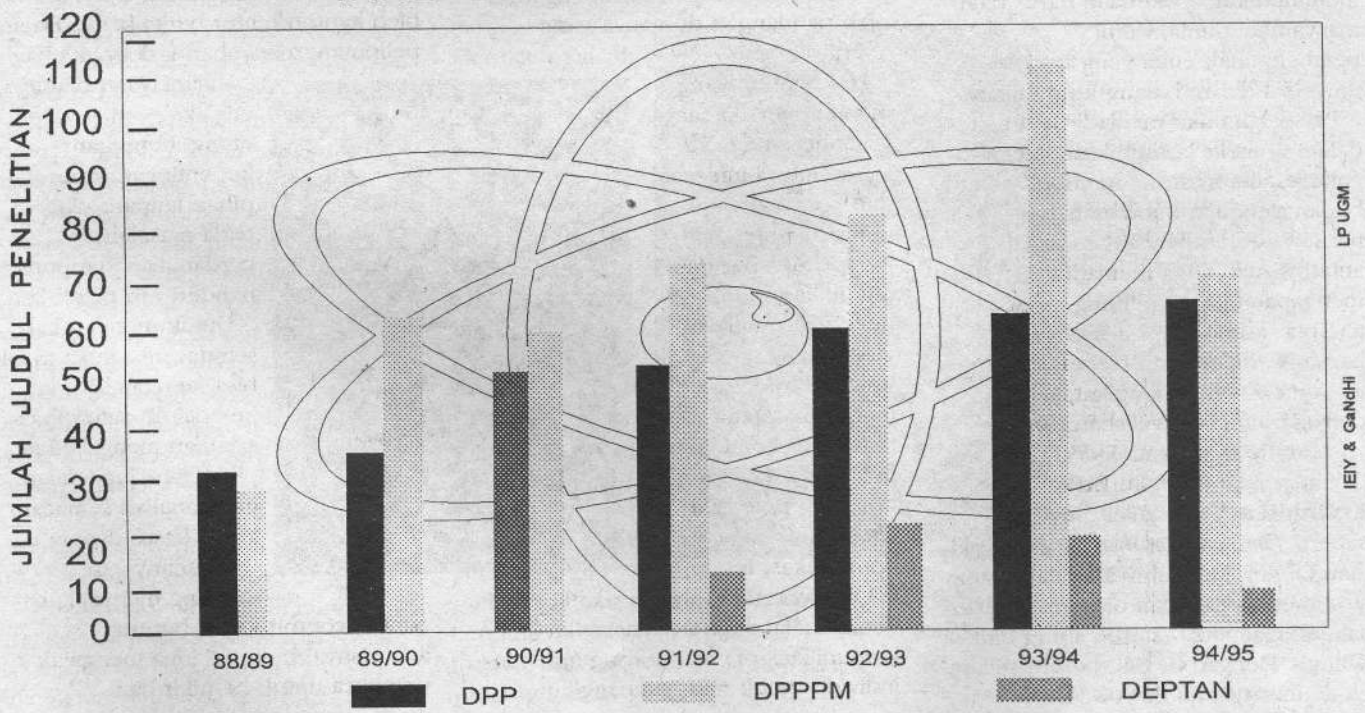

Menuju Komunikasi Bermoral

Judul : Etika Komunikasi
Pengarang : Richard L. Johannesen
Penerbit : Remaja Rosdakarya, Bandung
Cetakan I : Januari 1996
Tebal : 336 + xix halaman

Semakin transparannya batas-batas negara dan budaya, semakin intensifnya mobilitas manusia hingga melintas batas antarnegara, dan kian canggihnya media massa internasional, menimbulkan "pekerjaan baru" bagi masyarakat dunia, yakni pembangunan etika yang bersifat universal dalam bidang komunikasi.

Persoalan etika menjadi penting, dalam konteks komunikasi, ketika antarsesama manusia membutuhkan berlangsungnya hubungan yang harmonis. Desakan komunikasi antarbudaya, juga menjadi alasan kuat mengapa etika itu penting. Agar tercipta komunikasi insani yang harmoni diperlukan "seperangkat instrumen" yang mengikat, sebagai penjaga timbulnya disharmoni.

Secara teoretis, kata Deddy Mulyana dalam pengantar buku **Etika Komunikasi**, ada etika universal seperti *The Ten Commandments*, Injil atau Quran. Masalahnya adalah sistem-sistem etika itu tidak diterima universal, sebagaimana kata Wenburg dan Wilmot. Dengan begitu, berarti secara etika universal itu tidak ada.

Sebagai sistem yang dikonstruksi manusia, etika menjadi bersifat relatif karena manusia terbagi dan terikat oleh budaya masing-masing. Artinya, etika yang mengikatnya hanya terbatas pada masyarakat di mana komunikasi itu berlangsung, tidak untuk masyarakat lain.

Relativitas sifat etika ini agaknya yang "menjustifikasi" Richard L. Johannesen yang berbicara etika komunikasi insani dalam bukunya **Etika Komunikasi**. Johannesen, lewat buku ini memberi beragam perspektif untuk membantu menganalisis etika komunikasi insani. Di samping itu, buku ini mempelajari implikasi-implikasi etis dari keanekaragaman komunikasi insani.

Dalam hal analisisnya tentang kasus-kasus komunikasi insani inilah Johannesen "seperti" dijustifikasi, karena analisisnya *sangat "American Oriented"*. Selain itu juga bias, seperti diakui penulisnya sendiri. Bias ini timbul di samping karena *American Oriented*, juga karena perspektif penulis yang tidak mau dipengaruhi oleh pandangan dunianya yang liberal.

Hal penting yang menjadi penekanan Johannesen adalah: (1) memberi infornasi dan wawasan mengenai berbagai perspektif yang dapat digunakan untuk membuat penilaian etis tentang komunikasi insani; (2) menjadikan para partisipan komunikasi peka terhadap isu-isu etis yang potensial dalam proses komunukasi insani; (3) menyoroti kerumitan dan kesulitan ketika melakukan evaluasi etika komunikasi; (4) mendorong individu-individu untuk mengembangkan secara matang pendekatan praktis mereka sendiri dalam menentukan etika komunikasi; dan (5) membantu individu-individu menjadi pengamat komunikasi yang lebih cermat dengan cara meningkatkan kemampuannya untuk membuat penilaian etis yang terfokus secara spesifik dan dipertimbangkan dengan hati-hati. (Hal.xi)

Biar Sejarah yang Bicara

Hal mendasar dari etika komunikasi adalah ketika komunikasi suatu pihak dihadapkan dengan seorang, sekelompok orang, institusi, atau bahkan budaya yang sama sekali di luarnya. Kemungkinan terjadinya *cultural shock* adalah paling sulit dihindari ketika komunikasi terjadi untuk pertama kalinya.

Etika komunikasi menjadi pelik ketika suatu pihak menekan atau memaksakan penerimaan pihak lain. Dampak yang terjadi adalah kesewenang-wenangan satu pihak atas pihak lain yang menunggangi nilai-nilai universalisme.

Sebagai contoh tentang peliknya standar etika komunikasi adalah peliputan isu-isu penting internasional oleh kantor-kantor berita besar. Dalam peliputan, menyebarluaskan gambar penganiayaan dianggap etis jika menguntungkan kepentingan suatu pihak tanpa peduli pada masalah perdamaian ataupun penderitaan pihak lain.

Untuk menentukan standar nilai etika, tidak bisa mengambil perspektif satu pihak saja dan mengabaikan pihak lain, juga dalam menganalisis semacam kasus-kasus di atas.

Karenanya, di samping menyajikan contoh-contoh kasus beserta analisisnya, buku ini juga mengajak pembaca untuk berpikir dan mengkomparasikannya dengan analisis buku ini. Alhasil, apakah suatu bentuk komunikasi itu dianggap etis atau tidak etis dan bagaimana moralitasnya, manusiawi atau tidak, masih tergantung *setting* budaya yang menilai.

Lalu, akankah tercipta etika komunikasi insani universal yang bermoral? Jawaban dari ini agaknya biar sejarah yang akan membuktikannya.

Muhammad Rozi
Mahasiswa Fakultas Sastra UGM

Membangun di Atas Kehancuran

Judul : Atas Nama Pembangunan
Cetakan I : Desember 1995
Tebal :158 + xxxxiii halaman
Penerbit : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Mengais kepentingan, itulah setidaknya yang menjadi rel tujuan memasuki sebuah sistem yang berseberangan. Sama halnya Bank Dunia menyambung janji dengan pemerintah Indonesia untuk mengucurkan dana pembangunan negara berkembang. Bahwa Bank Dunia adalah lembaga multilateral yang mempengaruhi kebijakan ekonomi Indonesia, ini tak tersangkal

Kebijakan deregulasi di sektor perdagangan, investasi, dan industri meski acapkali dikatakan sebagai kebijakan pemerintah Indonesia, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan itu ditempuh untuk mengantisipasi kecenderungan ekonomi global.

Kebijakan tersebut jelas berdampak pula di bidang politik-sosial seperti pembatasan hak-hak politik rakyat. Implikasinya juga akibat-akibat sosial, politik, dan budaya. Proyek transmigrasi dari Jawa dan Bali dengan sasaran pulau yang masih terbelakang? Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Irian Jaya telah menimbulkan dampak negatif di bidang sosial, budaya, dan ekologi. Antara lain, hutan gundul, yang timbul akibat dari kegiatan *land-clearing* yang tidak mengindahkan keseimbangan ekologis, dan hilangnya sumber daya ekonomi dan budaya penduduk asli masyarakat adat *(indigineous people)*.

Proyek Waduk Kedung Ombo.

Waduk Kedung Ombo dibangun antara tahun 1985 - 1993 dengan pinjaman dana sebesar 156 juta dollar AS dari Bank Dunia, ironisnya menggusur lebih dari 30.000 penduduk. Kebanyakan penduduk yang tergusur menolak ganti rugi yang kecil. Mereka menjadi sasaran intimidasi, termasuk ancaman di-"petrus", dicap "komunis" (yang bisa berarti kehilangan hak-hak sipil dan pengucilan diri dan keluarganya oleh masyarakat).

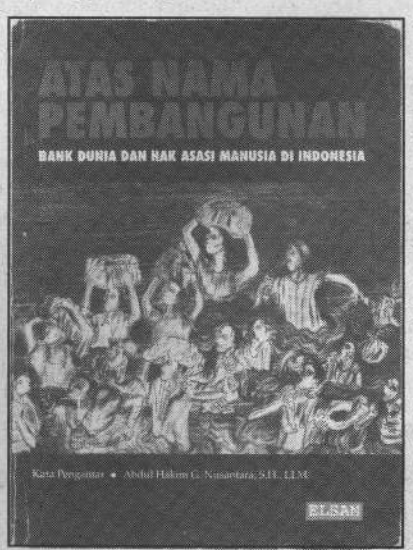

Pada tahun 1993 setelah kekalahan penduduk di sidang tingkat Pengadilan Negeri dan banding. Mahkamah Agung memenangkan gugatan 34 penduduk yang menuntut ganti rugi yang layak. Herannya, dengan alasan administratif, keputusan MA tersebut baru diumumkan setahun kemudian. Itu pun pemerintah langsung mengajukan keberatan, dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan MA. Tanpa diduga keputuan tersebut langsung dibatalkan.

Pinjaman Program KB

Program KB di Indonesia menurut laporan Bank Dunia disebut sebagai salah satu "transisi demografis yang paling mengesankan di sebuah negara berkembang". Masalah hak asasi yang terangkat dalam program tersebut antara lain : masalah reproduksi terpusat di seputar mobilisasi massal kaum hawa agar menerima alat kontrasepsi tertentu tanpa pemeriksaan yang memadai apakah alat kontrasepsi itu sesuai dengan orang tersebut atau tidak. Satu kritik yang selalu dilancarkan terhadap Indonesia terpusat pada paksaan yang diterapkan dalam program KB, demi mencapai tingkat "akseptor" yang tinggi.

Penghormatan hak-hak asasi manusia, tentu tidak dapat diabaikan beguti saja dalam setiap perencanan dan kegiatan pembangunan.

Setidaknya problematika hak asasi manusia yang digusur oleh proyek-proyek atas nama pembangunan, misal di Kedung Ombo, dan program KB dengan safarinya, akan terkuak melalui buku ELSAM yang bekerja sama dengan LCHR ini. Tentulah bukan kita ingin menolak proyek-proyek yang dibiayai oleh Bank Dunia, namun kiranya lembaga multilateral mempertimbangkan *record* hak asasi manusia negara peminjam. Artinya, ternyata *human rights impact assesment* dijadikan rel utama pengucuran dana tersebut.

Rudi Isbowo
Mahasiswa Sastra UGM

Kiat Menjadi Manajer Berhasil

Judul buku : Reflections For Managers Renungan Para Manajer
Kumpulan Ilham & Kebijaksanaan Manajer-manajer Terbaik di Dunia
Penulis : Bruce Hyland dan Merle Yost
Penerjemah : Bern Hidayat
Penerbit : PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996

Buku panduan manajer sangatlah banyak, namun secara substansial buku tersebut kurang menyentuh . Ini terbukti dengan banyaknya hubungan disharmoni yang terjadi dalam sebuah perusahaan, sehingga suatu perusahaan tidak bisa berkembang maju mengikuti dinamika zaman.

Melacak lebih jauh, akar permasalahan sebenarnya terletak pada kemampuan seorang manajer dalam membina keberlangsungan suatu lembaga. Karena di manajerlah kepemimpinan dan komunikasi antar elemen perusahaan bertumpu.

Alasan mendasar di muka, membuat buku sederhana ditulis. Membaca secara detail, sebenarnya kekuatan buku yang ditulis oleh Bruce Hyland serta Merle Yost ini terletak pada dua hal, yakni pendidikan kedua penulis yang berada dalam ligkungan perusahaan. Di samping itu pendidikan dan pengalaman para karyawan di tempat kedua penulis bekerja menjadikan ilham tersendiri.

Renungan Kebijaksanaan

Banyak buku untuk para manajer yang sudah terbit, kebanyakan menyajikan nasihat-nasihat serta memfokuskan pada metode-metode mutakhir. Tetapi buku ini isinya merupakan prinsip-prinsip manusiawi yang menyentuh hati, yang mencoba menguak kebenaran-kebenaran abadi.

Renungan Para Manajer ini mengetengahkan kebijaksanaan beberapa manajer dan eksekutif sukses di dunia, yang diminta memaparkan apa yang mereka anggap sebagai peratutan-peraturan manajemen paling efektif. Tanggapan mereka mencerminkan tata krama dan hubungan antarmanusia paling mendasar, tertuang dalam 64 renungan kecil yang diungkapkan dengan bijak dan cerdik. Masing-masing renungan akan mengingatkan Anda—justru pada saat Anda sibuk atau merasa tertekan—pada apa yang benar-benar penting dan apa yang tidak (hal iii).

Di bagian akhir buku ini, setiap manajer akan mendapatkan kritik yang konstruktif. Dan kondisi batin manajer semakin segar ketika petunjuk yang blak-blakan, seperti kenalilah bagan organisasi yang sebenarnya... Rayakan keberhasilan... Dengarkan kata-kata yang tak terucapkan telah Anda baca.

Delapan Pintu Menuju 'Surga'

Bruce Hyland dan Merle Yost dalam ide-idenya mencoba memberi 'surga' buat para manajer untuk menuju keberhasilan. Dan ini dituangkan dengan memberi delapan kunci pembuka di setiap bab.

Pertama, **kepekaan.** Pada kunci awal ini disadarkan pada sikap peduli pada setiap anak buahnya. Seorang manajer harus menyadari bahwa orang bukanlah buruh semata, tapi butuh sentuhan-sentuhan manusiawi. Maka dalam taraf ini manajer perlu mengucapkan terimah kasih, menghormati perbedaan, komunikatif dengan bawahan.

Kedua, **politik perusahaan.** Manajer dituntut menggunakan kalimat yang tepat serta mengenali kewajibannya. Manajer untuk meluangkan waktu agar mengerti lingkungannya. Dan yang terpenting jangan meninggalkan kesan buruk.

Ketiga, **kepemimpinan.** Manajer sehafusnya bertanggung jawab atas perasaan dan tindakannya sendiri. Jangan main kuasa, apalagi menyimpang dari rel. Sehingga, manajer memahami pemikiran para karyawan.

Keempat, **gambaran menyeluruh.** Bab ini mengingatkan para manajer untuk memahami gambaran yang menyeluruh. Jangan mengabadikan keputusan... Pikirkan kualitas... Dan jangan mengharapkan *Happy Ending.*

Kelima, **membangun tim.** Manajer harus mengenali anggota-anggotanya. Setelah itu mendefinisikan peranannya dengan jelas. Jangan sekali-kali memerintah karyawan melainkan ajukan permintaan pada mereka.

Keenam, **tugas rutin.** Langkah terpenting adalah mengenali struktur kekuasaan. Tetapkan sistem... Temukan dan atasi masalah sebenarnya... Memperkuat sistem pendukung pribadi... Jangan takut minta bantuan... Katakan saja "tidak".

Ketujuh, **teknik.** Bagian ini menitikberatkan pada visi yang harus didukung oleh tindakan nyata. Mengingatkan jangan sampai seorang manajer kehilangan kontak... Dengar suara-suara yang tak terucapkan...

Belajar mengutarakan ketidaksetujuan tanpa marah... Bersikap diplomatis tanpa mengorbankan inti pesan...

Kedelapan, **citra.** Kunci terakhir ini mementingkan citra seorang manajer. Beberapa di antaranya penampilan... Jagalah diri sendiri... Libatkan diri tapi jangan sampai tenggelam. Dan juga selalu mengembangkan profesionalisme di manapun.

Khoirul Rosyadi
Mahasiswa Filsafat UGM

Judul :Pemberontakan Organisai Papua Merdeka
Pengarang : John RG Djopari
Penerbit : PT. Grasindo, Jakarta, 1993

Papua yang Resah

ABRI semula yakin dapat membebaskan semua sandera dari tangan OPM (Organisasi Papua Merdeka), kini harus menelan kenyataan pahit. Di luar dugaan, aksi penyanderaan itu kian sulit dikuasai. Upaya negoisasi yang melibatkan pastur serta ICRC seolah buntu.

Belakangan situasi runyam itu kian diperburuk dengan tewasnya 10 prajurit ABRI oleh anggota ABRI sendiri yang stres. Diakui, kondisi medan memang tidak enteng. Hanya prajurit yang tangguh saja yang mampu bertahan. Peristiwa ini jelas memukul muka ABRI sebagai satu-satunya peluang guna membebaskan para sandera.

Sesungguhnya bagaimana sosok OPM itu? Sampai membikin ABRI kerepotan. Menjawab pertanyaan ini, buku ini cukup memberikan informasi seputar latar belakang OPM, pola gerakannya, dan cita-cita OPM.

Asumsinya untuk meringkus pencuri maka yang harus diketahui adalah siapa, apa, dan bagaimana pencurinya.

Buku ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Johannes Rudolf Gerzon Djopari, putra daerah Irian Jaya. Sebagai anak pribumi, secara tak langsung, ia cukup memahami sosok OPM.

Pemberontakan OPM dimulai di Manokwari, 26 Juli 1965. Dipimpin oleh Sersan Mayor Permenas Ferry Awom. Selang 2 tahun setelah Irian Jaya pindah tangan dari Negara Belanda ke Indonesia, tanggal 1 Mei 1963. Sebelumnya embrio pemberontakan ini mulai dicetuskan jauh sebelum itu, yaitu sekitar tahun 50-an. Secara estafet aksi ini menjalar ke seluruh Irian Jaya. Saat itu pemerintah Indonesia sudah menempatkan pos-pos militer di daerah baru itu. Pos-pos keamanan ini ternyata menjadi sasaran utama kaum pemberontak OPM. Boleh jadi dengan menyerang pos dan merampas amunisi akan menambah lengkap persenjataan mereka. Kebanyakan pemberontak OPM merekrut suku-suku di sekitar Irian Jaya yang mau bergabung.

Akar yang menyulut pemberontakan OPM bertalian dengan sikap pemerintah Indonesia sendiri. Saat itu, masih berlangsung masa transisi dari kekuasaan Belanda ke Indonesia. Masa Belanda, bagi sebagian penduduk Irian, diakui lebih baik dibanding di pangkuan Indonesia. Karena masih dalam proses pengenalan, pemerintah Indonesia gencar memberi janji-janji. Sayangnya janji itu nonsens. Akibatnya, menimbulkan frustasi dan resistensi mendalam di kalangan rakyat Irian. Sementara, pada masa berintegrasi dengan republik, mereka secara psikologis justru lebih banyak dirugikan.

Pemerintah banyak mengungkapkan kata-kata vulgar ketika menunjukkan Irian Jaya ke dunia luar. Kata-kata seperti primitif, biadab, jorok, hanya berkoteka, terbelakang, (hal. 107).

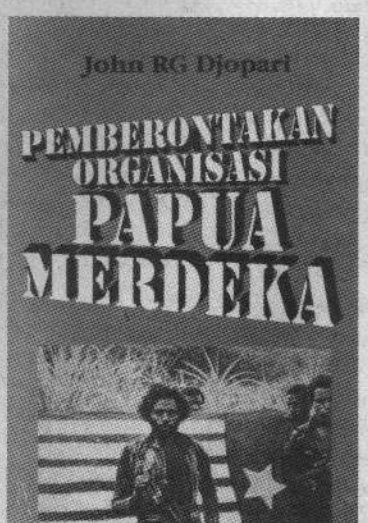

Secara garis besar, penyebab pemberontakan OPM dapat dipetakan menjadi lima aspek. *Pertama,* aspek politik, pemerintah Belanda menjanjikan negara (boneka) Papua yang terlepas dari Republik Indonesia. Namun, rencana itu kandas karena Irian Jaya harus dikembalikan ke Indonesia, lewat perjanjian New York 1962. Akibatnya, para pemimpin yang termakan janji itu kecewa berat dan mencari jalan lain demi mewujudkan keinginannya. *Kedua,* aspek ekonomi, macetnya distribusi sandang pangan karena ulah petugas RI yang ada di Irian Jaya. Oknum tak bertanggung jawab ini memborong barang-barang vital dan dilempar ke daerah lain demi keuntungan pribadi. Padahal, pada masa pendudukan Belanda, kondisi ini tidak pernah terjadi. *Ketiga,* aspek psikologis, sebagian besar rakyat Irian Jaya pendidikannya masih rendah. Antara rasio dan emosinya belum seimbang sehingga mudah dipengaruhi dan dihasut. *Keempat,* aspek sosial, pada masa Belanda, mereka diberi kesempatan untuk menempati jabatan pemerintah lokal. Secara sosial mereka dihargai sebagai *indegenous people,* yang merasa memiliki kekuasaan di daerah sendiri. *Terakhir* aspek ideologis. Masyarakat Irian berkembang mitos seorang pemimpin besar sebagai Ratu Adil. Nantinya, pemimpin ini diharapkan akan merubah kehidupan ke arah yang lebih baik dan sejahtera. Di Biak gerakan ini dikenal gerakan Koreri *(heilstaat).*

Buku ini, tanpa berniat mengurangi nilai kehadirannya karena kelemahan tampilan dan bahasanya yang terlalu formal, tetap referensi yang layak bagi pembaca. Apalagi, buku ini mengungkap dengan detil dan transparan tentang aspek-aspek yang rawan dari propinsi Irian Jaya. Paling tidak, dengan membacanya, kita akan ditunjukkan sisi lain yang selama ini tersembunyi.

Kusbiantoro E

NIAS

Dari Lowalangi ke Lowalangi

Jalan setapak itu seakan-akan tampak tak akan membawa siapapun yang melewatinya ke suatu tempat. Rindang pohon menutupi setiap kelokannya, dan orang-orang dengan wajah dingin sesekali melintas, dengan buntalan di atas kepalanya atau senjata tajam terselip di pinggangnya. Bau busuk getah karet beku yang mereka pikul dengan sebatang bambu menguar tajam bercampur dengan wangi bunga sedap malam yang muncul dari sesemakan.

Lalu tepat di ujung gerumbul pohon karet, jalan setapak itu hilang, dan di sebaliknya, sederet anak tangga batu menghadang langkah. Sepasang bangunan megalitik menjaga deretan anak tangga itu. Anak-anak berpakaian kumal berlarian di sekitar. Di ujung anak tangga, terbentanglah pemandangan yang menakjubkan. Bangunan megalitik bermunculan di jalan selebar 60 meter yang berlapis lempengan-lempengan batu.

Sebagaimana layaknya desa-desa di Nias Selatan, jalan semacam itu membelah perkampungan menjadi dua deretan rumah-rumah yang saling berhadapan. Rumah-rumah beratap rumbia, dengan babi yang berkeliaran di kolong-kolongnya, yang seakan penuh oleh tiang-tiang yang dipancangkan dengan cara yang rumit.

Lahusa, itulah nama desa tersebut. Lahusa adalah desa tertua di Nias Selatan. Seperti umumnya desa-desa di Nias, Lahusa dibangun di atas sebuah perbukitan. Konon, peperangan antar desa di Nias begitu sengitnya hingga setiap desa cenderung dibangun di atas bukit atas alasan keamanan. George Hammerle, seorang pastor berkebangsaan Jerman yang telah menekuni kebudayaan Nias selama tak kurang dari 14 tahun, mengakui bahwa kultur orang Nias pada umumnya adalah kultur perbukitan. Ini menjelaskan pilihan hidup orang Nias atas aktivitas perladangan.

Kondisi geografis Pulau Nias yang berbukit-bukit menyulitkan mereka untuk membuka areal

Hatta

Bangsawan Nias.
Stratifikasi sosial yang telah berubah.

pertanian di tanah datar. Oleh sebab itu, maka bisa dipahami bila kemudian areal perladangan menjadi cukup penting untuk dipertahankan.

Yupiter Dachi, seorang keturunan raja yang berkuasa di Hilisimaetano, mengatakan bahwa perang antar desa tersebut terjadi sering atas alasan-alasan kekuasaan. Satu yang masih diingat orang-orang Hilisimaetano, misalnya, ketika dua puluh lima penduduk desanya menjadi korban penyerbuan orang-orang Bawomataluo tepat di areal persawahan Hilisimaetano. Areal persawahan memang aset langka di Nias. Dan salah satu desa yang memiliki areal persawahan yang cukup luas adalah Hilisimaetano.

Tak jelas benar kapan peristiwa tersebut terjadi, tapi menilik berharganya persawahan bagi sebuah desa, maka wilayah kedaulatan mesti dipatok dan dipertahankan. Dan walaupun toh lamat-lamat, Nias penuh dengan cerita pertentangan semacam itu. Sekilas, tertangkap kesan bahwa bau pertentangan itu masih tercium hingga sekarang.

Lewat cerita turun temurun (orang Nias tak mengenal tradisi tertulis), setiap generasi mewakili kisah-kisah perseteruan seperti yang berlangsug pada Yupiter Dachi. Bapak berputra tiga yang berumur tiga puluh lima tahun ini masih berapi-api menceritakan kisah pertempuran itu.

Desa-Desa yang Berdaulat

Desa-desa di Nias tersebar di perbukitan yang memenuhi daerah selatan pulau Nias. Walaupun rata-rata berada di puncak bukit, anehnya kebudayaan Nias disusun dalam bangunan-bangunan megalitik yang tentu saja berbahan baku batu-batu besar. Menurut Tafali Dachi (65 tahun), seorang tetua adat di Hilisimaetano, batu-batu itu diangkat dari sungai-sungai yang menjalar di lembah-lembah dan ngarai-ngarai.

Di Bawomataluo, desa terbesar di Nias Selatan, terdapat semacam altar batu dengan panjang empat meter dengan lebar tak kurang dari dua meter di depan *omo sebua* (rumah besar). Ini tak aneh sebenarnya, bila kita ingat bahwa masyarakat Nias tersusun dalam struktur feodal yang ketat dimana raja adat berkuasa penuh. Altar di Bawomataluo itu dikabarkan diangkat ke atas bukit dengan tenaga manusia sekitar satu abad yang lalu, memakan waktu berbulan-bulan dan memakan korban yang tidak sedikit. Atas titah raja, tentu saja.

Raja-raja tradisional Nias berkedaulatan pada satu desa dimana ia tinggal. Dan kekuasaannya berlangsung turun temurun. Silsilah dari raja-raja itu membentang tak kurang dari lima puluh generasi ke belakang, bercampur aduk antara tokoh-tokoh faktual dan tokoh-tokoh yang termistifikasi dalam penuturan turun temurun dari generasi ke generasi.

Walaupun orang-orang Nias percaya bahwa mereka berasal dari satu nenek moyang yang sama, yaitu yang berasal dari Gomo (Nias Tengah), tapi toh perang antar desa tetap saja terjadi. Selain alasan-alasan kekuasaan atas aset ekonomi seperti yang terjadi pada perseteruan HIlisimaetano dan Bawomataluo, sulit untuk menjelaskan alasan lain. Bambowo Laiya, seorang putra Nias yang berhasil meraih gelar doktor, menulis dalam bukunya yang berisi tentang solidaritas dalam masyarakat Nias, bahwa salah satu penyebab berdirinya suatu desa adalah konflik yang tak terselesaikan, yang menyebabkan sekelompok orang memisahkan diri dari desanya semula untuk menciptakan kedaulatannya sendiri.

Oleh sebab itu, maka bisa dipahami kemudian kenapa masyarakat Nias terpecah menjadi kedaulatan-kedaulatan yang rentan terhadap potensi konflik.

Inspirasi Kebudayaan

Bagi dunia beradab, mengayau kepala manusia adalah sesuatu yang sukar dipahami. Tapi adat Nias justru mengafirmasi hal tersebut. Tak ada bukti tertulis yang mengisahkan kapan terakhir pemenggalan kepala manusia itu masih dilakukan. Melkhior Dukha, seorang pengelola museum Nias di Guningsitoli, percaya bahwa empat puluh tahun yang lalu hal itu masih dilakukan di pedalaman Nias.

Adat, dengan caranya sendiri, menciptakan semacam mekanisme yang memungkinkan pemenggalan kepala itu mendapatkan tempatnya dalam tata cara masyarakat Nias. Seorang pemuda yang

Hatta

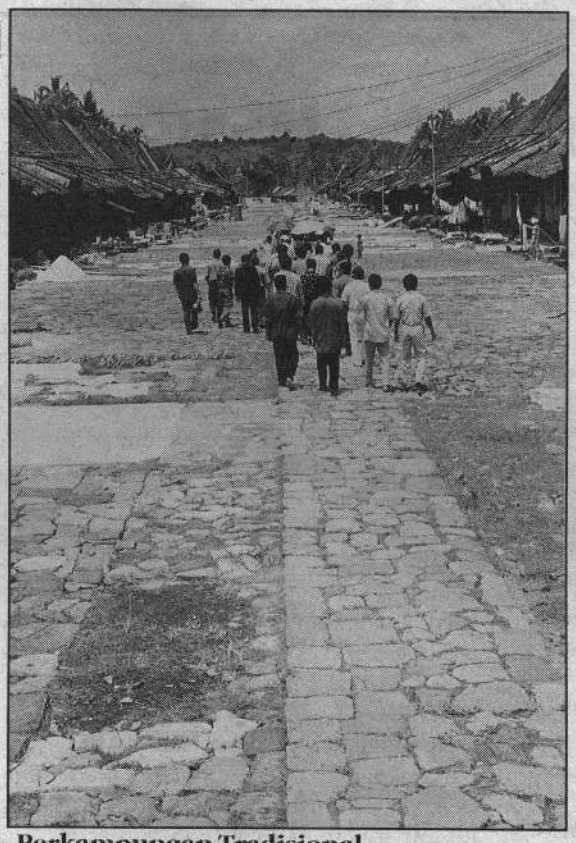

Perkampungan Tradisional.
Struktur masyarakat yang feodalistik.

Hatta

Rumah Adat.
Tak lagi mewadahi nilai-nilai lama.

Dari Persia Hingga Delft

Sumber tertua yang menyebutkan keberadaan pulau berluas 4772 kilometer persegi itu ditulis oleh para pedagang Arab dan Persia pada tahun 851 dan 1154 Masehi. Disebutkan dalam sumber itu bahwa pulau tersebut adalah "sebuah tempat dimana kanibal dan pemburu kepala manusia hidup".

Istilah "Nias" sendiri, disebut pertama kali dalam catatan Kapten Cauw, yang melakukan survey untuk kepentingan VOC di pantai barat Sumatra tahun 1664. VOC melakukan monopoli perdagangan minyak kelapa dan budak dengan penduduk Nias atas jasanya mengusir pedagang-pedagang Aceh saat itu yang rupanya banyak merugikan orang-orang Nias.

Selain Belanda, Inggris juga pernah menginjakkan kaki di pulau itu, melakukan perdagangan di sana, dimulai tahun 1756. Pada tahun 1822. Stanford Rafles menulis tentang pulau ini. Persaingan dagang dengan Belanda sempat terjadi, sebelum pada tahun 1825 Belanda mulai lagi menancapkan kekuatan perdaganngannya.

Tahun 1864, Pulau Nias praktis jatuh berada dalam kekuasaan Belanda. Sejak itulah kemudian mata Barat terbuka oleh keberadaan pulau Nias oleh berbagai laporan mengenai pulau tersebut.

Survey ilmiah pertama dilakukan pertama kali di bawah pemerintahan Belanda, oleh Nieuwenhuisen dan Rosenberg tahun 1854-1855. Laporannya yang diterbitkan pada tahun 1863 merupakan studi lengkap pertama mengenai Nias. Berturut-turut laporan-laporan lain ditulis oleh Modligiani, Schroder dan Schnitzger.

Agama Kristen sendiri masuk tahu 1865. Hingga saat ini, agama Kristen merupakan agama mayoritas penduduk Nias. Laporan tentang kebudayaan Nias yang ditulis oleh missionaris diterbitkan tahun 1892.

Tahun 1989-1990, di Delft, Negeri Belanda, dilakukan Pameran Nias dengan judul Nias Tribal Treasures. Pameran ini dilakukan dalam rangka peringatan 125 tahun Museum Etnologis Nusantara di Delft. Sebuah bunga rampai berisi tulisan-tulisan tentang Nias berjudul sama diterbitkan mengiringi pameran tersebut❑

Dirmawan Hatta

Hatta

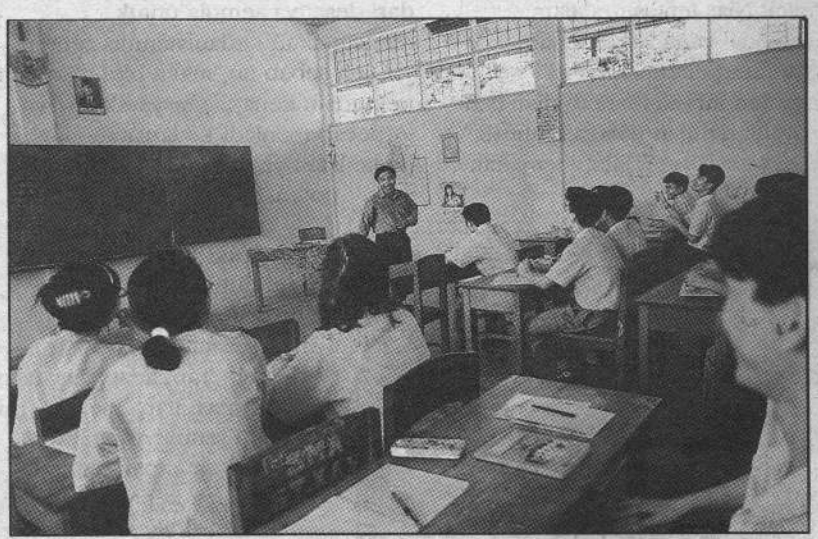

Sebuah Sekolah di Gunungsitoli.
Menebak arah baru

meminang seorang gadis misalnya, dapat mempersembahkan sebuah kepala musuh untuk membuktikan kejantanannya. Georg Hammerle menuturkan, bahkan seorang raja yang meninggal dapat mengakibatkan tiga kepala manusia terpenggal untuk mengiringi pemakaman dirinya. Kepala-kepala manusia itu digunakan untuk menyangga tubuhnya yang terbaring di peti mati.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa simbol-simbol dalam kebudayaan Nias diciptakan dari inspirasi perang, atau setidak-tidaknya maskulinitas dan keperkasaan seorang laki-laki Nias yang berangkat berperang. Tari-tarian Nias kebanyakan menggambarkan peperangan. Lompat batu yang tersohor itu adalah semacam *sport* yang digunakan untuk tujuan-tujuan perang. Patung-patung tempat dimana orang Nias mengaktualisasikan dirinya sering digambarkan dalam ukuran, maaf, kemaluan laki-laki yang tidak proporsional.

Patung-patung juga digunakan untuk kepentingan-kepentingan religius. Orang Nias mempersonifikasikan dewa-dewa yang beragam jumlahnya dalam patung-patung dan sekaligus menyembahnya. Itulah sebabnya kenapa kemudian kebudayaan Nias banyak menghasilkan patung-patung.

Dari Pergeseran ke Pergeseran

Menjadi bagian dari sebuah republik yang tengah gempita membangun dirinya, bisa kita bayangkan bahwa lalu Nias terlempar ke sebuah diskursus yang asing dan berbeda dari yang telah dijalaninya selama berabad-

abad. Nias hari ini adalah Nias yang tengah mencari bentukan baru dari sintesa yang belum selesai sejak paruh kedua abad ke-17, ketika armada dagang Belanda membuka mata Barat terhadap keberadaan pulau ini. Menyimpan berbagai potensi perdagangan, diantaranya rempah-rempah dan emas, akhirnya Nias terbuka dari isolasi selama berabad-abad.

Dan persentuhan dengan nilai-nilai asing selalu berarti pergeseran nilai di tubuh masyarakat Nias sendiri. Untuk selanjutnya orang-orang Nias mengenal mata uang dan komoditas perdagangan. Antara lain adalah budak. Budak, yang semula merupakan salah satu bagian stratifikasi sosial murni Nias, tiba-tiba menjadi sesuatu yang bisa diperdagangkan dengan pedagang-pedagang Aceh. Budak telah berubah nilai dan fungsi. Ini toh tak bermakna apa-apa bila tidak kita ingat bahwa pergeseran sepele semacam itu akan menandai transformasi besar-besaran selanjutnya pada masyarakat Nias.

Satu yang menyolok adalah pemakaian istilah Lowalangi untuk penyebutan Allah. Lowalangi adalah cara penyebutan orang-orang Nias terhadap Dewa dari Dunia Atas dalam sistem kepercayaan animis mereka. Lalu, tiba-tiba Lowalangi menjadi bagian dari sistem etika agama modern yang asing.

Sulit untuk melacak kembali secara tepat transformasi yang terjadi, tapi Tafali Dachi memberikan kesaksian bahwa atas otoritas Si'ulu Barani, maka perpindahan kepercayaan itu dapat terlaksana pada waktu itu. "Apa perintah raja, kami turut.." kata Tafali Dachi dalam bahasa Indonesia yang patah-patah. Si'ulu Barani adalah raja adat yang hidup di Hilisimaetano dari paruh kedua abad ke-20 dan paruh terakhir abad ini.

Orang Nias tak pernah mempersoalkan hal ini. Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) —sekte Kristen terbesar di Nias— sendiri pun telah berdiri di Nias selama setidaknya 165 tahun. Saat ini, di Nias Selatan terdapat enam sekte Kristen. Data statistikpun menunjukkan bahwa mayoritas agama penduduk Nias adalah Kristen.

Tapi betulkah bahwa orang Nias telah kehilangan religiusitas murni animisme mereka?

Sulit untuk menjawab pertanyaan ini. Tapi seandainya benar, maka kepunahan tradisi Niaspun membayang. Itu bila kita terima bahwa motivasi-motivasi religius animisme merekalah yang mendorong pesatnya peradaban masyarakat Nias sebelum tersentuh oleh pengaruh asing. Dan bila benar terjadi, maka patung-patung, tradisi, ritual-ritual yang dilaksanakan hari ini akan menjadi replika mekanistis belaka.

Industri pariwisata yang berkembang di Nias Selatan adalah salah satu faktor yang turut menciptakan pergeseran di dalam masyarakat Nias, meskipun toh di sisi lain ia memberikan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat Nias. Dewasa ini dilakukan usaha-usaha yang bertujuan untuk lebih menarik wisatawan asing untuk datang ke Nias. Desa-desa tradisional mempercantik dirinya, ritual-ritual dijadwalkan kembali pelaksanaannya, dan orang-orang belajar kembali membuat ukir-ukiran. Tapi toh, bila semua itu dilakukan dengan tujuan-tujuan atraksi dan komoditisasi belaka, tidakkah akan makin menjauhkan orang-orang Nias dari dirinya sendiri?

Agaknya memang terasa naif untuk membayangkan Nias steril dari dunia luar. Sebab kehadiran negara pun telah merubah berbagai bagian dari sisi masyarakat Nias. Kehadiran birokrasi telah menggeser peran-peran adat yang semula dipegang oleh *Si'ala* (raja adat) dan *Si'ulu* (tetua adat). Regulasi formal kenegaraan juga telah menyingkirkan aturan-aturan tradisional yang barangkali telah punya *reasoning*-nya sendiri selama beratus sebelum Pemerintah Republik Indonesia berdiri.

Maka, perjalanan berabad-abad manusia Nias dalam mengaktualkan dirinya dalam kosmos yang mereka pahami dan percayai sendiri agaknya harus kepergok perubahan saat ia tiba-tiba menjadi bagian dari sebuah unifikasi yang lebih punya kekuatan dibanding dirinya. Entah itu Indonesia Raya, ataukah itu trend global yang dihembuskan oleh pariwisata, ataukah itu gereja.

Barangkali tak ada yang salah dengan itu, tapi yang sering kita lupa, adalah bahwa ada yang musnah ketika kebaruan-kebaruan diciptakan, yang kadang tak selalu diinginkan dengan kesadaran penuh. Dan manusia Nias adalah sebuah potret samar-samar dari sebuah masyarakat yang belum kunjung selesai mendefinisikan identitasnya yang baru❑

Dirmawan Hatta

Hatta

Replika Patung Nias di Museum Pusaka Swasta Nias di Gunungsitoli.
Membekukan jejak sejarah.

Istimewa

Menutup Jendela Dunia

Among Kurnia Ebo
Mahasiswa Sastra Indonesia UGM, Redaktur Majalah HUMANITAS KMSI UGM, dan Pemenang Lomba Minat Baca DIY 1995 Perpustakaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berapa banyak dosen yang benar-benar telah mengajak mahasiswanya untuk berpikir kritis, logis, sistematis, metodologis, dan komprehensif? Sifat-sifat yang memang semestinya melekat di kalangan intelektual!

Jika saja Aristoteles tidak menuliskan refleksi-refleksi filosofisnya, barangkali peradaban dunia tidak akan semaju sekarang. Jika saja teori relativitas tidak dituliskan Einstein, mungkin perkembangan sains tidak akan sedasyat sekarang. Jika saja manuskrip-manuskrip orang Islam tidak dimusnahkan, barangkali era kejayaannya masih tetap berlanjut sampai sekarang. Jika tidak ada tulisan, barangkali kita sekarang masih menjadi manusia primitif.

Tulisan ternyata menyimpan kemanfaatan yang demikian luar biasa. Beberapa fenomena yang dicontohkan di depan hanyalah ilustrasi sederhana untuk sekedar menggambarkan nilai kedasyatan itu. Bahkan milinium informasi yang sarat dengan kecanggihan-kecanggihan di berbagai bidang kehidupan dewasa ini, sama sekali tidak bisa dilepaskan dari peran tulisan.

Maka adalah keputusan yang sangat aneh sesungguhnya kalau kita saat ini hendak dikembalikan ke masa nirtulisan. Keputusan Rektor Universitas Indonesia, Prof. MK Tadjoeddin, beberapa waktu lalu yang menghapuskan tugas skripsi bagi mahasiswanya sungguh sebuah kebijakan yang boleh disebut lucu, kalau tak boleh disebut konyol. Kebijakan itu sama saja hendak menggiring mahasiswa ke lembah kegelapan karena mengajak calon intelektual menjauh dari budaya tulisan. Padahal, budaya tulis adalah "gaya hidup" yang memang seharusnya menjadi ciri khusus masyarakat akademis.

Jika keputusan itu dilontarkan oleh pimpinan tertinggi salah satu IKIP, mungkin kita bisa bicara lain. Ini karena IKIP memang mempunyai orientasi yang berbeda dengan universitas. Di sana yang terutama dipelajari adalah ilmu pendidikan dan pengajaran, yang *notabene* lebih bersifat praktis atau terapan.

Tetapi, keputusan itu lahir dari sebuah universitas ternama, yang dikenal telah banyak melahirkan orang-orang penting di negeri ini. Dilihat dari konvensinya, universitas adalah sebuah institusi yang orientasinya pada pengembangan sains, baik dilakukan lewat proses pengajaran maupun penelitian. Dengan hakikatnya yang begitu mestinya universitas dijadikan tempat untuk menggodok konsep-konsep dan aksioma-aksioma ilmu, hal-hal yang cenderung bersifat teoritik daripada praktik.

BERPIKIR PARADIGMATIK

Jika di universitas skripsi dihapuskan, bagaimana esensi tadi bisa diwujudkan? Padahal, skripsi adalah salah satu media yang potensial bagi pengembangan sains. Sebab, dengan menyusun skripsi, seorang mahasiswa dituntut untuk memahami secara komprehensif suatu persoalan, yakni bidang yang hendak ditelitinya. Dan itu berarti, ia harus paham dahulu tentang apa yang telah ada di masa lalu, perkembangan yang terjadi kini, dan dengan itu ia kemudian memberikan *point* prediktif tentang apa yang mesti dikonstruk di masa mendatang. Dengan beginilah, ilmu menjadi terus berkembang dari waktu ke waktu.

Dengan skripsi mahasiswa diharapkan menjadi manusia yang bisa berpikir paradigmatik, yang mempunyai konsep tertentu atas suat persoalan, memiliki perspektif yang berorientasi jangka panjang, dan mampu mengabstraksikan kompleksitas permasalahan itu secara sistemik.

Intinya, dengan skripsi yang diinginkan adalah lahirnya orang-orang sekolahan yang mempunyai konseptualiasi yang tinggi. Tidak sekedar sarjana *waton*. Sebab, maksud skripsi adalah untuk "menemukan" sesuatu. Nah, untuk menemukan sesuatu itu, orang dituntut untuk lebih dulu mampu merunut persoalannya dari akar sampai ujung. Untuk bisa melakukan itu, orang harus terlatih melakukan konseptualisasi. Konseptualisasi atau kemmapuan konseptual itulah yang membedakannya dengan kalangan lain. Bahwa ia memang berbeda, berkapasitas lebih dalam berpikir dan menganalisis persoalan.

Konon skripsi dihapus karena ia menghambat para mahasiswa untuk cepat lulus. Dengan dihapuskannya skripsi, diharapkan tidak akan ada mahasiswa yang *ndongkrok* lama di kampusnya. Pemikiran ini boleh jadi benar, tetapi masih bisa dipertanyakan landasan berpijaknya. Kalau benar skripsi yang menghambat kelulusan mahasiwa, apakah langkah yang benar kalau upaya untuk mengantisipasinya dengan cara menghapuskan skripsi.

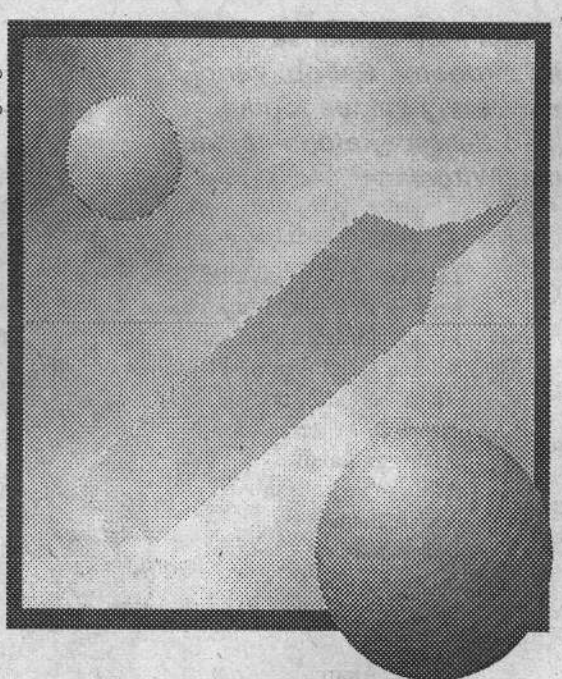
Agung

Cara ini tampak demikian pragmatisnya. Pragmatis berarti sebuah perilaku yang dipikirkan secara pendek. Seolah-olah yang terjadi adalah skripsi itu hanya semat-mata penghalang, musuh, ekstremis, yang hanya merugikan belaka sehingga tidak ada cara lain untuk memecahkannya selain menghapuskannya.

Tapi, benarkah skripsi biang keladi ketidaklulusan mahasiswa? Berapa persenkah mahasiswa yang merasa terhambat dengan kewajiban membuat skripsi? Tidakkan dosen bisa disalahkan kalau mahasiswanya tidak mampu menulis skripsi? Apa saja yang dilakukan dosen selama membimbing mahasiswanya kalau yang muncul kemudian adalah mahasiswa yang tidak mampu menuangkan gagasannya dalam sebentuk tulisan yang komprehensif? Sudah cukupkah kurikulum memberikan bekal yang memadai kepada mahasiswa agar ia bisa menjadi penulis bagi konsep-konnsep pemikirannya sendiri? Akhirnya, sekali lagi, benarkah skripsi layak dijadikan kambing hitam?

Sebelum memvonis mahasiswa mungkin ada baiknya para dosen kita itu pun lebih dulu berkaca. Sebab, barangkali juga benar sinyalemen yang menuding bahwa sebab ketidakmampuan sang mahasiswa menyelesaikan skripsinya justru karena dosen sendiri. Mereka tidak pernah membimbing bagaimana seharusnya sang mahasiswa membuat karya tulis. Yang dilakukan para dosen itu bertahun-tahun hanyalah memerintahkan mahasiwa untuk membuat makalah, paper, atau karya tulis lalu dikumpulkan pada saat yang ditentukan. Apakah setelah di tangan sang dosen tulisan mahasiswa tadi diteliti satu per satu lalu memberikan coretan-coretan di sana-sini untuk tujuan pembenahan ataukah ditumpuk begitu saja lalu di akhir semestar ia tinggal memberikan nilai semau-maunya, kita sudah sama tahu jawabnya. Makanya sebetulnya kita telah mahfum kalau di antara mahasiswa banyak yang tidak mampu menyusun skripsi.

DEGRADASI INTELEKTUAL

Maka barangkali betul juga kata seorang kawan bahwa dosen-dosen di Indonesia ini belum banyak berbuat untuk mencerdaskan mahasiswanya. Mungkin ada yang tidak, tetapi jumlahnya pasti tak seberapa. Masih bisa dihitung dengan jari dosen yang dalam kiprahnya benar-benar mengajak mahasiswanya untuk mampu berpikir kritis, logis, analitis, metodologis, dan komprehensif. Sifat-sifat yang memang harus dimiliki kalangan intelektual dan orang-orang modern.

Sekarang saja, ketika skripsi masih diberlakukan masih banyak sarjana yang tidak memiliki kemampuan seperti itu, yang kemudian sebagian besar jadi pengangguran karena ketidakmampuannya membaca zaman sehingga tidak mampu menciptakan peluang kerja bagi dirinya sendiri. Pertanyaannya kemudian, bagaimana dengan nanti, kalau skripsi sudah dihapuskan? Tidak saja di satu universitas, tetapi di seluruh universitas?

Bukan tidak mungkin, kita akan seperti katak dalam tempurung. Universitas akan berubah sekedar menjadi pabrik-pabrik yang begitu mudah dan cepatnya menghasilkan produk tetapi sesungguhnya isinya nol tanpa muatan kualitas. Dan yang lahir adalah sarjana-sarjana *cupet* pikiran atau "intelektual-intelektual" tukang yang tidak memiliki kearifan. Soekarno, Hatta, Sjahrir, Takdir, Yamin, yang semenjak muda telah berpikir bagaimana bisa memerdekaan negeri ini, tentulah orang-orang jaman dulu yang tidak termasuk dalam kategori ini karena semenjak masih menjadi *student* sudah sangat gila dengan pengayaan dan pengasahan intelektual.

Seorang kawan lain juga bilang generasi sekarang ini kian pragmatis dan mengalami degradasi intelektual. Bisa jadi benar karena kita menang semakin tidak terasah keintelektualannya. Dengan hapusnya skripsi di universitas, barangkali kita akan berpikir: masih mungkinkan akan lahir pemimpin-pemimpin besar di negeri ini dengan situasi yang demikian? Sebab, jendela dunia keilmuan telah ditutup dan kita belum tahu bagaimana harus mencari ruang baru yang berguna bagi pengembaraan intelektual generasi abad 21.

Semoga, itu hanya terjadi di Universitas Indonesia. Tidak merambat ke universitas lain!❑

WIMAR Witoelar :

Economy Roled by Power

"Perokonomian Indonesia sulit dianalisa dengan hukum-hukum ekonomi. Sebab, yang dijalankan adalah membuang semua logika ekonomi dan digantikan dengan kaidah-kaidah kekuasaan," ujar Wimar Witoelar.

MENDEN NF

Lelaki kribo ini berperawakan tambun, dengan bobot 105 kg dan tinggi 172 cm . Bungsu dari 5 bersaudara ini lahir pada tanggal 14 Juli 1945 di Padalarang. Dibesarkan dalam keluarga yang mapan secara ekonomis, tokoh yang satu ini memiliki karakter luar biasa; cerdas, kritis dan masih menyisakan idealisme dalam dirinya. Keempat saudara kandungnya, cukup dikenal di negeri ini, kakaknya Rahmat Witoelar adalah mantan Sekjen Golkar dan saat ini menjabat Duta Besar Indonesia untuk Rusia.

Gaya bicaranya santai. Bahkan terkesan datar. Namun isinya begitu tajam. Mengenakan T-Shirt dan celana pendek, tokoh yang memandu acara *Perspektif Baru* yang disiarkan oleh jaringan radio swasta di seluruh Indonesia, begitu larut dalam perbincangan dengan BALAIRUNG selama 3 jam . Di sebuah *Lounge* Hotel Aquila Prambanan-- hotel berbintang lima yang terletak di sisi Jalan Solo Yogyakarta -- Wimar bertutur soal perekonomian, kolusi bisnis, korupsi sampai transformasi kekuasaan. Berikut petikan wawancaranya:

Bagaimana anda menilai perekonomian Indonesia?

Sekarang ini ekonomi Indonesia semakin politis. Jadi, kita susah untuk mengkaji kebijakan pemerintah dari kata-katanya atau ketentuannya. Soalnya yang di jalan itu pasti sangat beda dengan yang di atas kertas. Dalam pelaksaannya sih, misalnya, Presiden bilang saya tidak senang monopoli, tapi dalam kenyataannya monopoli semua. Jadi, ekonomi Indonesia ini semakin tidak di*manage* oleh *policy*. Sehingga kalau menganalisa masa depan bisnis Indonesia sekarang, itu analisisnya pasti ekonomi politik. Akan tetapi, saya tak percaya itu akan berlangsung lama. Saya kira dalam perubahan pemerintahan yang akan datang ini akan berubah.

Mengapa konsep trickle down effect (efek tetesan rejeki ke bawah-red) yang dicita-citakan orde baru tidak kunjung muncul?

Ya, kalau kita bilang Orde Baru mulainya baik itu antara tanda kutip. Soalnya sudah jelek, sih karena tidak pernah pakai konsep-konsep ekonomi kerakyatan. Yang dipakai itu konsep *trickle down effect* yang bersifat sangat elitis. Waktu itu pun dibilang berbahaya. Tapi, sekurang-kurangnya Widjojo dan kawan-kawan itu barangkali khilaf, bukan sengaja menggerogoti. Kalau yang sekarang, kan memang sengaja karena tidak ada justifikasi sama sekali untuk berbagai kebijaksanaan yang kita lihat. Apakah itu IPTN, PT DSTP (Dua Satu Tiga Puluh, yang berencana memproduksi pesawat jet-red) dan sebagainya, apakah itu Petrokimia, Chandra Asri, susah mencari yang bener *policy*-nya.

Konsep ekonomi apa yang Anda nilai paling cocok diterapkan di Indonesia, Habibienomic, Widjojonomic *atau alternatif lain?*

Yang biasa-biasa saja lah. Nggak usah yang alternatif. Sebenarnya yang dijalankan (sekarang ini) adalah membuang semua rasio dan digantikan oleh kaidah-kaidah kekuasaan. Sebenarnya nggak ada tuh *Habibienomics* dan *Widjojonomic*. Yang ada itu *economics*, teknologi dan nggak bersaing. Kalau saya tanya apa beda teknokrat dan ekonom. Sama dengan membandingkan pencipta musik dengan pemain piano. Kalau pencipta musik memainkan piano mungkin hasilnya tidak akan begitu bagus, begitu juga sebaliknya. Jadi, semua punya perannya masing-masing. Karena, sebenarnya yang Habibie ingin justifikasikan mengenai *leap-frogging* (lompatan jauh ke depan-red), yang itu sangat simplistis. Lebih gampang dianalisis dengan analisis psikologis atau melihat motif-motif kecil yang ada di belakangnya.

Kalau kita bicara soal, industri atau teknologi, maka yang sangat kita butuhkan adalah basis R & D yang kuat. Sebab kalau tidak, nantinya kita akan membayar mahal dan tergantung pada teknologi barat berkaitan dengan hak milik intelektual. Bagaimana menurut Anda?

Barangkali, industri kita memang tidak harus terlalu dipaksakan untuk membuat bidang teknologi maju. Tapi, orientasinya harus *basic needs*, ke pasar di mana barangkali fungsi R & D (*Riset and Development*) itu lebih kecil. Secara ideal sebetulnya semua industri itu harus punya. Anggaran R & D sekitar 4 % atau 5 %. Tapi, sekarang struktur industri kita sangat tumpang tindih, dan tidak tepat guna. *Jnvesment strategy* yang betul itu adalah memanfaatkan kebutuhan-kebutuhan pasar kita yang banyak . Kalau misalnya orang mau membuat industri otomotif, kenapa harus mobil penumpang semua? Mengapa bukan traktor, irigasi atau pengolah tanah . Jadi, pendekatan tentang teknologi tepat guna, usaha-usaha yang lebih dekat pada kebutuhan itu yang di perlukan. Supaya R&D juga terjangkau, supaya memanfaatkan *resources* dalam negeri.

Bagaimana halnya dengan industri seperti IPTN?

IPTN itu menggunakan 300 konsultan asing yang berada di (jalan) Trikora. Pada waktu peluncuran N250 mereka itu semua diharuskan untuk mengambil cuti 3 hari boleh pilih mau ke Bali atau ke Singapura, tinggal di hotel berbintang lima dengan keluarganya. Karena kalau tidak, mereka akan berkeliaran di Bandung. Walaupun mereka tidak mengikuti upacara peluncuran, tapi banyak wartawan asing yang akan ketemu. Mereka akan ditanya apa kerjamu disini? Ini kan akan terbongkar. Saya tahu sebab saya tinggal di Bandung dan kenal orangnya. Jadi, *resources*, kalaupun ada di IPTN tidak akan produktif untuk orang banyak. Kita itu kadang-kadang sangat canggih dalam *hardware* ,tapi lemah dalam *soft ware*. IPTN komputernya canggih sebab saya pernah bawa orang dari Aero-space, perusahaan besar di Inggris. Dia ke IPTN dan saya tanya apa kesannya, "Saya belum pernah melihat alat-alat sebagus itu, tetapi sebetulnya mereka bikin apa ya?" Jadi, seperti musium teknologi. R&D di sini sering diartikan sebagai alat untuk men*set* laboratorium tetapi tidak mendidik keterampilan. BPPT, punya (program) dari Bank Dunia untuk pendidikan ke luar negeri, besar sekali. Tapi, yang pergi siapa itu, coba cek saja. Sebab, yang pergi itu tidak ada urusannya dengan pekerjaaan pembanguna di sini.

Kami melihat banyak BUMN belum dikelola secara bagus, padahal itu potensi pemasukan negara yang besar. Bagaimana prospek nya menurut Anda ?

BUMN yang berada di Indonesia itu sebagian besar sebetulnya bagus. Buktinya yang dipegang secara benar bisa untung. Yang saya tahu secara langsung misalnya PT BA sama Timah. *Masa* dalam satu sampai dua tahun bisa membalikkan itu perusahaan, dari rugi 300 milyar jadi untung 300 milyar. Padahal, waktu itu produksinya tidak begitu meningkat salesnya, tapi *overhead* nya (biaya-biaya tetap, selain biaya input, tanah dan bangunan-red) luar biasa dipotong. *Production cost*-nya itu benar-benar luar biasa digelembungkan. Dan itu indikatif dari perusahaan lain.

Itukah yang membuat kenapa BUMN sering merugi?

Karena pimpinan BUMN ini orangnya terlalu pinter. Orang suka mikir pimpinan manager BUMN ini bodoh, makanya nggak maju-maju.

Wimar memulai karier bisnisnya pada tahun pada tahun 1980. Mulai dari profesional manajer perusahaan kecil yang sekarang sudah tak ada, hingga menjadi Presiden Direktur PT Inter Matrix Bina Indonesia, sebuah perusahan konsultan manajemen dengan beberapa anak perusahaan. Semua kompetitif, bahkan berkali-kali menang dalam berebut tender dengan perusahaan asing. Perusahaan afiliasinya antara lain PT Inter Property (konsultan properti), PT Caksuraga Nusantara Media, yang memproduksi film untuk luar negeri, PT Inter Sinclair Knight dan PT Nusantara International Development Corporation.
Sebagai konsultan, soal kinerja perusahaan adalah santapannya sehari-hari.

Padahal itu pinter, pinter korupsi. Sebenarnya yang mereka lakukan betul-betul penggerogotan BUMN dalam berbagai tahap, dalam berbagai bentuk. Ada yang mengkorupsi profitnya, ada yang mengkorupsi inputnya, ada yang melepaskan asetnya. Motivasi untuk membuat BUMN itu maju itu hampir tidak ada. Dalam pemikiran managemen, saya mikirnya dalam segi kultur perusahaan. Tidak ada *reward* untuk manajemen yang efisien. Yang ada untuk managemen yang bersifat kolusif. Kalau Anda kerja di BUMN dan Anda punya ide cemerlang tiap hari, Anda tidak akan maju. Tapi kalau Anda mendukung korupsi atasan, membantu kolusi menteri, Anda akan lebih cepat maju. Setiap BUMN itu sebenarnya sapi perahan departemennya. Yang ada itu membuat mereka itu jangan bubar sama sekali. Soalnya kalau bubar itu habis sumber rezeki mereka. BUMN serugi apapun, direksinya tetap saja kaya.

Kenapa tidak ada keinginan dari kalangan profesional untuk memanagenya secara profit?

Karena Indonesia itu masih terlalu sedikit profesionalnya. Jadi, professional itu punya kebebasan memilih yang sangat besar. Profesional menengah ini sangat gampang cari uang. Saya tidak menyalahkan mereka. Kita harus membuat suatu sistem sehingga berbuat baik itu bukan suatu pengorbanan. Orang jadi Direktur BEJ itu gajinya 30 juta. Orang jadi Direktur Garuda itu gajinya 12 juta. Terus apa ia harus mengorbankan itu dan menyerahkan tempatnya pada orang lain, (sementara) perusahaannya tetap nggak maju. Pikiran orang itu begitu. Jadi, profesional ini tidak mapan selama dunianya masih abnormal gitu.

Bagaimana dengan swastanisasi ?

Privatisasi ini memang harus sih. Konsep BUMN ini dilahirkan dalam perekonomian sentral gitu . Dengan asumsi bahwa pemerintah itu tetap menjadi motor perekonomian.Begitu ekonominya dibikin jadi ekonomi pasar, maka BUMN ini menjadi seperti binatang-binatang zaman dulu. Tidak bisa hidup lama, seperti dinosaurus. Mereka harus cepat dibuat berkultur swasta. Sekarang misalnya PINDAD mau bikin kontrak sama perusahaan keuangan di Inggris, itu tak bisa karena diminta *balance sheet*-nya (neraca rugi laba-red) tidak ada. Kalau IPTN diberi *balance sheet*, orang akan bingung sekali, bagaimana bacanya. Pertama, karena rugi terus. Bagaimana suatu perusahaan yang rugi terus selama sepuluh tahun, sudah menghabiskan 4-5 milyar dollar tapi tidak bubar. Uang masuknya juga tidak jelas dari mana. Orang yang bekerja disana tidak belajar *finance* misalnya.Yang perlu dia tahu itu jadwal golf menterinya. Sebetulnya semuanya bisa dijelaskan oleh satu kalimat tadi,bahwa kekuasaan mengatur semua.Jadi kita tidak bisa lagi menganalisa secara ekonomi,karena sudah tidak ada logika. Jadi seperti yang saya bilang ada krisis kekuasaan sekarang. Dimana *power* itu tidak disertai dengan *authority*, kekuasaan itu tidak disertai dengan wewenang.Orang itu bukan merespek pimpinannya, tapi takut. Kekuasaan disini hanya pas untuk memelihara dirinya ,tidak pas untuk meng-*enforce policy*.

Kalau kondisinya demikian, bagaimana persiapan menghadapi pasar bebas nanti?

Jangankan menghadapi kompetisi bebas, mempertahankan yang ada sekarang saja tidak bisa. Tingkat pertumbuhan 7% rasanya tidak bisa.Pertama angka absolutnya (tingkat pertumbuhan sebelum dikurangi inflasi-red) makin lama makin besar, dan kedua, juga tidak *sustainable*.

Padahal mau tidak mau kita sudah harus siap

Kita tahu pasar bebas APEC itu dimulai tahun 2020. Itu hanya rencana fiktif. Orang tidak bisa lagi berproyeksi lebih dari 5 tahun kedepan. Dalam 5 tahun kedepanpun ada beberapa kewajiban pembebasan pasar dalam WTO yang sehari-hari didalam *fast- track*nya (percepatan penurunan tarif pada komoditas tertentu-red) yang AFTA di Asian, itu tidak akan terlaksana. Sebetulnya perusahaan Indonesia yang nonkolusi itu kuat .Tapi yang diizinkan tumbuh kan sedikit sekali. Yang punya usaha-usaha menengah dan atas itu pada dasarnya kolusi. Karena dasarnya kolusi dengan sendirinya tidak kompetitif alias jago kandang.

Bagaimana Anda melihat keunggulan komparatif yang digunakan sebagai daya tarik investasi ke Indonesia?

Ketiga asumsi yang dipakai itu semuanya salah. Satu, sumber daya alam berlimpah limpah, itu salah. Karena itu mengundang pengusaha ekstraktif untuk mengambil sumber daya alam disini.Kebetulan itu adalah jenis-jenis industri yang tidak punya banyak dampak sosial, tanpa melihat ekologi budaya di situ.

Kedua, upah buruh murah.Padahal bukan itu yang dicari. Karena komponen ongkos buruh itu tidak

REPRO :TIARA

Wimar Witular semasa mahasiswa. Bersama Sarwono Kusumaatmaja (kiri menghisap rokok) dan beberapa aktivis mahasiswa ITB di tahun 1966. Tengah merayakan kemenangan siapa?

penting, yang penting produktivitas. Yang penting profit yang besar, bukan *cost* yang kecil. Biar saja membayar *cost* besar kalau untungnya besar.

Ketiga, mereka dijanjikan stabilitas politik.Padahal yang diperlukan adalah stabilitas lingkungan usaha. Jadi, peraturan yang tetap. Seperti di Thailand, pernah dalam satu tahun, tiap bulan kudeta, tetapi peraturan tidak berganti. Di sini mungkin 30 tahun tidak ada kudeta, peraturan bisa berubah setiap saat. Satu departemen bisa hilang dalam satu malam. Investor tidak membandingkan dengan kondisi masa lalu, tapi membandingkan kondisi sekarang dengan tempat lain.

Bagaimana dengan agenda agenda ekonomi kerakyatan ?

Ekonomi kerakyatan itu paling bagus tapi saya kira nggak usah langsung kesitu. Menghilangkan korupsi aja sudah lumayan. Mengembalikan transparansi itu sudah bagus. Kalau kita coba masukkan suatu konsep yang sangat canggih itu susah,takut nggak jalan .Jadi, biasa-biasa aja.Ekonomi kerakyatan dalam praktik itu canggih,di mana pernah dicoba gitu.Yang pernah dicoba sih ekonomi biasa-biasa yang disebut kapitalistik.

Tanpa transparansi korupsi tidak terdeteksi. Sedangkan transparansi hanya mungkin jika ada demokrasi. Menurut Anda demokrasi dulu atau pencegahan korupsi dulu?

Mochtar Loebis pernah saya tanya begitu.,Dia bilang (menghapuskan) korupsi saja dululah, Soalnya dengan hilangnya korupsi paling nggak orang bisa bernapas dan orang bertambah sejahtera. Dan orang kalau bertambah sejahtera dia menjadi bertambah gelisah, menjadi melihat ketidakadilan.

Bukankah korupsi disebabkan karena pemerintah tidak mampu menggaji pegawai negeri secara layak?

Oh tidak, korupsi yang paling berbahaya itu yang bukan disebabkan oleh kebutuhan,. Jadi, itu adalah keserakahan. Sekarang ini yang korupsi adalah orang yang sudah punya rumah sepuluh. Yang berbahaya ini korupsi yang merupakan penyakit dan merupakan persaingan. Jadi, semacam menunjukan kepiawaian juga gitu.

Menghilangkan korupsi kan butuh sistem?

Tidak, saya kira hanya membutuhkan kepemimpinan yang bersih aja saya kira. Menghilangkan korupsi 100 % ya butuh sistem. Menghilangkan 80 % sih tidak perlu merubah sistem, hanya orangnya aja yang bener.

Berarti tergantung kepada kepemimpinan

Yang sekarang sih bukan karena kepemimpinannya jelek,tapi justru bagus ke arah yang salah.Indonesia itu punya sistem korupsi yang sangat sistematik dan sangat canggih.Marcos itu korupsinya hanya lima milyar. Karena dia itu lebih *mikirin* politik dan negara.Di sini orang- orang ini sangat spesialis.Korupsi lama-lama tidak bisa diadili. Seperti penguasa yang korupsi yang ditangkap direktur bank terus nasabahnya.

Bagaimana peranan kelas menengah?

Saya barangkali dituduh terlalu optimis.Banyak orang bilang kelas menengah itu tidak ada. Dan kelas menengah yang adapun adalah produk dari kolusi. Tapi saya rasa nggak. Pertama saya tidak akan merancang analisa berdasarkan asumsi bahwa orang itu idealis. Saya lihat motif atau kepentingan aja gitu. Kelas menengah yang sekarang dibilang kolusi itu terang aja kolusi karena terang aja dia tidak punya pilihan lain.Kalau saya yang jadi presidennya tentu dia akan berpindah kiblat ke saya. Justru karena sifatnya yang konservatif secara politis dan ingin cari untung, maka begitu hilang kekuasaannya loyalitasnya gampang sekali dimobilisasi. Nah, di situ banyak sekali kekuatan,keterampilan professional, *networking*-nya kemampuan internasional bisnisnya itu kuat sekali. Sebetulnya market itu cenderung demokratis. Saya agak kapitalistis liberal juga dalam hal ini. Karena sistem-sistem market lain gagal tuh. Sistem market yang tidak ada intervensi politik itu mungkin tidak demokratis, paling nggak lebih demokratis dari sekarang. Tinggal disetel nanti dari segi keadilan sosial.Itu harus dibikin sistem kesejahteraan seperti di negara sosialis barat saja gitu .

Ada fenomena menarik pada kelas menengah kita, misalnya Benyamin

Wimar pernah mendekam dalam penjara pada tahun 1978 selama satu bulan dalam kasus Buku Putih menjelang SU MPR. Dia betul-betul kapok. Orang yang pernah menolak dicalonkan menjadi anggota DPR ini justru pernah mencalonkan diri sebagai presiden. Tapi telpon gelap dengan nada mengancam berkali-kali berdering .Sebenarnya, sebagai kelas menegah, Wimar lebih suka hidup tenang

Sebagai presiden direktur sejumlah perusahaan, secara ekonomi kehidupannya sudah mapan. Dari perkawinannya dengan Suvatchara, dokter ahli syaraf dari Thailand, dia dikaruniai dua anak. Si Sulung Satya Tulaka (20), kini kuliah di Unpar Bandung, sedang si bungsu Aree Widya (17) masih duduk di SMU. Wimar adalah penggemar berat olah raga tenis. Pernah suatu ketika dia menghadiahi Satya dan Aree untuk menonton tenis seri Grand Slam secara langsung di Wimbledon. Barangkali karena hobby-nya itu, Sarwono sahabat karibnya yang kini menteri negara untuk Lingkungan Hidup yang juga ketua Pelti menunjuk dia untuk mengurusi BTN (Badan Tim Nasional).

Pada tahun 1971-1975 sebetulnya dia sudah muncul di TVRI lewat acara laporan dari Amerika yang berdurasi 20 menit. Setelah sekian lama terlupakan, dia kembali muncul dalam Perspektif, sebuah acara talk show yang ditayangkan SCTV. Acara yang diilhami oleh talk shownya Larry King di CNN (Cable News Network), berangkat dari kebingungan Wimar menyimak pembicaraan-pembicaraan pada forum publik --TV, radio, koran atau majala-- yang berbelit-belit. "Saya ingin mengajak masyarakat berkomunikasi dengan lugas, jujur, jernih, dan berpikir cerdas", begitu ujarnya. Namun acara yang mewancarai banyak kalangan mulai dari joki three in one hingga Henry Kissinger itu ditutup dengan alasan yang tidak jelas. Tak kurang akal, Wimar memunculkannya kembali melalui Perpektif Live dan Perspektif Baru yang muncul melalui sindikasi koran dan jaringan radio.

Mangkudilogo berani memenangkan Tempo dalam PTUN, terus Ridwan Fatarudin dari Merpati berani menolak tawaran yang tidak rasional. Tapi mengapa ini tidak didukung oleh yang lain?

Kita tidak boleh mengandalkan keberanian satu orang saja. Kita hanya harapkan bahwa orang itu bertindak tidak jelek, tapi yang banyak, daripada beberapa orang yang berani. Tapi, barangkali itu sebagai contoh pertamalah. Bahwa yang bisa memperbaiki situasi itu bukan hanya Permadi atau Adnan Buyung Nasution, tetapi orang-orang yang biasa. Sekarang ada lagi Adi Andojo. Justru gunanya kita ngomong gini, gunanya ada perspektif,. gunanya ada seminar, itu untuk mencatat semua yang bagus-bagus itu. Dan kalau tiap tahun lebih banyak dari sebelumnya itu lumayan. Sampai terjadi perubahan politik, di mana ini akan ada peningkatan yang besar gitu. Yah sebenarnya itu seperti pemanasan sepakbola, nunggu lapangannya kosong. Nah, urusan-urusan saya itu hanya pemanasan di kiri, saya tidak tahu caranya mengosongkan lapangan. Itu urusan orang-orang yang lebih serius. Tapi, sebaliknya kalau semua orang mengurusi pengosongan lapangan, nggak ada yang pemanasan. Jadi, kalau lapangan sudah kosong yang main siapa? Gitu-gitu lagi, kan.

Barangkali kita butuh Pendidikan politik?

Sebetulnya kita sudah mendapatkan pendidikan politik yang sangat baik. Yaitu dengan melihat kelakuan-kelakuan yang menyebalkan. Kita jadi kritis, kan?

Tapi itu kan Informal?

Barangkali pendidikan politik yang bagus adalah informal. Bagaimana mengajari orang berenang, ya lemparkan saja ke kolam. Kita sudah terlanjur dilemparkan ke kolam. Sudah tidak ada pilihan kan? Barangkali bukan pendidikan politik, tetapi kesempatan belajar politik. Di Indonesia itu sangat tinggi. Cuma harus cari masing-masing. Negara lain kurang beruntung karena tidak memiliki kasus-kasus yang begitu banyak. Tiap minggu kita bisa ngomongin, asyik khan. Ada PT. DSTP, Mobil Timor. Kita baca koran, orang lain bisa berpikir ini tidak ada beritanya, tapi kita bisa baca di antara baris-baris tersebut.

Bagaimana Anda menilai tindakan pemerintah terhadap pers selama ini?

Saya juga sering diwawancarai oleh media Australia bagaimana represi pers di Indonesia, dan kebijaksanaan totaliter dari pemerintah. Pertama saya nggak mau menyebut pemerintah, karena pemerintah Indonesia ini sudah pecah-pecah, yang ada adalah kekuasaan yang makin tersentralisir. Kedua, represinya itu tidak sistematis. Kalau mau sistematis kenapa *Tempo* ditutup hanya karena masalah kapal perang bukan karena masalah UU Pemilu atau hal-hal yang ideologis. Ketiga, di Departemen Penerangan, orang tidak tau apa yang akan disensor karena tidak ada *policy*.

Kalau dicabutnya acara perspektif?

Ini sebenarnya yang paling menyakitkan kalau (ngomong)soal pembreidelan (atau) *sensorship*. Saya kira kalau Harmoko membreidel, sangat saya benarkan, karena ia tidak punya kemampuan lain.Yang saya sesalkan itu orang biasa yang menutupi dosa dia, sensor diri atau menjadi tangan dia. Seperti apa namanya di SCTV di mana sebetulnya itu orang-orang baik. Saya tidak salahkan sama sekali. Tapi, coba orang-orang itu nunggu sampai tidak ada pilihan gitu, nunggu sampai keluar surat gitulah, seperti *Tempo* lah. Barangkali sejarah akan lain.Yah orang terlalu cepat nyerah. Bahwa orang tidak mau di penjara sih saya juga tidak mau. Kan selama belum dipersalahkan yah jalan saja. Penutupan *Tempo* masih mending bisa masuk PTUN tapi penutupan *Perspektif* nggak bisa. Soalnya tidak ada kesalahan hukum. Orang nutup acaranya sendiri. Jadi, ini yang bikin gemes.

Wimar muda, mengaku sebagai anak mami. Tak pernah berkelahi ataupun bersentuhan dengan minuman keras, walaupun dia mengaku berasal dari keluarga yang religinya tidak terlalu ketat. Ketika menginjak mahasiswa, ia memilih organisasi yang agak nyantai. PMB (Perhimpunan Mahasiswa Bandung),

adalah organisasi yang lebih rileks, bahkan hura-hura. Organisasi yang serius kala itu adalah organisasi underbow *partai.*

Tetapi kondisi saat itu memaksa mahasiswa untuk terlibat dalam politik. Wimar masuk ITB tahun 1963. Tahun 1970 memimpin Dema ITB, setelah Sarwono Kusumaatmaja dan Rahmat Witoelar. Suasana kampus dan aktifitas politik membuat kuliahnya terkatung-katung. Akhirnya, ia memutuskan untuk keluar dari ITB, ketika baru tingkat tiga. Lantas dia terbang ke Amerika untuk melanjutkan studi. Tahun

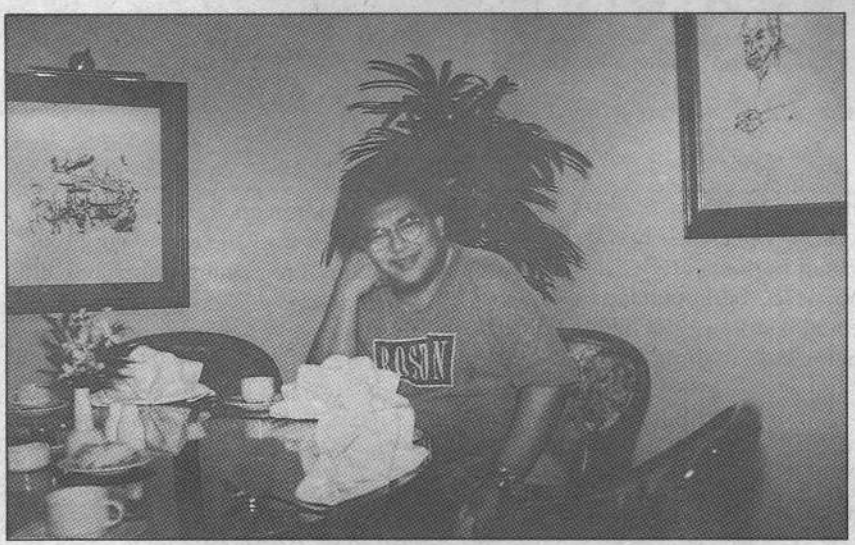

NENDEN NF

1973 ia meraih BS dari program Electrical Enginering. Kemudian gelar MS diraihnya di bidang System Analisys. Pendidikan formalnya diakhiri tatkala dia meraih MBA di bidang Finance and Investment pada tahun 1975 dari The George Washington University, Amerika Serikat. Sepulang dari Amerika, Wimar kembali ke ITB sebagai dosen.

Sejak kapan anda tertarik politik lagi?

Pertama saya tertarik politik lagi, setelah pulang dari sekolah di Amerika. Kok jadi begini. Tahun-tahun pertama itu sangat terbuka, sangat demokratis. Orang dapat mengkritik Pak Harto dll.

Apakah itu ada kaitannya dengan idealisme?

Kita jadi idealis itu gunanya untuk mengilhami orang lain.Tapi kalau kita menipu diri kita sendiri bahwa kita idealis, itu sangat berbahaya. Karena idealisme itu tidak *sustainable.* Sebaiknya mencari sesuatu yang bisa jangka panjang. Ya, professionalisme itulah. Kesalahannya, karena kita dulu terlalu mengandalkan idealisme. (Sewaktu) Angkatan 66 lahir, bagaimana kita nanti. Oh, bereslah kita kan idealis. Begitu idealisme hilang, *collapse* semuanya. Jangan mengandalkan idealisme. Kalau kita memandang sesuatu (sebaiknya) lebih rasional dan dingin, ideologinya ada tapi dijadikan sebagai latar belakang. Kedengarannya pragmatis. Tetapi, orang yang idealis itu orang yang paling berbahaya. Orang yang maju karena ideologi atau idealisme adalah orang yang paling berbahaya nantinya (akan menjadi orang yang) paling bagus atau paling jelek.

Apa kesalahan yang Anda rasakan waktu transisi kekuasaan dulu ?

Kesalahan dulu Orde Baru dan segala perubahan politik, yang diganti itu cuma orangnya. Waktu Orde Lama itu ditumbangkan kita semangatnya karena membubarkan totaliterisme tetapi sekarang kan lebih parah daripada dulu.

Dalam konteks sekarang menurut Anda perubahan itu imperatif dari pemerintah atau karena tekanan tertentu ?

Sebetulnya ada krisis kekuasaan. Sebenarnya penguasa, saya tidak menyebut ini pemerintah karena pemerintah sudah lama bubar. Hanya *power center* saja. Kekuasaanya itu hanya dipakai untuk mengamankan kerajaan-kerajaan kecil saja. Jadi dia sudah tidak mengendalikan *diskusi policy* di luar. Wibawa dari institusi resmi sudah pada hilang. Sebaliknya di luar itu muncul institusi atau kelompok yang mempunyai kredibilitas walaupun tidak banyak, Seperti Econit atau Christianto (Wibisono)atau Kwik (Kian Gie), walaupun dari dulu manusia itu ada, tetapi perannya itu tidak setinggi sekarang. Beberapa dari orang tersebut yang saya kenal ,saya jamin integritasnya masih ada.Jadi sebentarnya sudah menjadi hukum rimba di luar, dan itu bahayanya. Karena di luar itu tidak dapat mengkonsolidasi diri secara resmi. Sekarang ini hanya diikat oleh aspirasi bersama. Lama-lama harus ada organisasi politik. Poin yang mau saya gambarkan adalah bahwa alternatif pemikiran sebetulnya sudah ada.Itu menunjukkan insting demokrasi masyarakat kita sudah kuat.

Akan sangat lain kalau figur sentralnya itu tidak ada. (Sekarang) ini sama halnya dengan main bola. Di sananya ada Ruud Gullit. Siapapun pemainnya, di sana dominasi satu orang itu terlalu kuat.

Bagaimana kemungkinan transisi kekuasaan menurut Anda?

Kekuasaan ini kelihatannya kuat tapi rapuh. Saya pikir mulainya dari bisnis. Kalau dari politik sudah kedap, sudah diamankan. Kalau bisnis itu tidak bisa dikendalikan, karena ada kekuatan internasional. Karena kita ini tergantung pada modal asing terutama di bursa-bursa efek, kira-kira 85 % uang asing yang sangat mudah ditarik.

Apakah kalau terjadi transisi ekonomi akan jatuh?

Tidak, ekonomi tidak akan jatuh.Tetapi akan ada transfer yang akan dibantu kekuatan Internasional. Karena Indonesia kan negara debitur. Jadi, Bank Dunia, ADB, akan membantu stabilitas peralihannya. Sama dengan mereka membantu awalnya Orde Baru. Tetapi sekarang mereka sudah melihat gambarnya lain sekali bahwa Indonesia sudah memiliki kekuatan ekonomi, juga bahwa kemarin mereka mendukung orang yang salah . Lembaga-lembaga barat itu walau banyak kekurangannya lebih senang pemerintah yang demokratis. Karena memang sistem demokrasi itu yang lebih menjamin pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Jadi, keamanan uang mereka lebih terjamin❑

Sunarto Cipto Harjono

Istimewa

Menyoal Pengendalian Harga Komoditi Pangan

Wahyu W Basjir
Peneliti *Institute of Development and Economic Analysis* (IDEA)

Kebijakan pemerintah memberikan subsidi pertanian agaknya merupakan "biaya" yang harus ditebus dengan harga komoditi pangan yang rendah. Dan lonjakan harga bahan pangan seperti awal tahun ini(1995), mudah memancing kebijakan market operation berupa peluncuran stok pangan dari gudang-gudang pemerintah. Masalahnya, ketika subsidi pertanian makin tidak populer, masihkah relevan menjaga agar harga komoditi pangan tetap rendah?

Menurut Robert H Bates(**Markets and States in Tropical Africa, University of California Press, California, 1981**, p.30), pemerintah negara berkembang menekan harga bahan pangan agar kebutuhan masyarakat bawah, seperti buruh di perkotaan, tetap terpenuhi. Harga komoditi pangan yang rendah memungkinkan buruh dan masyarakat miskin mencukupi kebutuhan fisiknya.

Dengan terpenuhinya kebutuhan buruh dan masyarakat miskin, kepentingan industri terhadap buruh murah juga akan terpenuhi. Logikanya, tercukupinya kebutuhan bahan pangan tidak akan mendororng buruh menuntut upah lebih tinggi guna memperbaiki daya beli mereka terhadap komoditi pangan. Dalam konteks yang lebih luas, pemerintah negara berkembang tidak terkecuali Indonesia, berkepentingan dengan rendahnya komoditi harga pangan sehingga upah buruh tetap murah demi keunggulan komparatif dalam industri mata dagangan ekspor.

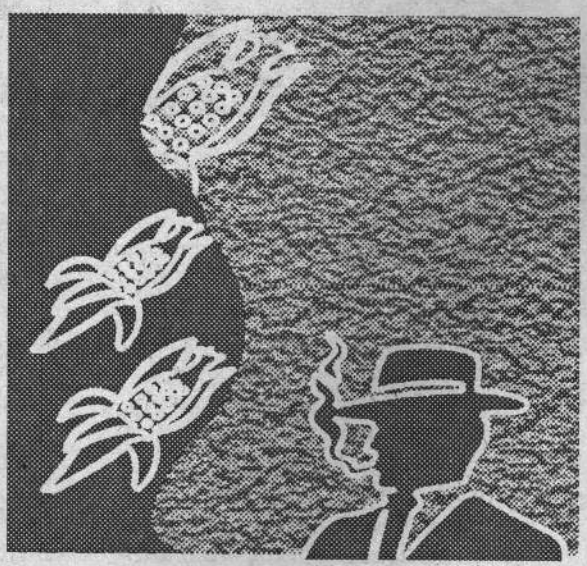

Apa konsekuensi dari gambaran di atas?

Pertama, sektor pertanian akan kehilangan insentif untuk mempertahankan tenaga kerja yang bergelut di sektor tersebut. Rangsangan yang lebih tinggi disektor industri akan menarik tenaga kerja keluar dari sektor pertanian (*off farm*). Jika hukum diminishing return berlaku, maka perpindahan tenaga kerja menuju sektor dengan nilai tambah yang lebih tinggi adalah positif.

Namun, keterbatasan daya serap sektor industri Indonesia terhadap tenaga kerja tidak memungkinkan proses itu berjalan smooth.

Kedua, rendahnya insentif di sektor pertanian pada gilirannya akan menghentikan proses inovasi maupun adaptasi teknologi budidaya komoditi pertanian. Dengan demikian, akan terjadi penurunan produktivitas merginal dari input yang digunakan. Hal ini berujung pada kemunduran sektor pertanian.

Ketiga, dua konsekuensi di muka dilingkupi oleh kebijakan pengendalian harga oleh pemerintah, akan membawa dampak pada makin menurunnya tingkat kesejahteraan petani dan merosotnya nilai tukar produk pertanian secara konsisten. Dalam jangka panjang, kondisi ini menuntut pembauran perspektif kita mengenai hubungan antara sektor industri dan sektor pertanian □

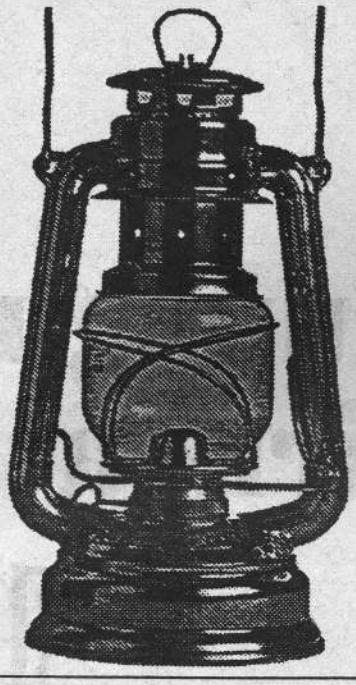

Kalau semua terang, tentu kehadirannya tidak diperlukan. Namun yang ada, ternyata masih memerlukan adanya.
Ini halnya ..... Unisi, meski hanya sekedar **lentera kecil** Unisi mencoba memberikan secercah cahaya.

unisi
the exciting radio

berbisik untuk tidak mengusik

PALING PAS

PROMOSI PRODUK BUAT KAWULA MUDA DI SEMARANG

103 FM
jatayu

The Young Beat Station

PLAZA SIMPANG LIMATOWER
LANTAI XI SEMARANG
PHONE. 024. 415327

MATAHARI

AGRIBISNIS INDONESIA

Apa jadinya :
Sawah yang hijau menghampar
Buah yang menggerandul ranum
Udang yang berenang di tambak
Burung yang menciap di dahan
Ikan hias yang memancar kan warna-warni cantiknya.

BILA KU TAK HADIR ?
BILA KU ABSEN ?

Simak Rubriknya :

HORTIKULTURA,
PERKEBUNAN,
PASCA PANEN,
TEKNOLOGI TEPAT GUNA,
BURUNG KICAUAN,
BURUNG PERKUTUT
IKAN HIAS.

AGROBIS

Kantor Pusat :
Surabaya, Jl. Karah Agung 45. Telp.(031) 836969 psw. 403. Fax. (031) 930996
Jl. Pahlawan 116 (atas). Telp. (031) 23656, 26097

Perwakilan :
Jakarta : Jl. Prapanca Raya 40, Telp. (021) 7204128, 7204617-18
Yogya : Jl. Kaliurang KM. 5 CT III/5 No. 35. Telp. (0274) 562597, 588795

Saat ini tengah berkembang trend gamelan dikawinkan dengan musik konvensional seperti jazz, blues bahkan rock. Hasilnya, nuansa gamelan kian ramai, menghentak dan kadang nakal. Apa sebenarnya yang terjadi dengan musik gamelan ini?

Menunggu Lahirnya Anak

Seperangkat gamelan di antaranya gender, bonang, siter, dan gong berjejer rapi dengan dram, saksofone, dan kibord. Beberapa pemain sudah siap unjuk gigi dengan alat musik masing-masing. Diawali dengan tarikan saksofone lalu disambung ketipuk gender, berikutnya sapuan siter dan dentuman gong merunyak dengan gesit dan lincah. Paduan musik tengah digelar dengan rancak dan inovatif. Detik berikutnya *applaus* penonton pun bergema berkepanjangan. Itulah suguhan musik Kyai Kanjeng yang tengah digelar di Graha Sabha Pramana Kampus UGM beberapa waktu lalu. Kali lain pemusik Djaduk Ferianto juga pernah mengusung musik serupa di Bentara Budaya Jakarta awal April 1996 lalu, yang juga memakai kibord dan gitar bas sebagai tambahan berimprovisasi. Hasilnya amat memukau dan seolah melahirkan *genre* baru dalam jagad musik tanah air.

Masih hangat dalam ingatan kita— jika mengamati dunia musik Indonesia— betapa musik -musik seperti ini punya pamor yang bergengsi. *Frame* musik ini seolah mencoba menawarkan satu *style* yang sama sekali baru. Meski musik jenis ini masih masuk dalam wilayah kontemporer, namun toh kehadirannya patut dihargai.

Perkawinan musik

Sebagian seniman, khususnya musikus, juga mengawinkan gamelan dengan ragam musik yang lain dan mampu menarik pemusik mancanegara untuk diajak kerja bareng. Apresiasi dunia internasional pun juga membuka peluang lebih lebar untuk mengembangkan gamelan ke dalam mozaik musik dunia. Sebut saja komposer Chick Corea, Didier Lockwood, John Mclaughlin, dan Andre Jaume yang begitu antusias mengolah gamelan dengan jazz.

Di penghujung akhir tahun 1995 silam, di Yogyakarta diadakan Festival Gamelan Internasional II. Sebelumnya, tahun 1986, diadakan Festival Gamelan Internasional di Canada. Bulan April 1996 ini di Perancis juga digelar Festival Banlieues Bleues—salah satu festival jazz— Eropa terpenting dan bergengsi. Tak urung musikus Sapto Raharjo bersama kelompoknya, antara lain Sonny Suprapto, Poernomo Nugroho, Gatot Djuwito, dan Setyaji Dewanto juga diundang untuk meramaikan acara ini. Artinya momentum seperti itu menunjukkan bahwa gamelan memang telah mendunia. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah faktor apa yang mendorong musikus mengawinkan gamelan dengan musik konvensional, lalu akan dibawa ke mana gamelan itu?

Kelahiran *genre* baru dalam peta musik dunia selalu mengundang banyak komentar. Tak terkecuali pada gamelan ini. Dulu ketika kesenian— apapun bentuknya— bila menampakkan akar budaya lokal acapkali dicap miring. Budaya lokal seolah sinonim dengan tradisional dan primitif, selalu ditentang oleh konsep budaya modern. Kini di tengah gerusan budaya global konsep usang seperti itu layak untuk digugat. Kecenderungan baru yang muncul, adalah membawa budaya tradisional

Djaduk Ferianto saat tampil di Bentara Budaya

Genre baru musik di Indonesia

Baru

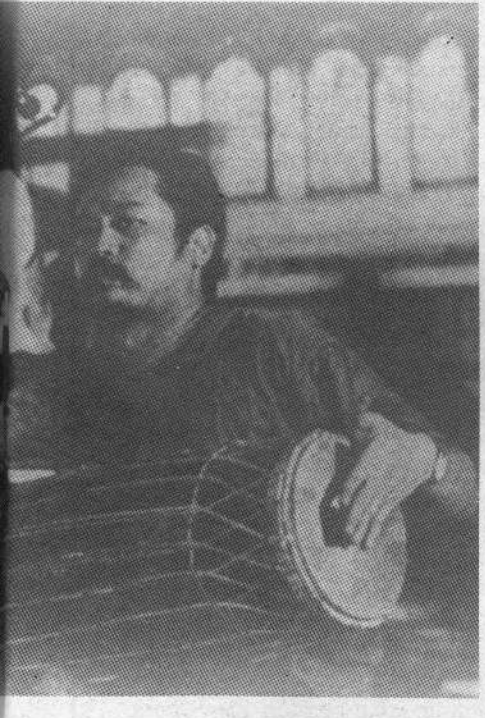

ke dalam nuansa mozaik dunia global. Kemunculan sastra Afro yang dihembuskan Nadine Gordimer sebagai pemenang Nobel, berubahnya seting Eropasentris ke Asia, menunjukkan realitas di atas. Di sisi lain sistem global dunia telah mempersempit sekat-sekat geografis antarnegara yang berimplikasi pada gesekan dialektis antarkebudayaan, politik, ekonomi, dan sosial.

Lantas apa yang mendorong pemunculan musik seperti ini?

Bagi KRT. Wasitodiningrat , seniman yang membuka pelatihan gamelan di kediamannya, menilai bahwa yang mendorong seniman melakukan eksplorasi gamelan karena dipengaruhi sifat seniman sendiri yang tak ingin statis. "Tapi kebanyakan yang digarap hanya musik-musik baru seperti Gambang Suling, Supir Becak. Kalau meloncat ke yang rumit itu susah. Paling ya Campursari. Gamelan itu tidak mudah", jelasnya.

Sementara dari pengamatan seniman muda, yang terjadi dalam kesenian gamelan seperti sekarang menurut analisis Sapto Raharjo adalah semangat seniman sendiri untuk berkarya. " Masalah bentuknya, caranya, ekspresinya ... apakah gamelan lengkap atau dicampur dengan musik konvensional barat itu mungkin suatu cara saja", tandasnya. Tapi yang mendasar adalah kreativitas seniman itu sendiri, sambungnya. Pendapat ini cukup beralasan, sebab bila dilacak genesisnya seorang seniman dalam mengekspresikan seni terkadang harus mencari inspirasi yang *njlimet* dan nakal. Seni selalu bertumpu pada kreativitas manusia dan kreativitas itu mendorong perilaku seniman mencari hal baru. Asumsinya, kemampuan mengolah, menyusun, menata keliaran jiwa diperlukan oleh para seniman dalam upaya pencarian. Di sini dibutuhkan kepekaan jiwa, batin, demi menemukan kebersihan seni yang anggun dan bernilai lebih.

Mahalnya apresiasi

Agak berbeda dari kedua seniman di atas, sosiolog UGM, Dr. Heru Nugroho, mensinyalir bahwa munculnya gamelan baru itu diakibatkan karena sistem global. "Itu sebenarnya revitalisai gamelan karena pengaruh budaya global yang melanda hampir semua segmen kehidupan. Termasuk kesenian," papar staf pengajar Fisipol UGM ini. Nampaknya apapun yang menjadi pemicu lahirnya musik ini tak perlu dipermasalahkan benar. Namun, yang patut menjadi perhatian lebih, adalah apresiasi masyarakat sendiri atas kesenian ini. Mendunianya gamelan ternyata tidak setara dengan tingkat apresiasi masyarakat, khususnya anak muda dalam menggauli seni lokal. Bila seniman mancanegara getol mengolah gamelan bagaimana dengan masyarakat sendiri? Sekedar informasi, harga seperangkat gamelan ternyata cukup tinggi berkisar 15-40 juta. Lantas bila ditarik kesimpulan apakah dengan mahalnya harga juga sama dengan mahalnya apresiasi masyarakat?

Buru-buru Sapto Raharjo mengelak, "Apresiasi masyarakat cukup bagus. Tapi secara kualitas. Kalau secara kuantitas jelas sedikit. Buktinya radio-radio di Yogya ini banyak yang menyajikan acara uyon-uyon, gamelan, karawitan, dan semacamnya. Artinya, apresiennya jelas ada, meskipun kita bisa berasumsi tidak banyak dan dari kalangan tertentu saja," katanya kepada Kusbi dari BALAIRUNG. Diakui serbuan budaya massa seperti TV dan media hiburan lainnya lebih banyak menyedot perhatian masyarakat daripada menggauli musik tradisional.

Futurolog John Naisbitt menganalisis bahwa menuju milenium ketiga saat ini diperkirakan akan terjadi pergeseran sentrum Barat ke Timur. Pergeseran ini tentunya akan berdampak pada konsepsi atas kebudayaan, terutama seni-seni etnik. Kemungkinan yang patut diakui adalah kesenian etnik itu berubah menjadi primadona baru. Disebabkan seni modern tengah mengalami kejumudan tema garap yang berorientasi abstrak dan politis.

Indonesia sendiri punya beragam kesenian etnik yang tidak sedikit. Dari bentangan Indonesia timur ke barat tercecer beragam nuansa etnik yang kaya dan hibrid. Belakangan rupa-rupa etnis itu seolah melambung menjadi mozaik kesenian dunia. Sebut saja gaya pematung suku Asmat, Bali,

Jepara, Kalimantan, dan masih banyak lagi. Kecenderungan baru mengaduk-aduk budaya etnis seolah menjadi trend yang tengah menggejala. Kolaborasi seni modern dengan seni etnis kerap terdengar di peta seni kontemporer. Artinya, tiap-tiap bagian kesenian etnik dicobasatukan dengan kesenian lain dan diproyeksikan akan lahir satu aliran baru yang unik dan kadang nakal. Secara logis perbenturan nilai, filosofi, dan identitas tiap kesenian itu tak bisa dihindarkan, tentunya.

Gamelan yang dikawinkan dengan musik konvensional, tentu juga tunduk pada konvensi alamiah tersebut. Secara sadar, KRT. Wasitodiningrat sekligus Ketua Yayasan Sekar Tunjung ini mengakui pergeseran ini. Yaitu pergeseran pakem-pakem gamelan. "Itu jelas terjadi. Tapi parahnya kebanyakan para seniman yang melakukan inovasi itu tidak paham dasarnya. Kalau mereka sudah mengerti, bagaimana lagu gender, rebab, siter, dan gendang, saya jamin mereka tidak berani. Sebab karawitan itu sulit sekali," katanya menjelaskan.

Kekuatiran akan terjadinya polarisasi gamelan oleh sementara pihak, menjadi persoalan tersendiri. Persoalannya sekarang adalah kembali pada sikap dan karakter seniman itu sendiri. Taruhlah gaya Ki Wasitodipuro dan Nartosabdo, keduanya meski berpijak pada tradisi, kesan karakter keduanya amat kentara.

Sekontemporer nuansa gamelan baru,

TRI WASONO SUNU

Dr. Heru Nugroho

Revitalisasi gamelan

pasti masih ada benang merah yang menghubungkan dengan ciri utama gamelan sebagai musik diatonis. Sapto Raharjo menggambarkannya seperti sebuah pohon. "Pohon besar, meski di sekelilingnya tumbuh pohon kecil yang banyak, tetap akan ada akar yang menghubungkannya," paparnya. Asumsinya kelahiran musik gamelan baru —apapun bentuknya— tak akan menyerabut ciri dan karakter gamelan sebagai musik diatonis.

Berdasar catatan sejarah, gamelan diakui sebagai satu perangkat musik yang tak gampang dikuasai. Gamelan merupakan instrumen musik terlengkap serta mempunyai tingkat kesempurnaan permainan yang tinggi dan *njlimet*. Gamelan juga fleksibel dijadikan pengiring ketoprak, wayang kulit, dolanan anak maupun karawitan. Tingkat fleksibilitasnya yang tinggi inilah lantas gamelan dijadikan obyek eksplorasi seniman.

Bentuk penggalian gamelan dapat dibilang unik. Pakemnya, bunyi gong selalu ditabuh pada giliran belakang, namun kini ada juga seniman yang menabuh gamelan diawal atau di tengah. Di kali lain seorang seniman menyeret gong ke tengah panggung, bukannya ditabuh. Tentu warna-warna nakal seperti ini kemudian kian membuka nuansa baru dalam tubuh

Gamelan dan Rakyat

Merunut cikal bakalnya, gamelan adalah hasil kesenian rakyat. Bila kemudian diklaim sebagai produk keraton, sangat mungkin karena keraton pada masa itu mempunyai kekuasaan dan kekayaan. Artinya, dengan mudah keraton dapat mengembangkannya seperti sekarang. Membuat gamelan dari perunggu ataupun kuningan, yang proses pembuatannya jauh lebih rumit bukan soal.. Sebelumnya oleh rakyat awam gamelan hanya dibuat dari bumbung (bambu).

Sejarah mencatat semenjak kerajaan Kediri dipegang Kertanegara perkembangan gamelan mulai serius diolah. Bukti empirik itu dapat ditengok pada relief candi Penataran, Blitar Jawa Timur, terdiri dari gamelan slendro lima nada. Setelah Airlangga naik tahta, ia kemudian menyempurnakan dengan menambah gamelan pelog. Maka sejak itulah mulai dikenal gamelan slendro pelog seperti sekarang. Menurut buku *Pararaton*, saat itu gamelan sudah dapat dipakai mengiringi tari Bedoyo. Walau hanya terdiri dari kenong, gong, riyung, gendhang gede dan ketipung. Ragam dan jumlah gamelan kini kian marak dan bertambah seperti saron, bonang, gender, slenthem, kempul dan terakhir rebab.

Pada masa kerajaan Majapahit, gamelan tidak terbatas untuk mengiringi tarian . Tapi juga digunakan sebagai pembuka upacara-upacara kerajaan lainnya. Penobatan raja, penyambutan tamu, musik pengiring raja yang mangkat, dan juga propaganda politik, adalah sederetan peristiwa yang melibatkan gamelan.

Saat Islam berkembang di Jawa, gamelan dipercaya efektif untuk syiar agama. Saat itu, wayang kulit, wayang beber dan kesenian lain oleh Walisongo gsmelan dipakai sudah. Bahkan keraton Yogyakarta Hadiningrat masih mewarisi tradisi itu sampai sekarang, dengan menggelar tradisi *Sekaten*. Konon kata sekaten bertalian dengan *syahadatain*. yaitu rukun Islam pertama. Pesta rakyat ini diadakan setiap bulan perhitungan Islam yaitu Rabiul Awal, atau hitungan Jawa bulan Mulud. Puncaknya dibunyikan gamelan keramat Kyai Guntur Madu di altar keraton.

Saat ini gamelan tertua masih tersimpan rapi di keraton Surakarta (slendro) dan keraton Yogyakarta (pelog).***

Kusbiantoro E

gamelan. Tentunya, pola-pola seperti ini mengundang baku sikut komentar antara seniman muda dan seniman generasi tua, meski tidak runcing benar. Yang perlu dipahami betul adalah— dan ini kerap diungkapkan para seniman tua— kematangan dasar dari gamelan itu menjadi harga mati yang harus dikuasai, sebelum melakukan inovasi. Asumsinya dalam seni lukis, sebelum memasuki jenis aliran tertentu kematangan aliran surealis adalah mutlak untuk dilewati. Sesudah itu sah-sah saja seniman tersebut meloncat ke sudut aliran model apapun.

Sebab tanpa pemahaman yang matang dasar-dasar gamelan, sangat boleh jadi polarisai gamelan kian ngawur dan secara moral disangsikan kesahihannya. Sebab inti improvisasi bukan berarti membuang sejauh mungkin tata nilai sebuah kebudayaan.

Anak Masa Depan

Studi-studi tentang gamelan sudah dilakukan semenjak penjajah Belanda menduduki Indonesia. Pada masa kepemimpinan Hamengkubuwono VII, seniman Belanda bahkan memasukkan orkes *simphoni* dengan tari Bedoyo. Ini menunjukkan bahwa eksplorasi gamelan sudah lama dicetuskan. Bila kemudian saat ini gamelan dianggap *go-internasional,* itu sudah terlambat. "Itu karena media massa menyorot begitu gencar," ungkap Sapto Raharjo. "Sebenarnya istilah *go internasional* itu basi. Bila merunut ke belakang lho," katanya.

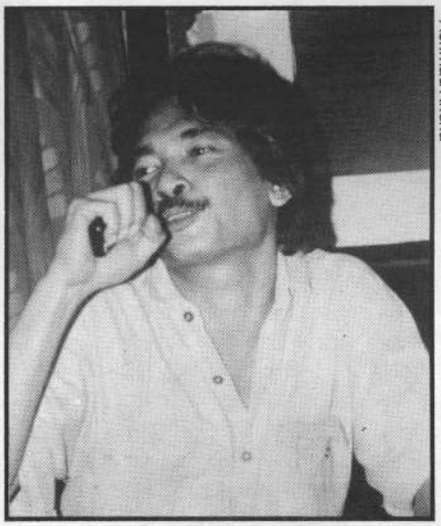

Achmad Krisna

Sapto Raharjo
Tergantung seniman sendiri

Pendapat senada juga dibenarkan KRT. Wasitodiningrat, sesepuh gamelan karawitan yang sudah lama malang melintang di dunia gamelan. "Sejak tahun 1970-1992 saya sudah mengajar gamelan di tiga universitas di Amerika. Kalau sekarang disebut *go-internasional* sepertinya kurang pas," katanya. Dalam sejarah perkembangannya, gamelan Indonesia dikenal tiga jenis gamelan daerah yakni Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Bali. Di Amerika grup yang menggauli gamelan ada sekitar 200-an. Bidang garapnya pun tidak hanya satu. Ada diantaranya yang bertahan pada klasikal Jawa dan ada pula yang sengaja melakukan improvisai, katakanlah gamelan *American style.* Filosofi, nilai, dan karakter gamelan tentu mengalami malih rupa. Beberapa negara yang getol mempelajari gamelan selain Amerika, adalah Eropa, Jerman, Rusia, Mesir, dan beberapa negara Asia terutama Jepang.

Kecenderungan perbedaan konsep masing-masing negara dalam mempelajari gamelan jelas terlihat. Amerika dikenal mengimprovisai gamelan hanya pada sisi bunyinya saja, lain halnya dengan Eropa. Seorang komposer Jerman, Prof. Dieter Mack, mengakui para komposer Eropa masih mempertimbangkan esensi historis gamelan saat melakukan improvisasi. Sehingga roh gamelan itu tidak pupus dan hilang. Di Eropa, grup-grup gamelan memang tak sebanyak di Amerika. Tingkat apresiasi seniman Amerika layak diacungi jempol, sebab mereka mampu membuat gamelan sendiri. Baik dari perunggu ataupun kuningan bahkan dari bumbung (bambu) pun dapat ditemui. Salah satu grup yang punya nama adalah grup *Son of Lion,* yang dikomandani Barbara Mary. Tanpa disadari ternyata gamelan mampu memberikan tantangan baru bagi eksistensi jagad musik tanah air di dunia luar. Patutlah bila kemudian suatu saat entah itu kapan akan lahir 'anak' hasil perkawinan gamelan dengan musik konvensional itu.

"Saya menginginkan anak itu. Saya nggak tahu, yang jelas ini untuk masa depan. Saya yakin besok akan lahir budaya baru", ujar Sapto Raharjo saat di temui BALAIRUNG di bengkel kerjanya. Secara implisit ia berharap

ACHMAD KRISNA

KRT. Wasitodiningrat
Gamelan itu tidak gam pang

bahwa munculnya anak baru itu akan memberikan nuansa dan pamor tersendiri. Artinya, budaya ini muncul bukan saja karena imbas dari perkembangan global, tetapi memang seniman menginginkan perubahan itu. Ketika dikejar seperti apa budaya baru itu, Sapto Raharjo mengaku tidak tahu pasti. "Tapi, yang jelas, setiap seniman pasti menginginkan hal itu," katanya.

Menyoal tentang kebudayaan yang berkaitan dengan proses kreativitas seniman, pasti berkait erat dengan pencarian sesuatu yang baru. Baru bukan berarti merontokkan pakem-pakem lama, namun pada kenyataannya dua hal itu amat tipis perbedaannya. Bila ditarik kesimpulan tiap kali seniman melakukan kontemplasi berkesenian, sangat mungkin pembiasan nilai menjadi tak terelakkan. Hal ini menunjukkan betapa alam kesenian membutuhkan intensitas dan keseriusan agar dapat menghasilkan satu seni yang baru, orsinil, dan konstruktif. Alhasil, kelahiran gamelan baru ini merupakan hasil akumulasi kreativitas seniman yang tak enteng . Dan rasanya, tak ada salahnya bila kemudian kita, khususnya seniman Indonesia bertepuk dada —tanpa kesombongan— bahwa akan lahir nantinya 'anak' baru dari proses sinkretis dalam musik gamelan ini. Pada akhirnya, waktu jua yang akan menjawabnya.***

Kusbiantoro
Hary Prabowo

DARI KAMPUS BIRU KE DAERAH HITAM

Alumni Fakultas Sastra UGM ini memang punya cerita lain dari selazimnya. Bagaimana tidak? Setelah lepas dari kampus biru, ia justru *keblasuk* ke "daerah hitam", pabrik baja, mengurusi banyak hal yang berkaitan dengan biji-biji besi. Sesuatu yang sama sekali tidak berkaitan dengan ilmu yang ditekuninya. Bagaimana ceritanya dan apa pula hubungannya sastra dengan baja? "Kalau mau dicari hubungannya, ya susah. Dan yang penting, bukan mencari hubungannya itu, kan. Tapi, apa substansi dari semua ini?"kata Alfauzi Sofi Salam, Kepala Dinas Publikasi dan Penerbitan PT Krakatau Steel Cilegon kepada BALAIRUNG.

Menurut Mas Al, begitu ia akrab dipanggil oleh mahasiswa Sastra UGM, kuliah di perguruan tinggi hanyalah satu sarana, cuma alat saja, bagi seseorang dalam menapaki jenjang kehidupannya. "Makanya kuliah di fakultas apa pun jadi tidak penting, asalkan di sana ia bisa mengoptimalkan ekspresi dan aktualisasi dirinya. Sebab, itu yang justru akan lebih berperan ketika kita sudah lulus dan terjun ke dunia kerja,"ujar alumni Sastra Indonesia UGM 1983 ini dalam acara Temu Alumni KMSI di Auditorium Sastra UGM beberapa waktu lalu.

Mas Al bercerita juga ketika mahasiswa. ia tidak sakadar kuliah melulu , tetapi lebih banyak melakukan

A KURNIA EBO

aktivitas-aktivitas lain di luar kuliah yang justru membantu proses pengembangan diri.

"Yang jelas baca buku itu wajib, supaya kita tidak ketinggalan informasi dan bisa mengimbangi pemikiran-pemikiran yang berkembang. Kedua, mengikuti kegiatan yang bisa menyalurkan potensi, minat, dan bakat. Ketiga, banyak menjalin hubungan dengan dunia luar, khususnya dengan para alumni supaya bisa menimba pengalaman dari mereka,"papar pendiri Majalah HUMANITAS KMSI UGM ini.

Menurut Alfauzi, paling tidak, itulah yang mesti dilakukan oleh mahasiswa sekarang. "Apalagi, dalam iklim kompetisi yang kian ketat, baik di dunia akademik maupun dunia kerja nanti. Kalau selama jadi mahasiswa kita nggak banyak-banyak menggali informasi, mengembangkan potensi, dan memperbanyak relasi, ketika keluar dari kampus pasti bingung mau berbuat apa karena harus memulai lagi segalanya dari nol," papar bapak berputra tiga—yang bangga menjadi satu-satunya pimpinan bergelar Drs dari 14 pimpinan elite di Krakatau Steel yang didominasi para insinyur itu.

Among Kurnia Ebo

BELAJAR BAHASA INDONESIA LAGI

Penampilannya *low profile*. Terkesan dingin. Tapi, kalau kita sudah membuka komunikasi dengannya, yang terasakan jadi lain. Ia akan segera nerocos bicara banyak hal dengan enaknya. Lancar, akrab, dan terbuka memberikan informasi yang dimilikinya.

Dialah K.I. Mahmud. Jebolan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, yang mengaku tidak menyesal gagal jadi dokter, tapi kini justru bangga menjadi *Public Relations Coordinator* di Perusahaan Mobil Oil Indonesia Inc.

DOK. PANITIA COMMEX '96 FISIP UGM

Ada hal unik yang tengah "dilakoninya" saat ini. Ditemui BALAIRUNG di sela-sela acara Communication Expo '96 Mahasiswa Jurusan Komunikasi FISIPOL UGM, K.I. Mahmud mengatakan bahwa belakangan ini ia kembali rajin mempelajari Bahasa Indonesia. Ada apa memang?

"Ya, karena kedudukan saya yang identik dengan kehumasan itu, menuntut saya untuk mempunyai kemampuan yang perfek di bidang komunikasi. Dan untuk mencapai hal itu, penguasaan terhadap bahasa sangat vital artinya,"ujar Dewan Pimpinan PERHUMAS ini.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa hubungan yang baik antarperusahaan akan tercipta antara lain kalau komunikasi yang kita jalin juga baik. Komunikasi yang dimaksud itu, baik yang sifatnya verbal maupun tertulis. "Coba saja apa kata mitra usaha kita, kalau surat yang kita tujukan padanya tidak karu-karuan, amburadul, baik tata bahasanya maupun maknanya. Citra kita pasti jelek dan itu sangat merugikan perusahaan," tambahnya.

Untuk itulah, aku K.I. Mahmud, saat ini ia rajin membuka-buka kamus dan ikut pelatihan kebahasaan. Selain itu, kepada para stafnya ia sangat disiplin. "Salah satu koma saja, akan saya suruh buatkan yang baru. Sampai betul benar, baru saya tanda tangani. Pokoknya harus perfek. Soalnya nama saya kan jadi taruhannya," tandasnya kepada BALAIRUNG.

Among Kurnia Ebo

MAHASISWA DAN PASAR BEBAS

Bagi alumni Fakultas Teknik UGM, nama ini pasti tak asing lagi. Sebab, selain satu pengurus teras KAGAMA DKI Jakarta, ia juga Direktur Utama perusahaan terkemuka yang bergerak di bidang konstruksi, perdagangan, dan industri. Dialah Ir. A. Sutjipto, orang nomor satu di PT Wijaya Karya.

Bulan April lalu, ia kembali ke kampus biru. Ia didaulat menjadi pembicara seminar "Pasar Bebas 2020" yang digelar BEM Fakultas Teknik UGM.

Dunia perdagangan global yang semakin kompetitif, demikian dikatakan alumnus Teknik Mesin UGM ini dihadapan lebih dari 200 mahasiswa, sebenarnya masih sangat terbuka peluangnya. Sebab, impor Indonesia di berbagai bidang masih tinggi.

"Posisi produk besi baja, mesin industri, otomotif, dan kimia dasar, misalnya, berdasarkan prestasi impor 93 dan pertumbuhan impor 94, termasuk rendah. Itu salah satu kelemahan kita. Karenanya, pasar dunia masih sangat terbuka dimasuki," ungkapnya.

Untuk itu, tandasnya, mahasiswa tidak perlu pesimis memandang peluang kerja. Yang terpenting dilakukan adalah meningkatkan kualitas diri seoptimal mungkin, baik dalam tataran kognitif maupun skill. Dalam hal ini, Sutjipto menyodorkan beberapa masukan.

"Mengembangkan kewirausahaan di kalangan mahasiswa, memperbaiki kurikulum pendidikan yang mengacu kebutuhan industri, mendekatkan dunia industri dengan dunia kampus, dan mengirimkan tenaga-tenaga muda untuk menyerap teknologi dari negara lain baik lewat program formal, magang, maupun pertukaran pelajar adalah upaya-upaya yang urgen dilakukan untuk peningkatan sumber daya manusia," paparnya.

ISTIMEWA

"Bagi saya, itu sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi. Apalagi, tahun 2000 nanti kita memasuki pasar bebas, penerapan ISO 9000 yang meminta standar kualitas optimal, dan tuntutan profesionalisme yang tinggi," tandas pengurus KATGAMA yang dalam kiprahnya banyak membantu aktivitas-aktivitas kemahasiswaan di kampus UGM ini.

Agus Riyanto

TELEVISI MENURUT ORANG RCTI

Bang Edu ! Begitu orang memanggilnya. Orangnya tegas dan blak-blakan. Sepintas terlihat sangar. Namun, dibaliknya tersimpan keramahan. Ini terasa ketika **BALAIRUNG** menemuinya di jeda acara Panel Forum Media KOMAKO (Korp Mahasiswa Komunikasi) FISIPOL UGM, 6 April 1996 lalu.

DOK. PANITIA COMMEX '96 FISIP UGM

Dalam kesempatan itu **Eduard Depari,** demikian nama lengkapnya, menjelaskan panjang lebar kondisi televisi Indonesia dalam struktur ekonomi, politik, dan budaya. Itu dilakukan mengingat kenyataan bahwa fungsional tidaknya media komunikasi dalam proses perubahan sosial, dapat diukur dari sejauh mana adopsi nilai-nilai budaya di masyarakat terbentuk.

"Televisi sebagai lembaga ekonomi harus *survive*. Ini membuat televisi, terlebih TV swasta, mengutamakan pencapaian khalayak pemirsa. *Dus*, menu tayangannya diupayakan semenarik mungkin. Sebab, hanya dengan begitu, iklan dapat terjaring,"jelasnya .

Namun, buru-buru Bang Edu mengingatkan, bahwa kepentingan televisi tidak berhenti di terminal fungsi ekonomi ini. Tetapi, televisi juga mengupayakan adanya transformasi nilai-nilai modernitas.

"Sebab, dalam perpektif politik, fungsional-tidaknya stasiun televisi diukur dari sejauh mana ia mampu mensosialisasikan nilai-nilai ideal sehingga orang mampu berfikir kritis dan demokratis," tegas Direktur Humas RCTI, yang alumnus FISIPOL UGM ini.

Khoirul Rosyadi

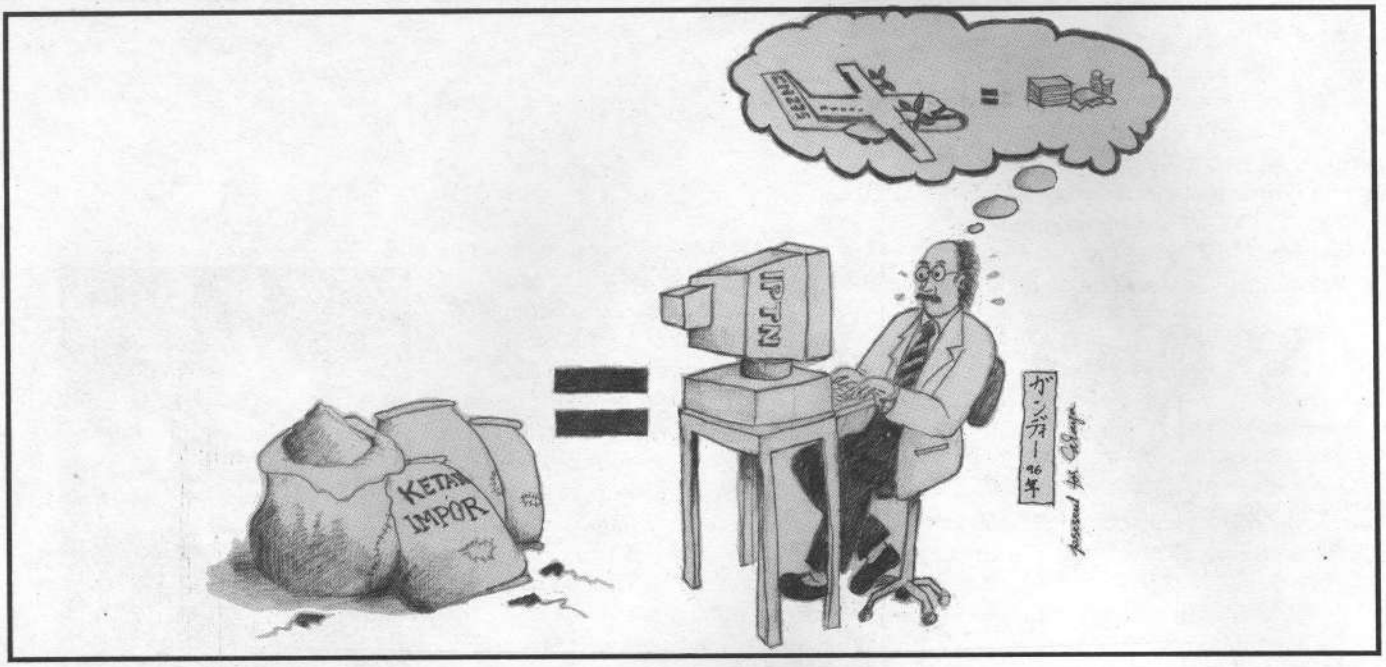

Demokrasi Sakit

Seorang wartawan suatu hari menemui seorang pakar politik sebuah universitas ternama. "Bagaimana tanggapan Bapak terhadap pendapat yang mengatakan bahwa demokrasi kita sedang sakit?"

Sebelum menjawab, sang pakar tampak berpikir serius. "Ah, siapa bilang begitu. Menurut saya demokrasi kita baik-baik saja. Cuma, suasananya memang lagi morat-marit," jawabnya enteng sambil ngeloyor pergi untuk memberikan kuliah tentang demokrasi.

Ebo

Populasi

Sebuah penelitian/studi tentang populasi kucing di daerah Solo dan Sumatera Utara menunjukkan perbedaan yang sangat tajam. Di daerah Solo populasinya sangat besar, sedang populasi di daerah Sumatera utara sangat sedikit.

Setelah ditelusuri sebab-musababnya ternyata dikarenakan oleh kebiasaan masyarakat setempat dalam "memanggil" hewan piaraan itu.

Di Solo, orang memanggil kucing dengan sapaan pusssh... dengan sangat halusnya. Kucing pun mau datang dan betah.

Sedang di Sumatra, orang memanggil kucing dengan sapaan yang sangat tegas : "Push, kemari kau!". Hatta, kucing pun malah lari ketakutan dan mati lemas.

Mamad dan Timbul

Jurkam keseleo

Menjelang Pemilu 1997 ternyata sudah ada kampanye dari OPP tertentu. Dalihnya bisa macam-macam: rapat pleno, temu kader, atau musyawarah warga. Pokoknya ada warga yang dikumpulkan dan di situ ada "kampanye" untuk mendukung OPP tertentu. Suatu kali di sebuah desa ada sebuah pertemuan warga. Seorang tokoh yang dulunya dikenal jurkam OPP tetentu mendapatkan kesempatan bicara.

Karena merasa diberi peluang, sang tokoh benar-benar memanfaatkan forum untuk mengungkapkan misinya. Terjadilah dialog antara dia dan warga. Tokoh: Apa komentar Bapak-bapak tentang pembangunan desa kita. Baik, bukan? Listrik sudah masuk, jalan sudah diaspal, kita tak ada yang kelaparan. Iya, kan?

Warga: "Ya, Pak!"

Tokoh: "Bapak ingin kita terus demikian?"

Warga: "Ingin, Pak!"

Tokoh: Nah, itu semua karena OPP kita betul-betul berjuang untuk rakyat. Kalau Bapak-bapak ingin semakin sejahtera, kita harus mendukung OPP kita ini. Dalam Pemilu nanti Bapak harus mencobolosnya? Warga: "Mencoblos yang mana, Pak?"

Melihat antusiasme warga, sang tokoh jadi lepas kendali. Dengan terburu-buru dan penuh semangat ia menjawab:

"Bapak-bapak harus mencoblos kontestan nomor dua. Yang gambarnya kepala banteng. Ya! Jangan lupa itu!"

Warga: ???!

Ebo dari Antok

Catur

Di suatu dusun di daerah Jawa Tengah sedang *ngetren* suatu jenis catur yang menyimpang dari aturan yang digariskan oleh *Federation Interna-tionale Des Echees* (FIDE).

Bila dirasa menggang-gu langkah diperbolehkan untuk makan sesama teman. Kuda hitam boleh makan bidak hitam. Raja putih boleh lalap menteri putih.

"Catur macam apa ini," teriakku protes.

Dengan tenang salah seorang warga menjawabnya, " Namanya saja Catur Orde Baru, mas."

Kelik Supriyanto

Mata

Seorang mahasiswi yang *ngefans* seorang artis ganteng tidak percaya bahwa artis idolanya itu menikah dengan seorang pengusaha yang bisa-biasa saja itu karena dia tertarik dengan sorot matanya.

"Mana mungkin, menurut saya matanya biasa saja, "sanggahnya.

Jawab temannya, "Maksud saya mata pencahariannya."

Kelik Supriyanto

JANGAN TAKUT BICARA POLITIK

SIAPA *BILANG*, PENGUSAHA TAK PERLU PAHAM MASALAH POLITIK?

Politik sudah merupakan bagian yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Apalagi bagi pengusaha, pengaturan strategi masa depan usahanya sangat berkait erat dengan politik, dalam negeri maupun luar negeri. Jadi, tak ada alasan untuk tabu bersentuhan dengan masalah politik.

Karena itu, Pembaca, kami hadir. TIRAS penyaji masalah politik, dengan kritis tanpa harus sinis.

Tunggu kami setiap Kamis.

MINGGUAN BERITA

TIRAS

TAJAM TANPA PRASANGKA

Mereka Bukan Sampah Masyarakat

Seorang penderita Aids bukanlah seekor anjing kudisan atau sepiring nasi basi yang dihinggapi lalat-lalat kotor di tempat sampah ! Mereka seperti halnya kita, yang masih membutuhkan kasih sayang dan lingkungan untuk bersosialisasi. Dengan bersikap ramah dan bersahabat dengan mereka, maka kita telah membantu mereka menjadi lebih tabah dalam menghadapi penderitaan yang sedang mereka alami. Mereka bukan sampah masyarakat, Sobat !

FX WOTO W/PEMENANG II LOMBA KREATIF DESAIN IKLAN COMMEX '96 KOMAKO FISIPOL UGM

Dipersembahkan oleh Majalah BALAIRUNG UGM bekerjasama dengan Korps Mahasiswa Komunikasi (KOMAKO) - UGM dan Bank Rakyat Indonesia